



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TRANSNASIONALISASI JEJARING TEROR DOMESTIK  
STUDI KASUS LTTE**

**TESIS**


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains  
pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional**

**MARIAMAH  
100 674 3903**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME DALAM KEAMANAN  
INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mariamah**  
**NPM : 1006743903**  
**Tanda Tangan : **  
**Tanggal : 29 Juni 2012**

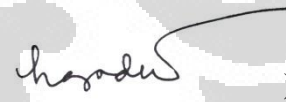
## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Mariamah  
NPM : 100 674 3903  
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional  
Judul Tesis : Transnasionalisasi Jejaring Teror Domestik : Studi Kasus LTTE.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Dr. Hariyadi Wirawan (  )

Sekretaris : Asra Virgianita, MA (  )

Pembimbing : Dr. Makmur Keliat (  )

Penguji ahli : Dr. Edy Prasetyono (  )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 29 Juni 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariamah  
NPM : 100 674 3903  
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Transnasionalisasi Jejaring Teror Domestik : Studi Kasus LTTE”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan

  
(Mariamah)

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan izinnya untuk menyelesaikan tesis ini. Begitu pula terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah, Ibu, saudara dan sahabat yang telah mendukung selama proses penulisan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Sains Universitas Indonesia. Kemudian, yang tak kalah penting adalah bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang telah melancarkan dan mengarahkan tesis ini. Diantaranya, saya ucapkan terimakasih setinggi – tingginya kepada :

- 1) Dr. Makmur Keliat selaku dosen pembimbing serta Ketua Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional atas waktu dan kesabaran dalam membimbing saya, serta masukan – masukan yang sangat berharga;
- 2) Sam Mullins dan Daniel Pickard yang telah membantu menyediakan akses kepada karya – karya mereka untuk dijadikan bahan bacaan.
- 3) Teman – teman kelas terorisme angkatan pertama, atas persahabatan yang tak tergantikan.

Ucapan ini mungkin hanya bisa mewakili rasa terimakasih saya kepada pihak – pihak yang tersebut diatas. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan, terutama kajian terorisme pada khususnya.

Jakarta, 29 Juni 2012



Penulis

## ABSTRAK

Nama : Mariamah  
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional  
Judul : Transnasionalisasi jejaring teror domestik; Studi kasus LTTE

Tesis ini membahas transnasionalisasi jejaring teror domestik, dengan menggunakan studi kasus LTTE. Analisis dalam tesis ini menggunakan kerangka teori oleh Thomas L Friedman, mengenai struktur dan pola globalisasi. Kajian literatur dari tesis ini menemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi transnasionalisasi jejaring teror, dari domestik menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Faktor yang paling utama adalah perkembangan teknologi, pasar bebas, dan pengaruh ideologi dan nasionalisme etnis tamil. Ditemukan pula, berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, dan pentingnya keseimbangan antara aktor – aktor tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LTTE memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan taktik teror, jaringan imigran internasional atau diaspora, dan kejahatan terorganisir transnasional, serta memanfaatkan globalisasi untuk mencapai tujuan mereka.

Kata kunci:  
*Terorisme, Transnasionalisasi, Jejaring Teror, LTTE, Kejahatan Terorganisir*

## ABSTRACT

Name : Mariamah  
Study Program : Terrorism study in International Security  
Title : The trans-nationalization of domestic terror networks; a case study of Liberation Tiger of Tamil Eelam

This thesis discusses the trans-nationalization of domestic terror networks, using a case study of the Liberation Tigers of Tamil Eelam. The analysis uses the framework of thinking by Thomas L Friedman, about the structure and patterns of globalization. The literature review showed that there are some factors that affect the trans-nationalization of domestic terror network into a threat of international community. The most important factors are technology, free market, ideology and nationalism of Tamil ethnic. The result showed that there are some actors involved in this process and the importance of the balance among those actors. To conclude, LTTE is able to integrate terror tactics, international immigrant network or diaspora and transnational organized crime, as well as utilizing globalization to pursue their objectives.

Key words:

*Terrorism, Transnationalization, Terror networks, LTTE, Organized Crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tinjauan Pustaka.....	6
1.3.2 Nasionalisme Etnis Tamil .....	6
1.3.3 Kriminal, insurgen, teroris dan milisi di Irak .....	6
1.3.4 Terorisme internasional, diaspora dan globalisasi .....	7
1.3.5 Terorisme dan Kriminal .....	10
1.4. Kerangka konsep.....	12
1.4.1 Terrorisme internasional .....	12
1.4.2 Ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional .....	13
1.4.3 Globalisasi .....	14
1.4.4 Diaspora dan Trans nasionalisasi .....	15
1.5. Asumsi Penelitian .....	16
1.6. Operasionalisasi Konsep .....	17
1.7. Metode Penelitian .....	18
1.8. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	19
1.9. Rencana Pembabakan tesis .....	20
<b>2. ANCAMAN LTTE TERHADAP KEAMNAN MASYARAKAT INTERNASIONAL .....</b>	<b>22</b>
2.1 Tentang LTTE .....	22
2.1.1 Sejarah singkat LTTE .....	22
2.1.2 Perkembangan LTTE saat ini .....	27
2.2 2.2 Kejahatan terencana oleh LTTE .....	28
2.2.1 Perdagangan senjata .....	29
2.2.2 Perdagangan obat – obatan terlarang .....	30
2.2.3 Perdagangan manusia .....	31
2.3 Gerakan terorisme oleh LTTE .....	32
2.3.1 Terorisme lintas Negara .....	34
2.3.2 Terorisme maritime .....	35
2.3.3 Terorisme dunia maya .....	36
2.3.4 Jaringan dengan kelompok teroris lainnya .....	36
<b>3. KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL.....</b>	<b>40</b>



3.1	Terorisme dan terorisme internasional .....	40
3.2	Kejahatan terorganisir .....	50
3.3	Kerangka hukum internasional .....	63
3.3.1	Konsekuensi transnasional .....	65
3.3.2	Tindakan yang di kriminalkan .....	66
3.3.3	Penolakan atau ketidakmampuan Negara asal untuk menangani pelanggaran kriminal .....	67
3.3.4	Penggunaan kekuatan atau ancaman untuk melakukan kekerasan .....	69
3.3.5	Tingkat pelanggaran kriminal parah .....	69
3.4	Reaksi masyarakat internasional terhadap LTTE .....	70
3.4.1	Pernyataan Negara – Negara terkait dengan LTTE .....	70
3.4.2	Pernyataan Lembaga Internasional terkait LTTE .....	70
<b>4.</b>	<b>FAKTOR PENDORONG DAN AKTOR DALAM TRANSNASIONALISASI JEJARING TEROR DOMESTIK LTTE .....</b>	<b>71</b>
4.1	Faktor pendorong transnasionalisasi .....	71
4.1.1	Perkembangan Teknologi dan informasi .....	72
4.1.2	Transportasi .....	72
4.1.3	Komunikasi .....	73
4.2	Ideologi .....	81
4.2.1	Kapitalisme global .....	81
4.2.2	Nasionalisme tamil .....	81
4.3	Ekonomi .....	86
4.3.1	Kejahatan transnasional global dan Penggalangan dana .....	86
4.4	Keseimbangan aktor aktor dalam transnasionalisasi jejaring LTTE ..	87
4.4.1	Keseimbangan Negara dan Negara .....	87
4.4.2	Keseimbangan Negara dan pasar global .....	90
4.4.3	Keseimbangan Negara dan individu (“Nation-state” dan “the People”) .....	92
4.4.3.1	Dukungan Material dan Imaterial .....	93
4.4.3.2	Wadah perkembangan embrio untuk regenerasi pemimpin perlawanan etnis Tamil .....	99
<b>5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1.	Kesimpulan.....	10
5.2.	Saran .....	101
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Transnasionalitas serangan dan jaringan LTTE .....	34
Gambar 3.1. Alur utama kejahatan terorganisir di seluruh dunia .....	54
Gambar 3.2. Populasi pengguna narkoba .....	58
Gambar 3.3. Asal korban perdagangan manusia di Eropa barat dan Timur .....	59
Gambar 3.4. Distribusi pengguna kokain di Eropa 2007 – 2008 .....	59
Gambar 3.5. Konsumsi Heroin Global 2008 .....	60
Gambar 3.6. Total rakyat sipil yang membawa senjata .....	60
Gambar 3.7. Persediaan persenjataan di daerah konflik 2008 .....	61
Gambar 3.8. Usaha penyelundupan barang di batas Eropa 1999 – 2008 .....	61
Gambar 3.9. Titik temu kejahatan terorganisir dan ketidak stabilan .....	62
Gambar 4.1. <a href="http://www.tamileelamnews.com">www.tamileelamnews.com</a> .....	80
Gambar 4.2. <a href="http://www.eelamnews.com">www.eelamnews.com</a> .....	80
Gambar 4.3. <a href="http://www.eelamweb.com">www.eelamweb.com</a> .....	81
Gambar 4.4. <a href="http://www.tamilnet.com">www.tamilnet.com</a> .....	81
Gambar 4.5. Persebaran barang yang di jual melalui situs illegal .....	92
Gambar 4.6. Danny Davis .....	98
Gambar 4.7. Bruce Fein .....	98
Gambar 4.8. Members of Parliament of the United Kingdom .....	99

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Paska terjadinya serangan 11 September 2001, diskursus dalam fenomena terorisme global kontemporer didominasi oleh Al-Qaeda dan faktor – faktor pendorong gerakannya. Al-Qaeda menjadi inti dari perbincangan terorisme dan tetap menjadi pertanyaan bagi para pembuat kebijakan di berbagai negara<sup>1</sup>. Meskipun kelompok ekstrimis lain juga menggunakan kekerasan, operasi profil tingkat tinggi Al-Qaeda seperti yang terjadi pada peristiwa 11 September 2001, serta serangan di Inggris dan Spanyol yang mengikuti peristiwa tersebut, menjadikannya topik yang selalu diperbincangkan, selain karena paparan media yang diterimanya<sup>2</sup>. Tentu saja hal ini tidak lepas dari gerakan perang global terhadap teror atau GWOT (*Global War On Terror*) yang dicanangkan oleh presiden George W. Bush, yang menjadikan Al-Qaeda sebagai target utamanya<sup>3</sup>. Sejalan dengan hal ini, gerakan terorisme global yang didominasi oleh Al-Qaeda ikut serta membawa istilah populer dalam kajian terorisme, yaitu jihad. Dalam menjelaskan proses perkembangan pemikiran seorang jihadis, Hamid mengutip ucapan Aiman Alzawahiri yang mengatakan bahwa muslim – muslim muda sepertinya (Hamid) merupakan harapan bagi masa depan dan kembalinya *Khilafa* atau kekalifahan atau dominasi muslim secara global. Kemudian Hamid memaparkan bahwa salah satu keberhasilan Zawahiri adalah menjadikan jihad lebih personal, mengubahnya dari tanggung jawab umat yang kolektif menjadi tanggung jawab individu setiap Muslim<sup>4</sup>. Tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam melalui tindakan radikal muslim individual, dan di dalam diri mereka

---

<sup>1</sup> Philip Seib, dan Dana M Janbek, *Global Terrorism and New Media, The Post-Al Qaeda Generation*, New York: Routledge, 2011, hal. 22 – 24.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Thomas A Johnson, *The War on Terrorism, A Collision of Values and Strategies*, New York: CRC Press, 2009, hal. xii.

<sup>4</sup> Tawfik Hamid, "The Development of a Jihadist's Mind", *Current Trends of Islamist Ideology*, Vol. 5. 06 April, 2007, Paragraf 24, Seperti yang tersedia di [http://www.currenttrends.org/research/pubID.63/pub\\_detail.asp](http://www.currenttrends.org/research/pubID.63/pub_detail.asp), di akses pada 21 – 02 – 2012, pukul 21:00 WIB.

masing - masing sudah tertanam niat untuk melaksanakan jihad personal. Sehingga muslim – muslim muda mampu melaksanakan tindakannya tanpa kelompok kolektif. Pernyataan Zawahiri dan para rekan – rekan jihadisnya, menurut Hamid, berdasarkan pada salah satu ayat al-Quran yang berbunyi: “maka berjuanglah karena Allah – kau memiliki tanggung jawab hanya untuk dirimu sendiri – dan membangunkan mereka yang percaya (untuk berperang)”<sup>5</sup>. Dari uraian diatas jelas bahwa jihad memiliki konteks global demi mewujudkan kekhalifahan. Dalam hal ini, Haberkern mengungkapkan pendapat yang sejalan, yaitu perang terhadap terorisme memiliki konteks global karena karakter jaringannya dan negara – negara yang memberikan dukungan terhadap mereka harus ikut dimasukkan dalam kerangka strategi operasi. Dalam konteks ini, Haberkern memaparkan pentingnya mendeteksi pusat gravitasi (*center of gravity*) dari terorisme sendiri dalam melaksanakan gerakan melawan terorisme. Ideologi dianggap sebagai pusat gravitasi (*center of gravity*) dari terorisme, dan menggaris bawahi bahwa perang terhadap teroris adalah merupakan perang melawan ideologi dan penyokongnya karena mengancam keamanan Nasional dan membutuhkan komitmen dan pendekatan yang mencakup kerjasama ekonomi, diplomatik, dan intelijen tau penegakan hukum. Di dalam uraiannya, jihad dianggap sebagai salah satu katalis persebaran gerakan terorisme global<sup>6</sup>. Johnson, juga menekankan hal yang sama bahwa sangatlah penting untuk mengetahui pusat gravitasi dari sebuah gerakan terorisme sebelum melawannya. Dan ideologi dari kelompok teroris tersebutlah yang harus di kalahkan<sup>7</sup>.

Disisi lain, kajian terorisme dan kriminal lebih sering dipelajari secara terpisah dengan satu sama lain, dan hal ini membentuk batas yang seharusnya tidak diperlukan, termasuk dalam usaha memahami garis persinggungan antara terorisme dan kriminal yang sebenarnya sangat diperlukan dan dengan

---

<sup>5</sup> Al-Quran, 4:84.

<sup>6</sup> John L Haberkern, *The Global War on Terrorism: Ideology as its Strategy Center of Gravity, Strategy Research Project*, Pennsylvania: US Army War College, 2004, hal. 5 -6.

<sup>7</sup> Johnson, *Op. Cit.*

mempelajari persamaan antara terorisme dan kriminal bisa menjadi kontribusi yang signifikan dalam kajian terorisme<sup>8</sup>.

Berbeda dengan uraian uraian mengenai jihad, pilihan strategi bom bunuh diri dan kegigihan dan keterlibatan emosional para pejuang fanatik LTTE dan pelaku tindakan serangan bunuh diri, belum bisa dijelaskan dengan menggunakan istilah – istilah lama seperti ‘revolusioner’, ‘reaksioner’, ‘sayap kanan’ atau ‘sayap kiri’<sup>9</sup>. Begitu pula persebaran dan jaringan internasional LTTE yang menjadi penopang gerakan domestiknya memiliki berbagai dimensi seperti operasi kejahatan kriminal terorganisir sebagai sumber pendanaan internasional serta terorisme lintas negara, seperti terorisme maritim dan dunia maya. Disamping itu, motivasi yang melandasinya adalah berdirinya negara terpisah dari Sri Lanka, yaitu *Tamil Eelam*, bukan perjuangan untuk membela agama atau ideologi tertentu akan tetapi bersifat domestik dan ditujukan kepada pemerintahan resmi Sri Lanka.

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dan mengapa LTTE yang bermula dengan motif domestik, ternyata kemudian menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Hal ini bermula dari keterbatasan kesempatan yang ada bagi etnis Tamil di Sri Lanka, mereka menyebar keseluruh dunia untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, bagi diri mereka sendiri, maupun bagi keluarga. Sehingga, masyarakat Tamil mengakui ada saudara mereka yang berjumlah lebih dari 70 juta jiwa, yang tersebar di Amerika, benua Eropa, Canada, dan sebagainya<sup>10</sup>. Dan persebaran inilah yang menjadi sumber pendanaan dan dukungan luar negeri bagi operasi organisasi Tamil di dalam negeri. Meskipun tujuannya adalah insurgensi dan bersifat domestik, Tamil Eelam terbukti mampu bernegosiasi dengan pemerintah Inggris untuk mendapatkan simpati, dan bahkan salah satu pemimpinnya di New York mampu memberikan dukungan hukum<sup>11</sup>. Sayangnya, persebaran ini juga diduga

---

<sup>8</sup> Sam Mullins, “Parallels Between Crime and Terrorism: A Social Psychological Perspective”, *Studies in Conflict & Terrorism*, 32: 9, hal. 811 – 830.

<sup>9</sup> David J Whittaker, *The Terrorism Reader*, London: Routledge, 2001, hal. 75 – 77.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

menjalankan berbagai jenis kejahatan terencana seperti penyelundupan manusia, perdagangan senjata, dan jual beli obat – obatan terlarang.

Secara internasional, LTTE bekerja pada tiga tingkatan yang berbeda, yaitu propaganda dan publikasi, pemerolehan senjata, dan pengumpulan dana. Berbagai negara juga telah menyatakan kekhawatiran mereka terhadap gerakan terorisme LTTE<sup>12</sup>. Pergerakan LTTE terdeteksi di berbagai negara dan Departemen luar negeri Sri Lanka sendiri pada tahun 2007 mengidentifikasi gerakan macan Tamil yang berbasis negara, tersebar di Australia, Kanada, Asia, Eropa, India, kepulauan Maldive, Timur Tengah, Afrika selatan, serta Amerika. Gerakan ini berkisar pada kejahatan terorganisir seperti pengumpulan dana, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan senjata dan obat – obatan terlarang ilegal, terorisme maritim dan dunia maya, dan sebagainya. Hal ini belum termasuk kaitan antara jaringan LTTE dengan kelompok teroris lain seperti Kurdishtan worker's party, atau PKK, ULFA, MILF, Taliban dan Al-Qaeda, militant Maois dari India, dan ETA<sup>13</sup>.

Dalam sebuah penelitian yang dikeluarkan oleh Badan Kriminal dan obat – obatan terlarang PBB, dinyatakan bahwa kejahatan transnasional terorganisir telah berkembang secara luas dan gelombang terakhir globalisasi merupakan tantangan dan kesempatan tersendiri bagi kelompok kriminal tersebut<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa meskipun jaringan kriminal transnasional sudah terlibat dalam kejahatan transnasional dalam jangka waktu yang lama, namun kini terjadi pergeseran dan kelompok atau jaringan tersebut mulai digantikan oleh kelompok – kelompok dan jaringan yang lebih fleksibel dan lebih kecil, yang lebih mampu beradaptasi terhadap penegakan hukum yang digunakan untuk melawannya dibandingkan oleh kelompok dengan hirarki tradisional. Jaringan atau kelompok ini kemudian disebut sebagai “generasi berikutnya” dari kejahatan terencana. Semakin dilemahkannya kelompok kriminal tradisional

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ministry of Foreign Affairs, *LTTE, The international Dimension of Terrorism*, Sri Lanka: Ministry of Foreign Affairs, 2007, Bagian ke 5.

<sup>14</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *A transnational Organized Crime Threat Assessment*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010. <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf>, Di akses pada 09 – 04 -2012 : 21:00 WIB.

melalui penangkapan dan penyeragaman, maka kekosongan pasar akan segera di isi oleh kelompok-kelompok kriminal yang lebih tangkas. Dan dari sinilah, evolusi kelompok kriminal terorganisir akan memiliki paralel dengan perkembangan struktur sel teroris<sup>15</sup>. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Shelley dan Picarelli yang berpendapat bahwa topik – topik seperti kejahatan transnasional terencana dan korupsi sudah mulai dirujuk dalam analisa terorisme, terutama dalam membahas bagaimana terorisme dan kejahatan transnasional terencana berjalan sejalan atau berpisah dalam operasinya<sup>16</sup>.

Untuk kasus LTTE, berbagai negara telah mengeluarkan pernyataan yang memasukkan LTTE dalam daftar organisasi teroris internasional. Seperti yang kita bisa lihat dalam daftar organisasi yang dicekal oleh pemerintah India, Amerika, Kanada, Dewan Uni Eropa serta dalam piagam PBB. Semuanya mengeluarkan pernyataan baik secara spesifik mengenai LTTE, maupun secara lebih general mendaftarkan LTTE sebagai organisasi teroris. Hal ini merupakan wujud dari upaya dalam membatasi gerak LTTE dari masyarakat Internasional<sup>17</sup>.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persebaran jaringan organisasi teroris dan kriminal internasional memiliki berbagai faktor dan dimensi. Dalam kasus ini, jaringan LTTE menyebar ke penjuru dunia menggunakan pendorong dan pola pergerakan yang berbeda dengan Al-Qaeda, begitu pula dengan operasi yang mereka gunakan. Persebaran etnis Tamil memiliki karakter tersendiri, yaitu dengan memanfaatkan globalisasi dan kelonggaran kebijakan berbagai negara untuk mencari tempat yang aman bagi mereka. Begitu pula dalam operasinya, LTTE bertumpu pada kejahatan transnasional yang dikelola untuk memperoleh keuntungan dan digunakan dalam mendanai gerakannya baik di dalam maupun diluar negeri. Berawal dari gerakan insurgensi yang bersifat domestik, ternyata LTTE berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan internasional. Bukan hanya bagi negara – negara yang memiliki keterkaitan dengan Sri Lanka baik secara geografis maupun politik,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Louise I Shelley dan John T Picarelli, *Methods Not Motives: Implications of the Convergence of International Organized Crime and Terrorism*, Washington: Transnational Crime and Corruption Center, American University, 2002, hal. 305.

<sup>17</sup> Ministry of Foreign Affairs, *Op. Cit.*

namun juga bagi negara – negara lain yang terkena imbas dari gerakan terorisme LTTE. Dari sinilah, penulis mencoba mengemukakan sisi lain dari pola pergerakan jaringan terorisme Internasional, yaitu perkembangan jaringannya dan menganalisa faktor apa saja yang menyebabkan jaringan tersebut menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan masyarakat internasional.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan keinginan mendirikan negara terpisah Tamil Eelam, dan memperjuangkan tujuan yang bersifat domestik, LTTE kemudian berkembang menjadi organisasi dengan jaringan global dan pergerakan transnasional yang mengancam kedamaian dan keamanan masyarakat internasional, baik itu negara yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjelaskan fenomena ini, penulis mengangkat dengan pertanyaan permasalahan penelitian sebagai berikut:

***Mengapa LTTE menjadi jaringan teroris transnasional dan menjadi ancaman bagi kedamaian dan keamanan masyarakat internasional?***

## 1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan thesis ini, penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka untuk dijadikan rujukan.

### 1.3.1 Nasionalisme etnis Tamil

Penulis menggunakan buku *Life on the Outside. The Tamil Diaspora and Long Distance Nationalism* dalam melihat fenomena nasionalisme jarak jauh etnis Tamil yang telah bermigrasi ke luar Sri Lanka. Buku ini membahas proses perpindahan etnis Tamil, dan penyesuaian mereka ke dalam lingkungan sosial dan budaya yang baru setelah mereka bermigrasi. Studi kasus yang digunakan adalah keberadaan etnis Tamil di Norwegia, yang berjumlah 7000 orang waktu penelitian ini dilaksanakan. Dengan pembahasan yang lebih luas, penelitian yang dilakukan oleh Oivind Fuglerud ini bersifat komparatif dan stimulatif, dengan perbandingan



keberadaan pengungsi Tamil di berbagai negara di negara Barat. Fuglerud berpendapat bahwa ketika istilah diaspora dan transnasionalitas mulai muncul dalam dunia antropologi, maka Persebaran etnis Tamil dari Sri Lanka tidak boleh terlewatkan dalam pembahasan. Dalam bukunya, Fuglerud mencoba menempatkan interaksi etnis Tamil di Norwegia melalui proses sosial yang lebih luas<sup>18</sup>.

### 1.3.2 Kriminal, insurgen, teroris dan milisi di Irak

Untuk melihat bagaimana gerakan insurgen dan kriminal bisa melebur dengan gerakan teroris, penulis menggunakan sebuah laporan yang disusun oleh Phil Williams sebagai rujukan. Buku tersebut berjudul *Criminals, Militias, And Insurgents : Organized Crime In Iraq*<sup>19</sup>. Buku ini mencoba menjelaskan kebangkitan kriminal terencana, dan korupsi di Irak dewasa ini. William berpendapat bahwa, kriminal atau kejahatan terencana tidak serta merta muncul dari kekacauan dan invasi Amerika Serikat, akan tetapi kejahatan ini memiliki akar yang kuat dalam negara otoriter dan korup seperti Irak. William mencoba mengeksplorasi lebih jauh mengenai dimensi kejahatan terencana, terutama aktifitas kriminal yang digunakan bukan hanya oleh kelompok yang mencari keuntungan, akan tetapi juga oleh gerakan insurgen, milisi, kelompok sektarian, partai politik serta berbagai suku untuk memperkuat dasar sumber pergerakan mereka untuk kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut, William mencoba mengidentifikasi aktor – aktor yang menggunakan kesempatan dari tindakan kriminal, serta menganalisa bagaimana organisasi kriminal dan aktor lain bergabung, atau bersinggungan. Dalam salah satu bab-nya, William mengutip salah satu pernyataan penting mengenai keterlibatan teroris berdasar jihad, dengan kriminal terencana;

[A] deadly mix of organized criminality and jihadist savagery has increasingly come to blur the distinctions between the acts of violent terrorists and that of common thugs. In some cases, the spoils of crime are used to fund terrorist activity. In others, attacks against Iraqi authorities

<sup>18</sup> Oivind Fuglerud, *Life on the Outside, The Tamil Diaspora and Long Distance Nationalism*. London, 1991, hal. 1 – 3.

<sup>19</sup> Phils William, *Criminals, Militias, and Insurgents : Organized Crime in Iraq*, Philadelphia: Strategic Studies Institute Publication, 2009, hal. 1 - 15.

and community leaders bear closer resemblance to gangland turf wars than any of the various ideological or religious themes propagated by the al-Qaeda driven news cycle.<sup>20</sup>

*[A] gabungan yang memetakan dari kriminal terencana dan kekejaman Jihadis semakin menyamarkan perbedaan tindakan kekerasan teroris dan preman biasa. Dalam berbagai kasus, hasil dari tindakan kriminal digunakan untuk mendanai aktifitas teroris. Sedangkan dalam kasus lain, serangan terhadap pejabat dan pemimpin masyarakat di Irak lebih menyerupai perang geng dalam memperebutkan daerah kekuasaan, bukan menyerupai berbagai macam pergerakan bertemakan ideologi dan agama yang diusung oleh lingkaran berita dengan Al-Qaeda sebagai porosnya.*

Dalam analisisnya, William mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat organisasi organisasi milisia, insurgen dan terorisme terlibat dalam aktifitas kriminal dan menggunakan hasilnya sebagai sumber pendanaan.

### 1.3.3 Terorisme internasional, diaspora dan globalisasi

Paul Schiff Berman berpendapat bahwa, untuk memerangi terorisme global diperlukan peningkatan kerjasama internasional dan transnasional. Berman mengutip pendapat Harold Hongju Koh bahwa tantangan sebenarnya untuk menghadapi serangan terorisme global adalah mengetahui bagaimana memanfaatkan bagian konstruktif dari globalisasi untuk mengatasi bagian paling destruktifnya berupa terorisme global<sup>21</sup>.

Menurut Louise Shelly, di akhir abad ke dua puluh, sebuah fenomena baru telah muncul. Fenomena – fenomena tersebut meliputi globalisasi serentak dari kriminal, teroris, dan korupsi yang termanifestasi di seluruh dunia<sup>22</sup>. Shelley mengungkapkan bahwa, Kelompok Kriminal dan terorisme yang difasilitasi oleh korupsi, beroperasi secara bersamaan dari Amerika latin, Amerika Utara, Eropa, Australia dan Asia, dibuktikan oleh kasus – kasus kriminal yang menunjukkan

<sup>20</sup> Dikutip dalam tulisan Phils William, hal 221, diambil dari *American Citizen-Soldier: Buck Sargent's Warrior Politics*, [www.bucksargent.net/2006/05/csi-iraq.html](http://www.bucksargent.net/2006/05/csi-iraq.html), Di akses 26 – 04 – 2012, 18.30 WIB.

<sup>21</sup> Harold Hongju Koh, *Preserving American Values: The Challenge at Home and Abroad, in The Age of Terror: America And The World After September 11*, hal 145, 147 (Strobe Talbott & Nayan Chanda eds., 2001), Seperti dikutip dari Berman, Paul Schiff, "The Globalization of Jurisdiction," *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 151, No. 2 (Dec., 2002), hal 311-545.

<sup>22</sup> Louise Shelley, "The Globalization of Crime and Terrorism", *E-Journal USA*; 2006, hal. 1.

penggabungan aktifitas mereka secara ekstensif<sup>23</sup>. Fenomena ini lebih kompleks dari pada sekedar peralihan kelompok teroris menjadi kelompok kriminal untuk mendukung aktifitas mereka, namun merupakan fenomena tersendiri dimana jaringan kriminal yang mengglobal bekerja dengan teroris dan keduanya mampu menjalankan aktifitasnya dengan lancar, dengan bantuan dari korupsi yang merajalela.

Akhir perang dingin memberikan dampak yang luar biasa terhadap meningkatnya gerakan kriminal transnasional. Semenjak berakhirnya perang dingin, potensi konflik berskala besar telah menurun, tapi kemudian di akhir tahun 1980 terjadi peningkatan perjuangan regional yang cukup fenomenal. Namun, Shelley menekankan bahwa persediaan senjata dan sumberdaya manusia yang menggerakkan konflik ini terkait dengan aktifitas kriminal seperti perdagangan obat terlarang, perdagangan berlian, dan perdagangan manusia. Selain itu, konflik ini juga menimbulkan pengungsi dalam jumlah besar, merusak ekonomi pemerintahan negara mereka yang kemudian menjadi ladang perekrutan atau tempat berlindung untuk perencanaan dan pelatihan para teroris. Selain itu sebuah industri jasa juga berkembang untuk melayani seluruh bentuk kriminal transnasional. Termasuk penyedia dokumen palsu, pencuci uang, dan professional tingkat tinggi yang menyediakan layanan legal, finansial dan akuntan baik untuk kelompok kriminal atau teroris transnasional.

Shelley melanjutkan bahwa sebenarnya tidak ada yang baru dengan hal ini. Semenjak tahun 1930an, anggota mafia Italia di Amerika telah bepergian ke Jepang dan China untuk perdagangan obat – obatan. Begitu pula dengan anggota pelaku kejahatan di Amerika, juga banyak yang mengungsi ke Cina untuk menghindari jangkauan hukum Amerika. Anggota IRA juga mengikuti pola pergerakan ini dengan berlindung di komunitas Irlandia di luar negeri, yang juga memberikan dukungan finansial untuk organisasi mereka di Irlandia. Yang membedakannya hanyalah kecepatan dan frekuensi interaksi para pelaku, serta intensitas kerjasama dari dua bentuk kejahatan transnasional ini<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Aktifitas kriminal transnasional didorong oleh perkembangan pesat teknologi paska perang dunia kedua. Sebagai contoh perkembangan transportasi pesawat terbang, peningkatan telekomunikasi (termasuk telepon, fax, dan komunikasi lewat internet), serta pertumbuhan perdagangan internasional yang memfasilitasi pergerakan barang dan manusia.

Para pelaku kriminal transnasional mengambil keuntungan dari globalisasi, dengan mengembangkan jaringan transnasional, menyebarkan aktifitas, perencanaan, dan logistik ke beberapa benua, dan menghancurkan sistem sah negara yang digunakannya. Mereka menggerakkan manusia, uang dan komoditas dengan arus yang semakin pesat yang mampu menutupi kegiatan mereka. Gerakan global ini mereka lakukan untuk mencapai pasar, melanggengkan kegiatan mereka, dan menghindari deteksi. Teroris juga telah mengglobal agar bisa merekrut anggota secara internasional, mendekatkan gerakan mereka ke komunitas diaspora, mendukung gerakan tersebut secara logistik dan finansial, serta mendapatkan akses ke masyarakat yang lebih makmur<sup>25</sup>.

#### 1.3.4 Terorisme dan kriminal

Dalam menjelaskan keterkaitan terorisme dan kriminal, penulis menggunakan rujukan sebuah esai yang ditulis oleh Sam Mullins. Mullins berpendapat bahwa studi terorisme sebenarnya bisa belajar dan mendapatkan banyak masukan dari kriminologi<sup>26</sup>. Para pelaku tindakan kriminal memang tidak bisa dipadankan dengan populasi teroris, namun jika konteks kriminal dan populasi tertentu sama dengan teroris, maka area yang dipelajari dalam kriminologi bisa digunakan sebagai informasi yang bisa digunakan dalam studi terorisme<sup>27</sup>. Dan baik terorisme maupun tindakan kriminal memiliki satu karakter yang sama, yaitu relativitas. Sehingga dalam mendefinisikan terorisme, kita tidak bisa menghindari variasi – variasi yang mungkin muncul, baik secara budaya maupun ketika dilihat dari ranah hukum. Selanjutnya, Mullins berpendapat bahwa definisi teroris yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Mullins, *Op. Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

ada sekarang ini, terutama yang dipengaruhi oleh definisi dari dunia barat, kebanyakan berkonsentrasi pada target, yaitu target non – kombatan serta aktor atau pelaku serangannya. Sehingga definisi ini mengabaikan aktifitas – aktifitas yang menyita sebagian besar waktu para teroris, seperti mempersiapkan serangan, pendanaan, dan perencanaan. Di sisi lain, payung hukum masih berjuang untuk mengakomodir tuntutan terhadap para teroris, yang sering kali jatuh dibawah tuntutan kriminal ‘biasa’<sup>28</sup>.

Berikutnya, Mullins menjabarkan bahwa hal yang membedakan teroris dan kriminal adalah motivasi mereka. Kriminal melakukan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan teroris mencari keuntungan untuk melakukan tindak kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh kriminal juga cenderung lebih memiliki target tertentu dan instrumental jika dibandingkan dengan perilaku teroris yang lebih simbolik atau ekspresif dan umum serta tidak membeda – bedakan<sup>29</sup>. Menurut Mullins, proses pengaruh sosial tidak berlangsung secara searah dan tidak sepenuhnya didasari oleh ideologi. Namun begitu, ditemukan paralel antara teroris dengan kriminal, yaitu pengaruh sosial, identitas dan organisasi.

Mullins menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Makarenko<sup>30</sup>, yang menelusuri kaitan antara kejahatan terencana dan terorisme pada tahun 1970an dan 1980an di Timur Tengah, Asia dan Amerika latin. Kelompok – kelompok dalam area ini diduga memasuki aliansi strategis yang menyerupai bisnis dalam keadaan dimana keduanya akan mendapatkan keuntungan secara finansial atau operasional. Makarenko memusatkan perhatian pada hakikat jaringan kriminal dan teroris yang bersifat transnasional dan menggunakan persebaran komunitasnya sebagai *safe havens*. Kemudian Makarenko menambahkan bahwa baik kriminal maupun teroris sudah memiliki intelijen dan kemampuan kontra

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Seperti dikutip oleh Sam Mullins dari Tamara Makarenko, “*Terrorism and Transnational Organized Crime: Tracing the Crime-Terror Nexus in South East Asia*” dalam Paul Smith. ed., *Terrorism and Violence in South East Asia: Transnational Challenges to States and Regional Stability* (New York: M. E. Sharpe, 2005), hal. 169–187.

intelijen canggih, menggunakan tehnik penentuan target dan penyebaran yang sama, serta menggunakan jaringan atau struktur seluler<sup>31</sup>.

Berikutnya, Mullins menguatkan temuan ini dengan pendapat Curtis dan Karacan. Menurut Kurtis dan Karacan<sup>32</sup> ada kerjasama yang semakin meningkat serta aktifitas yang saling bersinggungan, termasuk pemerolehan senjata, narkotik dan perdagangan manusia, antara pelaku kriminal transnasional terencana dan teroris yang berada di Eropa Barat. Di dalam tulisannya, mereka mengemukakan bahwa asosiasi antara kriminal dan teroris memiliki tiga pola, yaitu :

- Aliansi untuk keuntungan kedua belah pihak, dimana persetujuan dibuat hanya untuk keuntungan finansial dan atau untuk mendanai operasi, tanpa berkompromi dengan ideologi.
- Keterlibatan secara langsung oleh kelompok teror dalam kejahatan terencana, sehingga mereka tidak memerlukan perantara, akan tetapi tetap mempertahankan fokus ideologis dibalik taktik tersebut.
- Mengganti ideologi dengan keuntungan sebagai motivasi utama dalam operasi mereka.

#### 1.4 Kerangka konsep

Penulis menggunakan beberapa konsep dalam penelitian ini, seperti terorisme internasional, ancaman keamanan internasional, transnasionalisasi jaringan, dan globalisasi.

##### 1.4.1 Terorisme Internasional

Dalam mendefinisikan konsep terorisme internasional, penulis mengambil sebuah referensi dan mengutip dari pendapat Milbank<sup>33</sup>. Di bawah ini merupakan definisi – definisi terorisme internasional yang bisa dijadikan referensi menurut Milbank :

*" [...] international and transnational terrorism are defined as follows :  
Common Characteristics : The threat or use of violence for political*

<sup>31</sup> Mullins, *Op. Cit.*

<sup>32</sup> Seperti dikutip oleh Sam Mullins dari Glenn Curtis and Tara Karacan, *The Nexus Among Terrorists, Narcotics Traffickers, Weapons Proliferators, and Organized Crime Networks in Western Europe* (Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress, 2002).

<sup>33</sup> Milbank, 1976 (in Schmid, Jongman et al., 1988: 41-42), seperti yang tertera di <http://www.erta-tcrq.org/analyses/definitions.htm>. Di akses 10 – 02 – 2012, 17:00 WIB.

*purposes when (1) such action is intended to influence the attitudes and behavior of a target group wider than its immediate victims, and (2) its ramifications transcend national boundaries (as a result, for example, of the nationality or foreign ties of its perpetrators, its locale, the identity of its institutional or human victims, its declared objectives, or the mechanisms of its resolution).*

“[...] terorisme internasional dan transnasional di definisikan sebagai berikut: Beberapa karakter yang sama yang dimiliki oleh keduanya : Ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik ketika (1) tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan kelompok tertentu yang dijadikan target, dan bukannya ditujukan kepada korban langsungnya, dan (2) hasilnya melampaui batas – batas nasional (dan karenanya, sebagai contoh, kebangsaan atau ikatan luar negeri dari para pelakunya, tempat kejadian peristiwa, identitas dari institusi atau orang yang menjadi korban mereka, tujuan yang mereka nyatakan, atau mekanisme resolusi yang mereka ambil).

*"International Terrorism: Such action when carried out by basically autonomous non-state actors, whether or not they enjoy some degree of support from sympathetic groups controlled by a sovereign state.*

“Terorisme internasional: tindakan yang dilaksanakan oleh aktor otonom non negara, baik ketika mereka menikmati dukungan yang sama dari kelompok simpatisan yang dikendalikan oleh negara sah atau tidak”.

*"Transnational Terrorism: Such action when carried out by basically autonomous non-state actors, whether or not they enjoy some degree of support from sympathetic states."*

“Terorisme Transnasional: Tindakan yang dilakukan oleh aktor otonom non negara, baik ketika mereka menikmati dukungan yang sama dari negara yang bersimpati atau tidak”.

#### *1.4.2 Ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional*

PBB mendefinisikan bahwa segala bentuk kejadian atau proses yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah besar, atau berkurangnya kesempatan hidup dan merusak atau mengacaukan negara - negara sebagai unit dasar dari sistem internasional dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional. Berdasarkan definisi ini, PBB menguraikan enam kelompok atau jenis ancaman – ancaman yang harus diwaspadai oleh warga dunia

dewasa ini dan dalam beberapa dekade mendatang<sup>34</sup>. Diantara ancaman – ancaman tersebut adalah:

- a. Ancaman ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan, penyakit menular dan degradasi lingkungan
- b. Konflik antar negara
- c. Konflik internal negara termasuk perang sipil, genosida, dan segala bentuk kekejaman dengan skala besar lainnya
- d. Senjata nuklir, radiologi dan kimiawi
- e. Terorisme
- f. Kejahatan terorganisir transnasional.

Untuk memperkuat hal ini Sekjen PBB Ban Ki Moon menyatakan bahwa, kejahatan transnasional, wabah atau pandemik, serta perubahan iklim merupakan tiga tantangan dalam menjaga kedamaian dan keamanan internasional. Meskipun ketiga tantangan tersebut bukanlah hal baru, ketiganya semakin melintas batas negara, menjadi semakin akut dan memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap manusia, negara, keamanan regional dan internasional. Dan salah satu bentuk nyatanya adalah meningkatnya konvergensi kejahatan transnasional terorganisir dan terorisme<sup>35</sup>.

### 1.4.3 Globalisasi

Dalam menjelaskan fenomena transnasionalisasi jaringan LTTE, penulis menggunakan kerangka keamanan internasional menurut Thomas L Friedman. Menurut Friedman, situasi paska perang dingin dunia internasional adalah sebuah era baru yang berjalan di atas sebuah sistem yang disebut oleh Thomas L. Friedman sebagai sistem globalisasi. Globalisasi memiliki atributnya sendiri yang dinamis, melibatkan integrasi pasar, negara, dan teknologi yang tak bisa dihindari

<sup>34</sup> United Nations, "A More Secure World: Our Shared Responsibility", *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, United Nations Department of Public Information; 2004, hal. 23.

<sup>35</sup> United Nations Security Council, *As Nature of New Threats Evolves, Security Council, Central To Keeping Peace, Must Also Keep Pace, Secretary-General Says During Council Debate on New Challenges*, Department of Public Information, News and Media Division: New York, 2011. <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10457.doc.htm>, Paragraf 1 – 4, tanggal 1 Mei 2012, pukul 21:00.



sampai kepada tingkat dimana seorang individu, perusahaan dan negara menjangkau dunia dengan lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam dari pada sebelumnya, dan terbentuk serangan balik dengan kekuatan besar dari mereka yang tertinggal atau dirugikan oleh sistem ini. Friedman dalam bukunya *The Lexus and the Olive Tree*, menyatakan bahwa globalisasi yang melanda dunia internasional telah menjadi sebuah sistem yang disangga oleh tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi ideologi, yaitu kapitalisme global dan nasionalisme Tamil, (2) dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas, dan (3) dimensi teknologi, dalam bentuk kemajuan radikal dalam sektor teknologi informasi. Sehingga adanya bentuk ketidakadilan dari segi ekonomi dalam ranah globalisasi yang juga mempengaruhi sifat ancaman sebagai konsekuensinya, dimana kondisi keamanan pada era paska perang dingin atau globalisasi lebih dipengaruhi dengan meningkatnya aktivitas aktor-aktor non-negara yang menyebarkan ancaman-ancaman yang sifatnya non-konvensional<sup>36</sup>.

Dalam menjelaskan keseimbangan dalam sistem globalisasi, Friedman mengungkapkan tiga jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan tradisional antara negara dan negara, dimana Amerika masih berkuasa. Yang kedua yaitu keseimbangan antara negara dan pasar global, yang terdiri dari jutaan penanam modal di seluruh dunia, yang mampu menyelesaikan transaksi hanya dengan sekali klik, dan disebut Friedman sebagai *electronic herd*. Perilaku pasar dan para *electronic herd* ini mampu memberikan dampak terhadap negara saat ini, bahkan sampai pada tahap meruntuhkan sebuah pemerintahan. Keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan hubungan antara individu – individu dengan negara. Friedman menyebut individu – individu ini sebagai *super-empowered*, atau super berdaya, karena globalisasi memberikan mereka kemampuan untuk mempengaruhi baik negara maupun pasar. Individu – individu ini memiliki kemarahan dan kebaikannya masing – masing, namun mereka semua mampu bertindak tanpa mediasi tradisional dari pemerintah, perusahaan, atau institusi negara/swasta lainnya. Friedman berpendapat bahwa agar kita bisa memahami globalisasi secara keseluruhan, interaksi kompleks antara negara melawan negara,

---

<sup>36</sup> Thomas L Friedman, *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*, Terjemahan, Bandung: ITB, 2000, hal. 22.

negara melawan pasar *super*, dan negara, pasar melawan individu yang sangat berdaya, harus dipahami secara menyeluruh.

#### 1.4.4 *Diaspora dan transnasionalisasi*

*Diaspora* didefinisikan sebagai “pergerakan, migrasi, atau persebaran warga negara jauh dari tanah air yang sudah terbangun atau tanah air nenek moyangnya”, contoh; diaspora warga kulit hitam di kota bagian utara. Definisi lain adalah “orang – orang yang tinggal jauh dari tanah air nenek moyangnya, sebagai contoh diaspora warga Afrika”<sup>37</sup>.

Rosenau, mendefinisikan transnasionalisasi sebagai ”proses di mana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa”<sup>38</sup>. Transnasionalisme sendiri memiliki berbagai aspek, diantaranya;

- a. Berurusan dengan kerjasama transnasional di tingkat lain bukan hanya negara. Sebagai contoh kerjasama berbagai institusi yang terletak di berbagai negara.
- b. Jika dibandingkan dengan kerjasama lintas batas negara (*Cross-border cooperation*) organisasi yang bekerjasama secara transnasional tidak perlu berada di area yang sama. Organisasi ini bisa berada di mana saja salakan memiliki kepentingan yang sama.
- c. Aktifitasnya tidak dipengaruhi letak negara – negara terkait akan tetapi aktifitasnya terkait dengan negara negara tertentu.

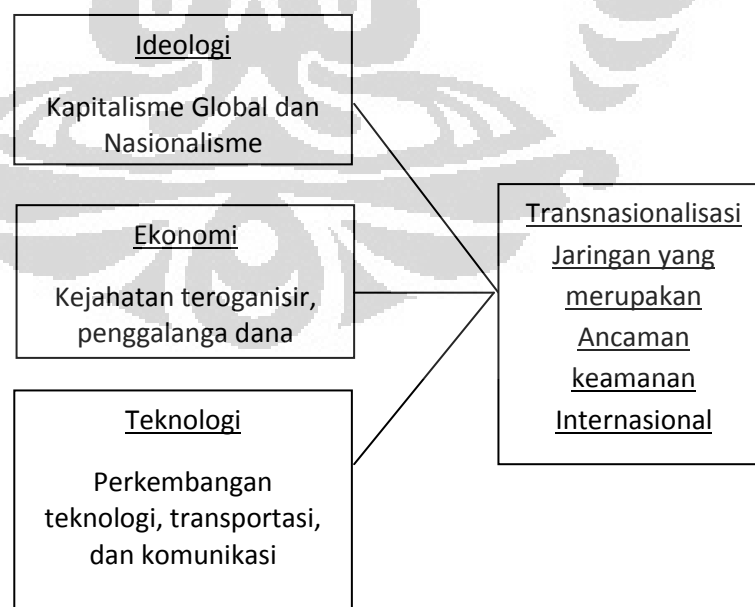
<sup>37</sup> Merriam Webster; definisi diaspora; <http://www.merriam-webster.com/dictionary/diaspora>. Di akses 25 – 05 – 2012, 19:00 WIB.

<sup>38</sup> James N Rosenau, *The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalization of World Affairs*, London: Frances Pinter, 1980, hal. 1.

- d. Aktifitasnya dijalankan di satu negara atau lebih, atau di jalankan di satu negara dengan pengaruh ke negara – negara lainnya.<sup>39</sup>

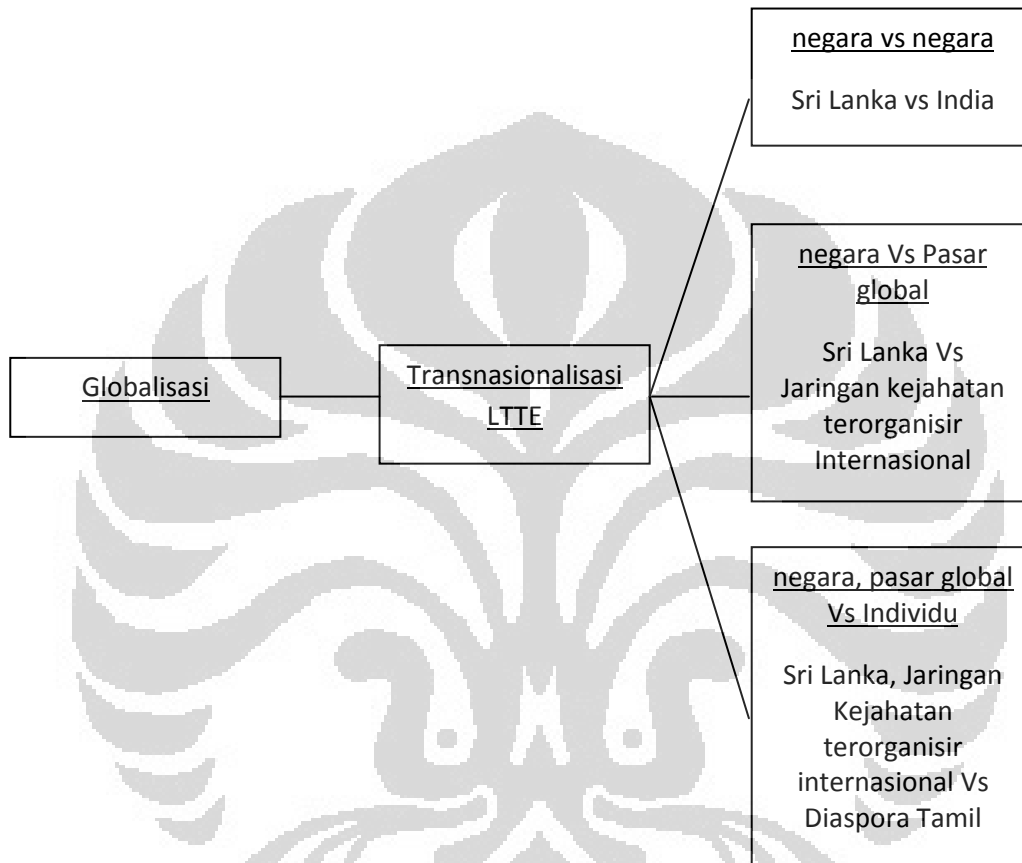
### 1.5 Asumsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan asumsi yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu bahwa globalisasi disangga oleh tiga dimensi; ideologi, ekonomi, dan teknologi. Penulis memilih model ini karena pola transnasionalisasi LTTE dipengaruhi oleh faktor – faktor yang termasuk dalam ketiga dimensi tersebut. Dalam pembahasan, variabel dependen yang penulis temukan adalah transnasionalisasi LTTE yang merupakan ancaman terhadap keamanan internasional. Kemudian penulis menemukan tiga variabel independen, yaitu ideologi (kapitalisme global dan nasionalisme Tamil), ekonomi (kejahatan terorganisir, penggalangan dana) dan teknologi (perkembangan teknologi yang digunakan dalam propaganda, komunikasi, serta transportasi). Ketiga variabel ini merupakan dimensi dari globalisasi yang akan digunakan untuk menjabarkan variabel independen, seperti yang ditunjukkan oleh bagan berikut:



<sup>39</sup> Interreg North Sea Region, "I Project Development: Transnationality," hal 1. [http://www.northsearegion.eu/UserFiles/File/Key%20Documents/Factsheets/No01\\_Transnationality.pdf](http://www.northsearegion.eu/UserFiles/File/Key%20Documents/Factsheets/No01_Transnationality.pdf). Di akses 06 – 05 -2012, pukul 13:00 WIB.

Dibawah ini merupakan bagan yang menunjukkan keseimbangan aktor – aktor yang terlibat dalam transnasionalisasi LTTE dalam kerangka teori globalisasi oleh Friedman;



### 1.6 Operasionalisasi konsep

Dengan studi kasus LTTE, ditemukan satu variabel dependen, yaitu transnasionalisasi jaringan LTTE. Variable tersebut dipengaruhi oleh tiga variabel independen, yaitu ideologi, ekonomi, dan teknologi.

Variabel Dependen	Variabel Independen	Penjabaran Variabel Independen	Kategori	Indikator

Ancaman LTTE terhadap keamanan internasional	Transnasion alisasi jaringan LTTE	Ideologi	Ada dorongan	Kapitalisme Global, Nasionalisme Tamil
			Tidak ada dorongan	
	Ekonomi	Ada dorongan	Jaringan kejahatan terencana transnasional LTTE yang digunakan untuk menggalang dana	
		Tidak ada dorongan		
	Teknologi	Ada dorongan	Inovasi dunia transportasi untuk mobilitas pengungsi, penggunaan teknologi untuk propaganda dan komunikasi antar benua.	
		Tidak ada dorongan		

### 1.7 Metode penelitian

Berdasarkan karakter dan konteks penelitian, penulis mengacu pada tabel berikut untuk menentukan metode apa yang akan digunakan<sup>40</sup>;

<sup>40</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, no. 2, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2005, hal. 57 – 65.

Kuantitatif	Kualitatif
Mengukur fakta-fakta objektif	Mengkonstruksikan realitas dan makna kultural
Fokus pada variabel-variabel	Fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif
Reliabilitas adalah kunci	Otentisitas adalah kunci
Bebas nilai	Hadirnya nilai secara eksplisit
Bebas dari konteks	Dibatasi situasi
Banyak kasus dan subjek	Sedikit kasus dan subjek
Analisis statistik	Analisis tematik
Peneliti terpisah	Peneliti terlibat

Sumber: W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Needham Heights, MA: Allyn& Bacon, 1997), hlm. 14.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan logika deduktif dimana teori dan hipotesis diuji dalam logika sebab akibat. Serta menggunakan desain yang bersifat statis melalui penetapan konsep-konsep, variabel penelitian serta hipotesis<sup>41</sup>. Peneliti menggunakan paradigma tradisional, positivistik, eksperimental atau *empiricist* dan mengukur fakta objektif melalui konsep yang diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan memperhatikan aspek reliabilitas<sup>42</sup>. Dalam proses penelitian penulis akan menganalisa ancaman LTTE bagi keamanan internasional kemudian melakukan penilaian terhadap faktor pendorongnya. Faktor atau dimensi ini ditentukan dalam penjabaran variabel independen. Pengumpulan data dibatasi dari awal dibentuknya LTTE sampai tahun 2010. Penelitian ini bersifat *Content analysis* (analisa isi) dengan mengkaji dokumen - dokumen yang berupa kategori umum dari makna. Jenis data yang akan digali adalah *front stage disclosed*, yaitu data – data yang terdapat dipermukaan dan bisa diakses oleh penulis, yang bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti kebijakan Pemerintah Sri Lanka dalam menghadapi LTTE, publikasi media masa, laporan dan pergerakan internasional LTTE, serta pernyataan negara – negara dan organisasi internasional terkait akan kekhawatiran terhadap ancaman LTTE.

<sup>41</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: Sage Publications, Inc, 1994, hal. 4 – 7.

<sup>42</sup> Soemantri, *Op. Cit.*

### **1.8 Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk melihat dimensi lain dari jaringan teroris internasional yang ada sekarang. Dengan adanya Al-Qaeda dan persebaran jaringannya yang berdasar pada ideologi sebagai katalis terorisme global, penulis ingin mengangkat sisi lain dari jaringan terorisme internasional yang tidak hanya berdasar pada ideologi, namun berdasar pada insurgensi dan bertumpu pada kejahatan terorganisir transnasional untuk menopang operasinya, kemudian melihat bagaimana jaringan tersebut dipengaruhi oleh globalisasi, kerangka hukum internasional, dan didukung oleh jaringan terorisme kejahatan transnasional dan/atau jaringan terorisme global lainnya, kemudian melebur dengan longgarnya peraturan-peraturan negara - negara terkait yang menerima persebaran anggota kelompok jaringan. Dari penelitian ini penulis berharap bahwa nantinya kajian terorisme bisa mengambil banyak pelajaran dari kajian kriminal dan sebaliknya, dimana tindakan terorisme acap kali berjalan seiringan atau bahkan saling memanfaatkan dengan jaringan kriminal baik domestik maupun internasional.

### **1.9 Rencana pembabakan thesis**

Tesis ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut. Bab satu berisi pendahuluan yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, yaitu tentang terorisme kontemporer, yang kini di dominasi oleh Al-Qaeda dan bagaimana Al-Qaeda bisa menjadi jaringan teroris Global. Kemudian penulis membandingkan dengan LTTE yang memiliki pendorong yang berbeda dengan Al-Qaeda, namun masih mampu menjadi jaringan dengan basis transnasional. Kemudian penulis menjelaskan perumusan masalah, kerangka konsep, pemikiran dan teori yang dipakai dalam penelitian ini serta metodologi yang akan digunakan. Di akhir bab satu, penulis menjabarkan tujuan dan manfaat penelitian.

Dalam bab dua penulis menjabarkan transnasionalisasi LTTE, yaitu dalam bentuk jaringan, kapasitas, target, karakter, dan dampak serangan. Untuk membuktikan bahwa LTTE memiliki ancaman terhadap dunia internasional

penulis mengumpulkan data mengenai operasi – operasi LTTE, dan pergerakannya, serta persebarannya. Ancaman LTTE termasuk berbagai tindak kejahatan transnasional terorganisir yang termasuk di dalamnya aktifitas pengumpulan dana untuk pergerakan domestik mereka dan tindakan terorisme di berbagai wilayah, baik di sekitar Sri Lanka maupun di negara lain.

Setelah ancaman ancaman dan transnasionalitas LTTE dipaparkan di bab dua, penulis menjabarkan kerangka konsep yang lebih mendalam mengenai terorisme dan kejahatan terorganisir global dan perangkat hukum apa saja yang dimiliki oleh institusi internasional seperti PBB, untuk melawannya. Kemudian penulis mengungkapkan beberapa ketentuan dalam menentukan apakah sebuah tindakan bisa dimasukkan dalam ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional atau tidak, dalam kerangka hukum internasional. Kemudian penulis menguraikan beberapa langkah yang sudah diambil oleh berbagai negara dan institusi internasional terhadap LTTE.

Dalam bab empat terdapat analisa faktor faktor pendorong transnasionalisasi jaringan LTTE, dan apa yang membuat LTTE bisa memiliki cakupan yang sangat luas. Diantara faktor faktor tersebut adalah faktor kemajuan teknologi dan informasi, yang mencakup komunikasi. Kemudian faktor ekonomi, dan faktor ideologi. Di akhir bab IV, penulis memaparkan bahwa terdapat tiga keseimbangan antar aktor yang terlibat dan ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan jaringan internasional LTTE. Ketiga keseimbangan tersebut adalah keseimbangan antara negara dan negara, yaitu Sri Lanka dan India, keseimbangan antara Negara dan pasar global, yaitu Sri Lanka dan pasar global jaringan kriminal terorganisir transnasional, dan yang ketiga keseimbangan antara negara dan individu, yaitu keseimbangan antara Sri Lanka dengan etnis Tamil yang tersebar di seluruh dunia.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang di dapatkan adalah bahwa LTTE mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi, tuntutan pasar gelap dan kesempatan mendapatkan logistik, serta celah - celah yang muncul baik di Sri Lanka sendiri maupun negara - negara yang menjadi tempat berlindung operasi mereka.



## BAB II

### TRANSNASIONALISASI LTTE DAN ANCAMANNYA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menentukan berbagai variabel yang membangun kerangka penelitian. Pada bab II ini penulis akan menjabarkan variabel dependen, transnasionalisasi dan ancaman LTTE terhadap masyarakat internasional. Di bagian awal Bab II ini penulis menjabarkan indikator – indikator transnasionalisasi dan ancaman nyata LTTE terhadap keamanan masyarakat internasional. Indikator tersebut berupa kapasitas LTTE dalam melakukan operasinya, target serangan LTTE yang melintasi batas negara dan memiliki dampak transnasional, serta jaringan yang terdiri dari diaspora etnis Tamil di seluruh dunia dan diperkuat oleh kaitan antara LTTE dengan jaringan terorisme global yang lain. Bab ini terbagi menjadi empat bagian, yang pertama adalah sejarah singkat LTTE, kemudian kejahatan terorganisir yang dilakukan LTTE, aksi terorisme dan keterkaitan LTTE dengan jaringan terorisme lain. Selanjutnya penulis merangkum munculnya ancaman tersebut dalam diagram yang mengacu pada daerah geografis dimana ancaman tersebut muncul, waktu, serta jenis ancamannya.

#### **2.1 Tentang LTTE**

##### ***2.1.1 Sejarah singkat LTTE***

Dibentuk pada tahun 1975, Liberation Tigers of Tamil Eelam atau yang sering kita sebut LTTE bertujuan untuk membentuk negara terpisah dari Sri Lanka. Semenjak kemerdekaan Sri Lanka dari Inggris pada tahun 1948, minoritas etnis Tamil merasa di pinggirkan dan tidak mendapatkan hak politiknya. Pada tahun itu juga, Solomon Bandaranayake, Perdana Menteri pertama Sri Lanka menjadikan bahasa Sinhala yang digunakan sebagian besar warga Sri Lanka sebagai bahasa resmi negara tersebut.

Setelah tahun 1948, etnis Tamil juga menjadi target dari berbagai kerusuhan yang melanda Sri Lanka. Dengan anggapan bahwa kerusuhan ini diprovokasi oleh pihak berwenang yang beretnis Sinhala, rakyat Tamil mulai menyuarakan keinginan

untuk membentuk negara terpisah dan sebuah organisasi yang melindungi hak mereka. Dan disinilah LTTE dibentuk, sebuah organisasi yang merupakan salah satu dari berbagai kelompok yang muncul untuk memperjuangkan hak – hak masyarakat Tamil.

Di Sri Lanka sendiri dulunya terdapat berbagai kelompok bersenjata termasuk Tamil Eelam Liberation Organisation (TELO), People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOT), Eelam People's Revolutionary Liberation Front (EPRLF), Eelam Revolutionary Organisation (EROS) dan the Eelam National Democratic Liberation Front (ENDLF). Namun kelompok kelompok ini mulai redup karena dominansi LTTE yang menyerap kader – kader mereka dan membunuh pemimpin – pemimpinnya<sup>43</sup>.

LTTE yang seringkali juga disebut dengan Macan Tamil, dipimpin oleh Vellupiai Prabhakaran dan mulai memperjuangkan negara terpisah dari Sri Lanka Sejak tahun 1983. Serangan pertama yang mereka lancarkan adalah serangan terhadap pasukan pemerintah Sri Lanka, ketika kemudian menyusul rangkaian kerusuhan anti Tamil yang menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Secara keseluruhan diperkirakan ada 75.000 orang terbunuh dalam aksi kekerasan ini.

Inti dari kekerasan ini adalah dipertanyakannya hak politik Minoritas Tamil. Etnis Tamil berjumlah sekitar 3,2 juta jiwa di Sri Lanka sendiri dan memiliki jaringan erat ke komunitas Tamil yang lebih besar di India selatan. Banyak dari etnis Tamil di Sri Lanka yang mengatakan bahwa mereka di diskriminasikan dalam mencari pekerjaan dibandingkan Etnis Budha mayoritas Sinhala, yang membentuk  $\frac{3}{4}$  dari populasi Sri Lanka. Karena terbatasnya kesempatan yang ada bagi para masyarakat Tamil di Sri Lanka, mereka menyebar keseluruh dunia untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, bagi diri mereka sendiri, maupun bagi keluarga. Sehingga, saat ini masyarakat Tamil mengakui ada saudara mereka yang berjumlah

---

<sup>43</sup> Di rangkum dari AL-Jazeera, seperti tertera di <http://www.aljazeera.com/focus/2008/11/2008112019115851343.html>, di akses pada 19 – 05 – 2012, 09:00 WIB.

lebih dari 70 juta jiwa, yang tersebar di Amerika, benua Eropa, Canada, dsb. Dan persebaran inilah yang menjadi sumber pendanaan dan dukungan Luar negeri bagi operasi Organisasi Tamil di dalam negeri. Meskipun tujuannya adalah insurgensi dan bersifat domestik, Tamil Eelam terbukti mampu bernegosiasi dengan pemerintah Inggris untuk mendapatkan simpati, dan bahkan salah satu pemimpinnya di New York mampu memberikan dukungan hukum. Sayangnya, persebaran ini juga diduga menjalankan berbagai jenis kejahatan terencana seperti penyelundupan warga negara gelap, perdagangan senjata, dan jual beli obat – obatan terlarang.

Macan Tamil telah memperjuangkan berdirinya negara Tamil dari generasi ke generasi. Dan pemerintah Sri Lanka berusaha untuk menghentikannya. Dari cara perjuangan mereka, macan Tamil dianggap sebagai teroris yang paling maju dan paling kejam didunia. Para pelaku bom bunuh diri mereka menggunakan rompi yang dijahit khusus, dan berada diantara jajaran pelaku bom bunuh diri yang paling mematikan. Kader – kader yang mereka didik, termasuk anak laki – laki, dan para perempuan memiliki kedisiplinan tinggi sehingga bahkan ketika mereka tertangkap, mereka bersumpah untuk melakukan bunuh diri menggunakan asam sianida yang melingkar di sekitar leher mereka. Taktik bom bunuh diri sudah digunakan dari awal perjuangan macan Tamil untuk memberikan efek melumpuhkan, dan merupakan taktik yang sempurna untuk kampanye melawan polisi, militer dan menjadikan masyarakat sipil sebagai targetnya. Pusat dari serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Macan Tamil adalah serangan seorang pelaku bom bunuh diri perempuan, yang berhasil membunuh Rajiv Gandhi, perdana menteri India pada tahun 1991. Dua tahun kemudian, seorang pelaku bom bunuh diri lainnya membunuh presiden Sri Lanka, ranasinghe Premadasa.

Berikut kronologi perang sipil di Sri Lanka<sup>44</sup>:

- 1948 – Ceylon memiliki pemerintahan sendiri
- 1956 – Kerusuhan komunal dimulai selama periode dua tahun.

---

<sup>44</sup> Di rangkum dari <http://www.lankalibrary.com/pol/funding%20LTTE.htm>, di akses 19 – 05 – 2012, 09:00 WIB.

- 1971 – Laskar Kemerdekaan Rakyat JVP (Janathā Vimukthi Peramuna) memulai revolusi kekerasan
- 1973 – Nasionalisme Tamil menjadi lebih terlihat. Tanda – tanda awal insurgensi dan pergerakan LTTE. Velupillai Prabhakaran membunuh seorang politisi Tamil. Para penyelundup Tamil membawa senjata ke Sri Lanka.
- 1976 – Insurgensi meningkat, LTTE mendapatkan perannya sebagai organisasi teroris.
- 1977 – Para pejabat Perancis dan Jerman mulai memperhatikan penipuan kesejahteraan dari “pengungsi” Tamil. Mereka menemukan bahwa terdapat dana yang diperoleh dari keuntungan sumbangan mereka, dan disalurkan kepada para insurgen di Sri Lanka.
- 1980 – Rute baru dari perjual belian Heroin di Asia Tengah mulai berkembang, dan para penyelundup Tamil terlibat.
- 1981 – Serangan balik dari etnis Sinhala terhadap terorisme yang mulai berkembang dari LTTE dan kelompok sempalannya.
- 1983 - LTTE mengadopsi taktik gerilya yang kemudian mengakibatkan meningkatnya teror revolusioner dan represi pemerintah – Penyergapan Jaffna, Kerusuhan Juli, dan pembunuhan massal penjara Wlikade.
- 1984 – Angkatan laut Sri Lanka memblokir Jaffna, gerilya LTTE memperluas daerah dibawah kendali mereka. Penangkapan massal penyelundup heroin Tamil di Italia, yang beroperasi atas nama para insurgen. Swiss menemukan 20% dari perdagangan heroin dikendalikan oleh para penyelundup Tamil.
- 1985 - 200 penjual obat-obatan terlarang dari Tamil di tahan diseluruh dunia.
- 1986 – Angkatan udara Sri Lanka meledakkan Jaffna. LTTE mengatur pemboman besar di Kolombo. 155 warga Tamil mendarat di Nova Scotia dari Jerman Barat, operasi lainnya juga terungkap.
- 1987 – Kekerasan parah. Pemerintahan semena – mena dan tidak berhasil mengatasi konflik. India mengirimkan makanan ke Jaffna. Persetujuan perdamaian di tanda tangani pada bulan Juli, pasukan penjaga perdamaian

India mulai di kirim. LTTE memulai operasi melawan pasukan India pada bulan oktober.

- 1988 – Operasi pasukan india masih di jalankan selama perjanjian perdamaian di terapkan. Ditemukan penyelundupan warga Tamil dari Jerman ke Kanada.
- 1989 – Terorisme JVP bangkit melawan perjanjian perdamaian. Pasukan rela mati mulai beroperasi. Pasukan dari India mulai di tarik, dan LTTE menyerang pasukan Tamil yang dibentuk India.
- 1990 – Gempuran pemerintah terhadap terorisme JVP masih di lancarkan, LTTE meliha ditariknya pasukan terakhir india dan menghancurkan pasukan tersebut untuk terakhir kalinya. Kekerasan terjadi dari dua belah pihak.
- 1991 – gencatan senjata singkat, di ikuti oleh pertempuran sengit. India menggempur negara Tamil Nadi. Rajiv Gandhi dibunuh oleh pengebom bunuh diri. Penggalangan dana untuk LTTE meningkat di Kanada, penyelundup heroin Tamil mencoba melarikan diri dengan senjata berat dan helokopter.
- 1992 – Pertempuran berlanjut pemerintah Sri Lanka menyelidiki kelebihan dalam pasukannya. Blokadi masih di jalankan, begitu pula pengepungan Jaffna.
- 1993 – Kegagalan terbesar kesewenang – wenangan pemerintah. LTTE membunuh presiden Premadasa dengan metode Bom bunuh diri lainnya. Penipuan kartu kredit oleh warga Tamil ditemukan di Kanada.
- 1994 – Perjanjian perdamaian dikeluarkan oleh presiden Kumaratunga. Pemerintah persatuan rakyat (People's Alliance) terpilih setelah kekuasaan partai nasional bersatu selama (United National party) 17 tahun. People's Alliance Government elected after 17 years of United National Party Rule. Belanda menemukan penyelundupan warga dan heroin, serta menangkap jaringan pemalsuan paspor.
- 1995 - LTTE memulai lagi serangan bunuh diri di awal tahun. KONflik dimulai lagi, Tentara Sri Lanka memulai serangan jangka panjangnya.

Sebagian Jaffna mulai diambil alih dari LTTE. Pembom bunuh diri di Kolombo, memiliki dokumen dan uang dari Kanada.

### 2.1.2 Perkembangan LTTE saat ini

Setelah pergulatan panjang selama 25 tahun dengan LTTE, pemerintah Sri Lanka secara resmi mengumumkan dikalahkannya LTTE pada tanggal 19 Mei 2009. Hal ini ditandai dengan terbunuhnya Vellupiai Prabhakaran, pemimpin tertinggi LTTE. Pernyataan ini dikeluarkan sendiri oleh presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa yang menyatakan bahwa Sri Lanka telah ‘dibebaskan’ dari terorisme, dan untuk pertama kalinya Sri Lanka bersatu dalam Pemerintahan yang terpilih<sup>45</sup>. Di saat yang sama juga dilaporkan terbunuh adalah Ketua Intelijen dari Macan Tamil, Pottu Amman dan Soosai, kepala sayap “Macan Laut”<sup>46</sup>.

Dengan dibunuhnya pemimpin Tamil Eelam dan dengan adanya negosiasi serta usaha dalam menyatukan seluruh rakyat Sri Lanka ternyata belum mampu menyelesaikan perpecahan yang ada. Agenda pemerintah belum kesempatan yang sama bagi rakyat Tamil, namun lebih cenderung mengingkari konflik etnis yang sudah terjadi serta serangkaian pelanggaran HAM di dalamnya. Masyarakat Tamil yang tersisa dan tertinggal di Sri Lanka menghadapi kebingungan karena disatu sisi mereka tidak dapat berjuang lagi, dan disisi lain pemerintah belum juga memberikan hak yang harusnya mereka dapatkan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Dua tahun paska dibunuhnya pemimpin LTTE, Sri Lanka dinilai jauh dari rekonsiliasi dan hal ini diprediksi akan sulit dilakukan. Dalam sebuah laporannya, ICG<sup>47</sup> melaksanakan penilaian terhadap akuntabilitas pelaksanaan rekonsiliasi oleh Pemerintah Sri Lanka. Meski terlihat berhasil, “perang terhadap teror’ yang dilakukan Sri Lanka, dalam masa pemerintahan Mahinda Rajapaksa menolak mengakui bahwa

---

<sup>45</sup> Di kutip dari <http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/18/Tamil-tigers-killed-sri-lanka>, di akses pada 01 – 09 – 2012, 21:00 WIB.

<sup>46</sup> Lanka library, *Op. Cit.*

<sup>47</sup> *Reconciliation in Sri Lanka: Harder than Ever* ; Crisis Group Asian Report N 209, 2011.

keluhan rakyat minoritas Tamil terhadap pemerintahannya dapat dinilai sah mengingat ketidaksetaraan dan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat Tamil, dan hal ini ditentang oleh berbagai negara. Rezim pemerintahan Rajapaksa menghancurkan macan Tamil dengan menolak berbagai pendekatan damai dari pemerintah sebelumnya dan mengadopsi kebrutalan dan intoleransi insugensi. Sekarang bertentangan dengan citra yang disampaikan, pemerintah tidak melibatkan rakyat minoritas Tamil dalam pembuatan keputusan terkait dengan masa depan ekonomi dan politik mereka, hal ini semakin menjauhkan rekonsiliasi dari Sri Lanka, karena kekuatan dan kekayaan terkonsentrasi di Keluarga Rajapaksa dan menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib para warga Tamil di Sri Lanka, dan tercermin dari sikap presiden yang mengabaikan nasib dan masa depan mereka.

Kebijakan pemerintah Sri Lanka dinilai tidak meringankan derita rakyat Tamil, namun semakin memperparahnya. Hampir tidak ada perkembangan dalam merekonstruksi institusi demokratisnya yang kacau balau, atau menciptakan kondisi yang lebih stabil. Meskipun LTTE telah dinyatakan kalah dan sudah tidak memegang kendali dalam kehidupan politik, kemenangan pemerintah Sri Lanka terhadap Tamil akan masih menyisakan kerapuhan, kecuali partai politik yang didominasi oleh etnis Sinhala membuat gerakan yang mengarah kepada demokrasi. Munculnya Sarath Fonseka untuk menantang Rajapaksa pada tanggal 26 January 2010, membuka kesempatan bagi rakyat Tamil untuk menentang kebijakan pemerintah yang represif. Akan tetapi, tidak ada niat yang patut dihargai untuk menjalankan reformasi politik yang akan mengakhiri marginalisasi terhadap rakyat Tamil dan minoritas lainnya. Dalam salah satu laporannya, ICG menyebut keadaan ini sebagai ‘kedamaian pahit’<sup>48</sup>.

## **2.2 Kejahatan terencana oleh LTTE**

Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa secara internasional, LTTE bekerja pada tiga tingkatan yang berbeda, yaitu propaganda dan publikasi,

---

<sup>48</sup> *Sri Lanka: A Bitter Peace*, Crisis Group Asian Report N 99, Januari 2010.

pemerolehan senjata, dan pengumpulan dana<sup>49</sup>. Penulis menemukan empat indikator yang terkait dengan dua tingkatan terakhir yaitu pemerolehan senjata dan pengumpulan dana. Indikator tersebut mencakup perdagangan senjata, perdagangan obat – obatan terlarang, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

### 2.2.1 Perdagangan senjata

Salah satu operasi internasional LTTE adalah penyelundupan senjata, bahan peledak dan dwi fungsi teknologi agar mampu mengikuti perkembangan operasi militer. Bagian yang membawahi operasi ini dinamai “KP Branch” atau cabang KB, yang diambil dari sigkatan nama pemimpin operasi tertingginya, Kumaran Padmanathan. Para pekerja dalam cabang ini berada diluar arena sayap tempur LTTE, karena identitas semua pejuang dalam sayap tempur LTTE terekam dan tersedia dalam RAW (Research and Analysis Wing); agen penegakan hukum dan kontra intelijen India yang membantu memberikan pelatihan bagi kader macan Tamil pada awal tahun 1980.

Cabang KP beroperasi dengan sangat rahasia, dengan menggunakan koneksi seminimum mungkin dengan bagian lain LTTE untuk menjaga keamanan operasinya. Kemudian pada akhirnya, pengiriman senjata diserahkan kepada tim yang sangat terpercaya dibawah Macan laut (Sea Tiger) untuk dikirimkan ke daerah – daerah yang didominasi LTTE waktu itu.

Untuk melaksanakan aktifitas penyelundupan senjata secara Internasional, LTTE mengoperasikan sendiri sebuah armada kapal. Kapal – Kapal ini hanya beroperasi dalam periode waktu tertentu untuk LTTE, sementara mereka mengangkut barang – barang yang sah secara hukum dan mengumpulkan dana untuk membeli senjata. LTTE pada mulanya memulai operasi ini dengan basis di Myanmar, akan

---

<sup>49</sup> Whittaker, *Op. Cit.*



tetapi mereka dipaksa meninggalkan Myanmar karena tekanan diplomatik. Untuk mengatasi hal ini, mereka kemudian membuat basis baru di pulau Phuket, Thailand<sup>50</sup>.

Salah satu contoh dari usaha pemerolehan persenjataan dan amunisi oleh LTTE adalah ketika dilaporkan LTTE mencari bantuan dari Tamil Nadu pada tahun 1983. Yang kemudian diikuti oleh terbunuhnya Rajiv Gandhi, Perdana Menteri India waktu itu. Hal ini membuat LTTE meninggalkan aktivitasnya di Tamil Nadu dan memulai membentuk basis di negara-negara Asia Tenggara dan melancarkan operasinya di Timur Tengah, negara-negara yang baru berdiri di Uni Soviet dan negara barat lainnya.

Penelusuran terkait dengan bahan peledak dan perlengkapan yang digunakan dalam pemboman Central Bank pada tahun 1996, yang menyebabkan terbunuhnya 100 orang dan melukai setidaknya 1400 lainnya bisa memberikan banyak pelajaran. Uang yang digunakan dalam tindakan ini didapatkan dari diaspora di Kanada, dan kemudian dananya melalui pencucian uang oleh warga Kanada yang berasal dari Sri Lanka, pembayaran dilakukan melalui Eropa dan 10 ton RDX dan 50 ton TNT di impor dari Ukraina, dikirimkan melalui pelabuhan laut hitam Nicolaev, dan pembayaran akhir dilakukan melalui sebuah bank di Singapura<sup>51</sup>.

Berbagai pemberitaan mengenai kegiatan penyelundupan senjata LTTE sudah muncul dari awal 1990an. Pada tahun 1998, salah satu *The New York Times* menyebut bahwa Tamil gerilya Tamil sangat mematikan dan dipersenjatai lengkap<sup>52</sup>. Dan pada tahun berikutnya diberitakan bahwa Kamboja bersedia membantu menghentikan pengiriman senjata LTTE. Hal ini berkelanjutan sampai pertengahan tahun 2000, dan gerakan penyelundupan persenjataan Tamil terdeteksi di berbagai negara seperti Australia, Thailand, Malaysia dan Singapura<sup>53</sup>. Dan yang paling mengejutkan adalah

<sup>50</sup> Seperti yang tertera di <http://www.defence.lk/pps/LTTEinbrief.pdf>. Di akses pada 20-03-2012; 22:00 WIB.

<sup>51</sup> Seperti yang tertera di [http://www.priu.gov.lk/ltte\\_report/chapter4.html](http://www.priu.gov.lk/ltte_report/chapter4.html). Di akses pada 20-03-2012; 22:00 WIB.

<sup>52</sup> *The New York Times*, 7 Maret 1998.

<sup>53</sup> LTTE Shopping for Arms in South East Asia, *Asian Tribune*, 7 Maret 2005.

ditemukannya Kapal My Princess Chrisanta, yang digunakan oleh LTTE dalam menyelundupkan senjata dan manusia pada tanggal 21 Desember 2009<sup>54</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan setelah terbunuhnya pemimpin LTTE, aktivitas kejahatan terencana LTTE masih berjalan.

### 2.2.2 Perdagangan obat – obatan terlarang

Sejumlah organisasi dan agen interlijen internasional menyatakan kecurigaannya akan keterlibatan LTTE dalam perdagangan obat – obat terlarang, dan sejarah keterlibatannya sejak tahun 1970 ketika para penyelundup Tamil (sebuah kelompok dimana LTTE dan letnan utamanya berasal) mulai membawa heroin dari India ke Sri Lanka.

Ketika rute tradisional yang digunakan oleh penyelundup opium dan heroin dari Afghanistan dan Pakistan terganggu karena invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 dan karena revolusi fundamentalis di Iran, para macan Tamil segera menyediakan sebuah cara untuk membawa barang mereka ke pasar obat – obatan terlarang lainnya di Dunia.

Selain itu, para Tamil juga mulai menjual obat – obatan terlarang di Eropa barat pada tahun 1984 dan kegiatan penyelundupan heroin lainnya telah dilaporkan di berbagai negara termasuk Italia, Swiss, Polandia, dan Perancis. Salah satu anggota LTTE yang dipenjarakan di Perancis selama dua tahun karena penyelundupan heroin kemudian menjadi salah satu ketua operasi internasional mereka.

Pada akhir tahun 1990 ketika volume heroin dari Asia Tenggara mulai meningkat, Macan Tamil kemudian menggunakannya sebagai sumber kegiatannya juga. LTTE membentuk angkatan laut untuk mereka jadikan markas di pulau Twante Burma, yang merupakan salah satu sumber terbesar heroin dunia. Dan kemudian

---

<sup>54</sup> Seperti yang tertera di <http://www.marinebuzz.com/2009/12/22/sri-lanka-takes-over-ltte-arms-ship-mv-princess-chrisanta/>. Di akses pada 20-03-2012; 22:00 WIB.

menggunakan kapal dagang mereka sendiri untuk menyelundupkan heroin ke Eropa<sup>55</sup>.

### 2.2.3 Perdagangan manusia

Gerakan penyelundupan warga Tamil ke negara Barat dijalankan dibawah organisasi LTTE, dan LTTE mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan menyelundupkan warga Tamil, sebagai contog ke Kanada. Jika seorang warga Tamil ingin diselundupkan secara illegal ke Kanada, biayanya berkisar antara 10.000 USD dan 40.000 USD, sedangkan biaya normalnya sekitar 20.000 – 25.000 USD. Dan warga yang ingin meninggalkan Sri Lanka melalui daerah yang di kendalikan oleh LTTE akan dikenai biaya beberapa dolar untuk ‘visa keluar’. Selain itu, mereka yang memiliki keahlian khusus atau kekayaan lebih dibandingkan warga Tamil biasa akan dikenakan biaya ratusan dolar jika ingin meninggalkan Sri Lanka melalui daerah ini.

## 2.3 Gerakan terorisme oleh LTTE

LTTE telah dimasukkan dalam daftar kelompok organisasi teroris oleh berbagai negara dan badan internasional. Hal ini dikarenakan LTTE menjadikan warga sipil sebagai target, menggunakan merekrut tentara anak – anak, bertanggung jawab atas terbunuhnya berbagai aktor politik dan para anggota non militer lainnya, serta secara ekstensive menggunakan taktik bom bunuh diri baik di Sri Lanka maupun di luarnegeri<sup>56</sup>.

LTTE disebut sebagai kelompok teroris yang cukup mencuat<sup>57</sup>. Pertama kali muncul pada tahun 1970, LTTE telah menjadi salah satu kelompok teroris terdepan. Dengan mengikuti model klasik dari pergerakan ‘kemerdekaan nasional’ yang ada pada waktu itu, kelompok ini meningkatkan aktifitasnya pada awal tahun 1980, untuk

---

<sup>55</sup> Whittaker, *Op. Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Seperti yang tertera di <http://www.mackenzieinstitute.com/2009/BN25-2009apr%20The%20Liberation%20Tigers%20of%20Tamil%20Eelam.html>, di akses pada 20-03-2012; 22:00 WIB.

menciptakan serangan gerilya, dan menimbulkan perang sipil yang berlangsung cukup lama.

LTTE patut dipertimbangkan sebagai organisasi teroris karena beberapa alasan:

- a. Sejarah taktik dan teknik yang inovatif. LTTE merupakan pengguna taktik bom bunuh diri yang paling produktif (sampai dikalahkan oleh kelompok palestina pada tahun 2000 – 2004 selama pergerakan intifada yang kedua), LTTE juga mempelopori penggunaan bom sabuk bunuh diri, mengenalkan berbagai taktik baru termasuk penggunaan pesawat layang dan pesawat ultra ringan, pasukan katak, improvisasi angkatan militer dan lain lainnya.
- b. Penggunaan masyarakat imigran yang cukup unik untuk mendukung alasan perjuangan mereka. Penggunaan masyarakat imigran untuk mendukung berbagai konflik tanah air, bukanlah hal baru, namun LTTE memiliki cara yang unik dalam memfasilitasi persebaran masyarakat etnis Tamil Sri Lanka di negara – negara barat demokratis. Ratusan ribu etnis Tamil mampu melakukan transisi dari imigran baru yang miskin menjadi warga negara yang makmur, mereka dikendalikan sampai pada tahap yang belum mereka lihat sebelumnya, dan secara sistemis diperas untuk berkontribusi dan mengukung usaha perang LTTE. Organisasi persebaran masyarakat Tamil yang melawan pandangan macan Tamil, tidak bertahan lama.
- c. Penggunaan tindakan kriminal terorganisir canggih secara cepat. Ada sejarah panjang dari pergerakan insurgen yang menjadi kelompok tindakan kriminal untuk memenuhi pengeluaran dan pembayaran mereka, hal ini biasanya merupakan proses bertahap. Ketika para macan Tamil membantu membentuk persebaran etnis Tamil Sri Lanka di seluruh dunia, mereka juga menggunakan persebaran itu untuk menjadi dasar untuk membantu menyebarkan jaringan internasional penyelundup dan penjual narkoba. Sebagian besar imigran Tamil taat hukum dan hanya memiliki

sedikit toleransi terhadap tindakan kegiatan kriminal dari masyarakat mereka sendiri. Namun kecepatan terbentuknya jaringan kriminal terorganisir macam Tamil pada tahun 1980 dan awal 1990 sangat mencengangkan.

- d. Harmonisasi yang erat antara segala aspek pergerakan. Hanya sedikit kelompok teroris bertindak dengan isolasi. Sebagian besar dari mereka memiliki sedikit gerakan politik, pengaturan logistic, mekanisme mengumpulkan uang melalui tindakan kriminal maupun cara yang sah. Sedangkan bagi LTTE, sejak tahun 1980, berbagai macam gerakan politik, pembelian senjata dan perlengkapan, organisasi penggalangan dana, dan berbagai usaha kriminal selalu berjalan secara erat di saat yang bersamaan.

### 2.3.1 Terorisme lintas negara

Secara internasional, LTTE bekerja pada tiga tingkatan yang berbeda, yaitu propaganda dan publikasi, pemerolehan senjata, dan pengumpulan dana. Berbagai negara juga telah menyatakan kekhawatiran mereka terhadap gerakan terorisme LTTE<sup>58</sup>. Pergerakan LTTE terdeteksi di berbagai negara dan Departemen luar negeri Sri Lanka sendiri pada tahun 2007 mengidentifikasi gerakan macam Tamil yang berbasis negara, tersebar di Australia, Kanada, Asia, Eropa, India, kepulauan Maldiva, Timur Tengah, Afrika selatan, serta Amerika. Berikut ini merupakan persebaran LTTE yang didokumentasikan dari berbagai macam publikasi dan dokumen resmi;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*



*Gambar 2.1 Transnasionalitas serangan dan jaringan LTTE*

### 2.3.2 Terorisme maritim

LTTE dilaporkan telah membajak kapal dan perahu hampir dari segala ukuran dan kemudian menculik dan membunuh kru serta anggota di dalamnya. Daftar kapal yang telah di bajak LTTE diluar Sri Lanka termasuk Irish Mona (Agustus 1995), Princess Wave (Agustus 1996), Athena (Mei 1997), Misen (Juli 1997), Morong Bong (Juli 1997), MV Cordiality (September 1997), Princess Kash (Agustus 1998) dan MV Farah III (2007). Ketika LTTE menangkap MC Cordiality di dekat pelabuhan Trincomalee, mereka juga membunuh kelima awak kapal yang berkebangsaan Cina. Sedangkan MV Sik Yang, kapal kargo dengan berat 1,818 ton dengan bendera Malaysia yang berlayar dari Tuticorin, India pada tanggal 25 Mei 1999, dilaporkan hilang di perairan dekat Sri Lanka. Nasib dari 15 awak kapalnya tidak di ketahui dan diduga kapal ini dibajak LTTE dan kapalnya digunakan sebagai kapal siluman. Sebuah laporan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1999, mengkonfirmasi bahwa kapal tersebut memang dibajak oleh LTTE <sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Whittaker, *Op. Cit.*

Selain dibentuknya angkatan laut yang dikenal sebagai ‘Sea Tiger’ atau macan laut, LTTE adalah satu – satunya organisasi di dunia yang mempertahankan jaringan pengiriman yang menghubungkan timur dan barat baik dengan tujuan komersial atau militer.

Armada laut ini menggunakan bendera dari berbagai negara sehingga mampu menjangkau berbagai negara didunia dan bukan hanya sekedar menyelundupkan senjata dan amunisi ke Sri Lanka akan tetapi juga menyelundupkan obat – obatan terlarang dan manusia. Jalur yang digunakan adalah dari Eropa timur, dan disekitaran Afrika menuju terusan Suez kemudian ke Sri Lanka. Sumber dari persenjataan mereka bervariasi, namun mereka memiliki rute yang pasti digunakan. Dengan keamanan penuh, pada tahun 1983 kapal LTTE terhitung ada sekitar 25 unit yang terdaftar menggunakan nama dan bendera yang berbeda – beda. Selain untuk aktifitas berdagang, kapal ini juga digunakan dalam mengangkut senjata dan amunisi dengan berbagai samara. Dari sinilah LTTE menunjukkan keberadaannya dalam pasar gelap persenjataan.

Ditangkapnya seorang warga Norwegia kelahiran Sri Lanka, Christy Reginald Lawrence di Phuket Thailan yang diiringi penemuan kapal kecil setengah jadi juga meningkatkan kewaspadaan agen intelijen. LTTE juga telah menjalankan 10 serangan bunuh diri terhadap kapal laut Sri Lanka menggunakan bahan peledak. LTTE juga terlibat dalam pembajakan kapal kapal, dengan meneror kapal – kapal berbendera Filipina, Yunani, Indonesia, Panama, Belize, Cina, Yordania, Kamboja, dan India<sup>60</sup>.

### 2.3.3 Terorisme dunia maya

Pola dari terorisme global yang didapatkan pada tahun 1997, LTTE diidentifikasi telah bertanggung jawab akan serangan pertama dari kelompok teroris terhadap sistem komputer sebuah negara ketika pada tahun 1997 mereka menyebut diri sebagai “macan hitam internet” dan mengaku bertanggung jawab atas serangan

<sup>60</sup> www.defense.lk, *Op. Cit.*; seperti yang tertera di [http://www.priu.gov.lk/lte\\_report/chapter4.html](http://www.priu.gov.lk/lte_report/chapter4.html), di akses 02 – 04 – 2012: 20:00 WIB.

yang mengganggu sistem jaringan informasi dan komunikasi yang digunakan oleh misi Sri Lanka. Serangan ini melumpuhkan komunikasi sebagian besar perwakilan Sri Lanka di luar negeri. Pada waktu itu, Amerika mengatakan bahwa hal ini patut diperhatikan karena merupakan serangan pertama dari Organisasi yang dilabeli teroris oleh Amerikan, dan membuka kemungkinan yang lebih buruk. Selanjutnya, R.E Kendall, SekJen Interporl menyatakan pada simposium terorisme internasional ke 14 pada tahun 1999 bahwa LTTE merupakan salah satu organisasi teroris yang memiliki situs yang digunakan bukan hanya untuk propaganda, komunikasi, dan rekrutmen akan tetapi juga untuk penggalangan dana<sup>61</sup>.

#### 2.3.4 Jaringan dengan kelompok teroris lainnya

Sudah lama muncul kecurigaan dari para ahli mengenai keterkaitan LTTE dengan organisasi teroris internasional lainnya seperti Al-Qaeda dan Taliban. Hal ini menjadi semakin jelas seiring dengan diungkapnya kejadian 11 september 2001 oleh Amerika. Para anggota ltte mulai mengadopsi model tradisional dari pergerakan kemerdekaan pada tahun 1970, dan kemudian dengan cepat membangun ikatan dengan jaringan terorisme internasional yang secara tidak langsung didanai oleh Uni Soviet yang ada pada saat itu. Di berbagai kesempatan, jurnal Asia, pewarta investigasi, dan Jane's defense review menghubungkan LTTE kepada;

- a. The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP); para anggota LTTE berada dalam kamp pelatihan mereka di Lebanon selatan di akhir tahun 1970 dan ditemukan hal yang sama setelah tahun 1983.
- b. PLO, organisasi kemerdekaan palestinda, ini terjadi ketika PLO merupakan kelompok teroris di Lebanon. PLO juga diketahui memberikan pelatihan bagi LTTE di India selatan.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*



- c. MILF, The Moro Islamic Liberation Front (MILF); LTTE dilaporkan membantu anggota dari gerakan MILF, yang juga terkait dengan al-Qaeda dari kepulauan Mindanao di Filipina selama tahun 1990an.
- d. Kelompok Abu Sayyaf, penerus MILF dan lebih terikat secara konvensional dengan Al-Qaeda. LTTE juga ditengarai melatih anggota mereka pada tahun 1990.
- e. Jemaah Islamiya: sempalan Al-Qaeda di Indonesia. LTTE diketahui telah membantu melatih anggota JI dalam taktik maritime teroris pada tahun 1990.
- f. Al Qaeda: Selain memberikan pelatihan kepada para anggota organisasi dalam al-Qaeda; LTTE telah membantu anggota al-Qaeda untuk memproses paspor palsu, dan pembelian senjata bersama sebelum serangan 9/11.

Selama beberapa decade terakhir, LTTE sudah berkali kali mempelopori teknik teknik teroris yang dijalankan oleh kelompok teroris lain. Seperti teknik bom sabuk bunuh diri yang digunakan untuk membunuh Perdana Menteri Rajiv Gandhi, penggunaan tangki klorin dalam pemboman kendaraan untuk menimbulkan awan gas yang kemudian diikuti oleh al-Qaeda di Irak.

Usaha usaha kriminal yang terkait dengan anggota LTTE yang sebelumnya diberbagai negara termasuk jual beli manusia, penipuan kartu kredit, pemalsuan, penipuan komersil, pemerasan dan sebagainya. Aktifitas kriminal terorganisir di semua negara barat membutuhkan kerjasama dengan kelompok kriminal lain, dan LTTE telah bekerja sama dengan BBikers, Triad di Cina, Mafia di Rusia and Itali, serta berbagai kelompok selama beberapa tahun <sup>62</sup>.

Beberapa insiden yang mampu membuktikan kecurigaan ini diantaranya;

---

<sup>62</sup> Seperti yang tertera di <http://www.mackenzieinstitute.com/2009/BN25-2009apr%20The%20Liberation%20Tigers%20of%20Tamil%20Eelam.html>. Di akses 02 – 04 – 2012: 20:00 WIB.

- Kesamaan serangan LTTE terhadap armada laut Sri Lanka dengan serangan Al-Qaeda terhadap USS Cole yang membunuh 17 pelaut Amerika.
- Bukti bahwa LTTE menyediakan paspor palsu bagi Ramzi Yousef, pelaku serangan pertama terhadap WTC di New York 1993.
- Penyelundupan senjata oleh LTTE dari Pakistan untuk dibawa ke Filipina.
- Tuduhan kepada LTTE akan pencurian paspor Norwegia dan menjualnya kepada organisasi Al-Qaeda untuk memperoleh pendanaan dalam pembelian senjata.
- Meningkatnya laporan intelijen yang menyatakan bahwa LTTE menyelundupkan senjata ke berbagai organisasi teroris menggunakan jaringan tersembunyi yang mereka miliki, dan temuan dari International Institute for Strategic Studies yang berbasis di London, yang menyatakan bahwa LTTE sedang membangun jaringan komersial dengan Al-Qaeda dan militant lainnya dari Afghanistan.

Ahli terorisme lain, termasuk Glen Jenvey, seorang spesialis dalam terorisme Internasional, juga menyatakan bahwa Al-Qaeda telah mencontoh sebagian besar taktik terornya dari LTTE<sup>63</sup>. Dan kemudian menggarisbawahi bahwa LTTE merupakan sumber dari pola yang dicontoh oleh organisasi seperti Al-Qaeda. Beberapa perbandingan yang ia gunakan untuk mendapatkan kesimpulan ini adalah:

- LTTE menemukan taktik bom bunuh diri modern dan mengembangkannya untuk melawan target politik, militer, dan sipil. Para militant Islam kemudian menggunakan taktik serangan yang sama.
- Serangan LTTE terhadap World Trade Centre di Sri Lanka kemudian diikuti oleh serangan Al-Qaeda di World Trade Center New York.
- LTTE menggunakan perempuan sebagai pelaku serangan teroris, dan kemudian hal ini ditiru oleh Al-Qaeda dan teroris dari Chechnya, sebagai contoh "Black Widows" yang memiliki peran dalam krisis penyanderaan sebuah teater di Moskwa dan menjalankan serangan bunuh diri.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

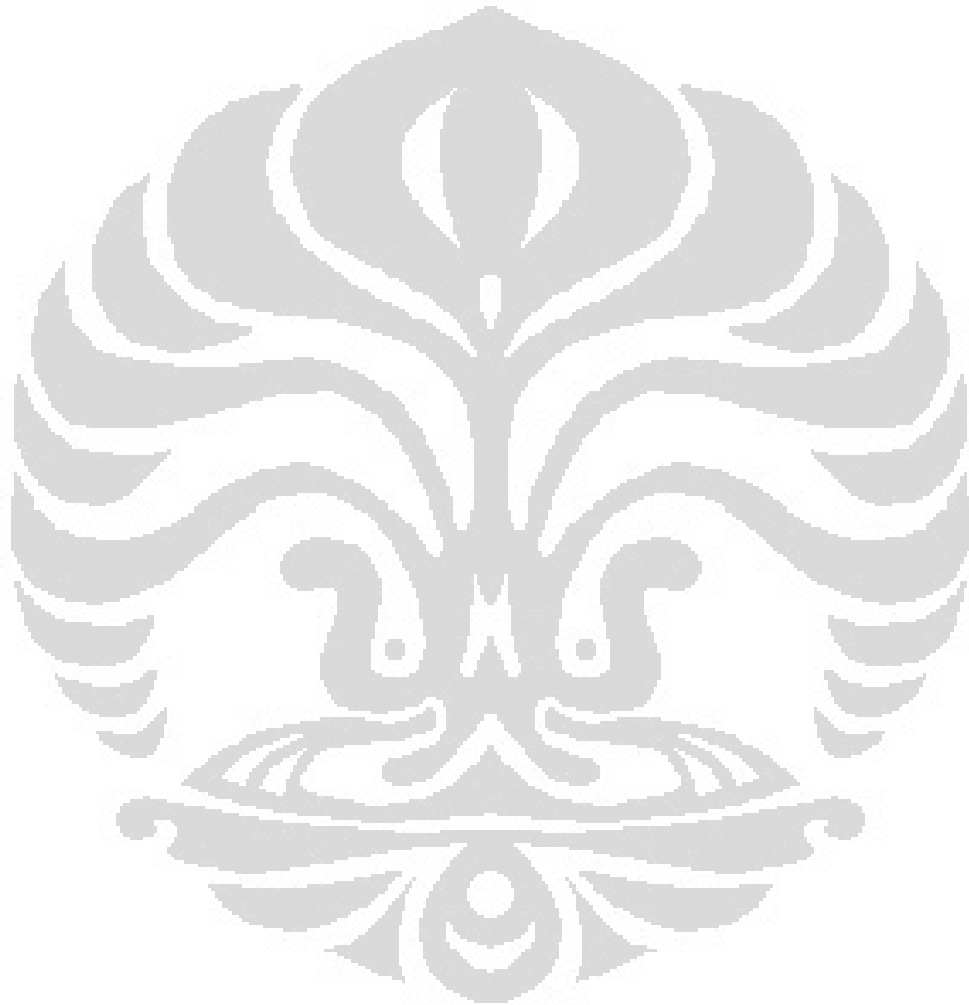
- Serangan kepada warga sipil di bus dan kereta di Sri Lanka sama dengan serangan Al-Qaeda kepada warga sipil melalui transportasi seperti pada pemboman tahun 2005 di London<sup>64</sup>.

Uraian diatas, diperkuat oleh salah satu instruksi dari pemimpin LTTE diluar negeri pada tahun 2003, yang mencakup perintah untuk membentuk dan mengembangkan hubungan dengan ‘gerakan pejuang kemerdekaan’ lainnya. Selain itu ada pula temuan dari penelitian yang sudah dipublikasikan mengenai keterkaitan LTTe dengan berbagai organisasi teroris seperti United Liberation Front of Assam (ULFA), Afghan Mujahidin, Kurdish Workers Party (PKK), Abu Sayaf, Moro National Liberation Front (MNLF)<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Whittaker, *Op. Cit.*

<sup>65</sup> [www.defence.lk](http://www.defence.lk), *Op. Cit.*



## BAB III

### KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL

Untuk membahas transnasionalisasi jaringan terorisme domestik, and mengapa jaringan tersebut menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional, penulis terlebih dahulu membahas definisi terorisme internasional, kejahatan terorganisir internasional, serta kerangka hukumnya agar mampu melihat mengapa LTTE dan jaringan globalnya bisa dikategorikan dalam ancaman terhadap kedamaian dan keamanan masyarakat internasional. Penulis membagi bab ini menjadi 3, yaitu definisi terorisme, definisi kejahatan terorganisir internasional, dan kerangka hukum internasional.

#### 3.1 Terorisme dan terorisme internasional

Dikarenakan berbagai variasi definisi terorisme dan sulitnya menentukan definisi yang tepat bagi terorisme, penulis menggunakan konsep yang diutarakan oleh Whittaker, yaitu dengan membandingkan berbagai definisi dari terorisme, agar memberikan kontribusi dalam bahasan berikutnya. Berikut ini merupakan berbagai definisi terorisme menurut Whittaker<sup>66</sup>:

- a. Penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum untuk melawan orang atau properti tertentu dengan tujuan mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, populasi rakyat sipil, atau bagian darinya, sebagai kelanjutan dari tujuan politik atau sosial (FBI)
- b. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan untuk menanamkan ketakutan, dan dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat demi mencapai tujuan – tujuan yang pada umumnya merupakan tujuan politik, agama atau ideologi (Departemen pertahanan Amerika)
- c. Kekerasan berlandaskan tujuan politik yang sudah direncanakan dan dilaksanakan melawan target nonkombatan oleh kelompok substansial atau

---

<sup>66</sup> Whittaker, *Op. Cit.*

- agen – agen terselubung, dan umumnya ditujukan untuk mempengaruhi khalayak tertentu (Departemen Luar Negeri Amerika).
- d. Penggunaan ancaman, untuk menyokong tindakan dengan landasan politik, agama atau ideologi, yang melibatkan kekerasan serius melawan orang atau properti tertentu (Pemerintah Inggris)
  - e. Kontribusi terhadap penggunaan kekuatan tidak sah untuk mencapai tujuan politik dimana warga yang tidak bersalah menjadi targetnya (Walter Laqueur)
  - f. Sebuah Strategi kekerasan yang dirancang untuk mewujudkan hasil – hasil yang diharapkan dengan menanamkan rasa takut secara luas kepada publik (Walter Reich).
  - g. Penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan yang dirancang untuk membawa perubahan politik (Brian Jenkins)
  - h. Pembunuhan sistematis yang disengaja, yang menyakiti dan membahayakan warga yang tidak bersalah untuk menciptakan rasa takut agar bisa mencapai tujuan politik [...] terorisme [...] kejam secara intrinsik, memang kejam, dan sepenuhnya kejam (Paul Johnson)
  - i. [Terorisme Internasional] adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik ketika (1) tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan kelompok tertentu yang dijadikan target, dan bukannya ditujukan kepada korban langsungnya, dan (2) hasilnya melampaui batas – batas nasional (Peter Sederberg).

Untuk membedakan terorisme dengan jenis kriminal lain, Whittaker menyebutkan beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai acuan, diantaranya adalah bahwa terorisme memiliki karakter seperti<sup>67</sup> :

- a. Selalu memiliki tujuan dan motif politik
- b. Menggunakan kekerasan, atau yang sama pentingnya mengancam akan menggunakan kekerasan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

- c. Di rancang untuk memiliki akibat psikologis yang luas diluar korban atau target langsung
- d. Di laksanakan oleh sebuah organisasi dengan urutan perintah yang bisa diidentifikasi atau struktur sel konspiratif (yang anggotanya tidak menggunakan seragam atau penanda lainnya)
- e. Dijalankan oleh kelompok sub nasional atau entitas non-negara<sup>68</sup>.

Terorisme menyerang nilai yang termuat dalam inti piagam PBB, yaitu menghormati hak asasi manusia, aturan hukum, aturan perang yang melindungi rakyat sipil, toleransi diantara warga dan Negara, serta resolusi damai untuk konflik. Terorisme juga mengembangkan keadaan dengan penuh keputus asaan, penghinaan, penindasan politik, ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks konflik regional dan pendudukan Negara lain; dengan mengambil keuntungan dari Negara lemah yang tidak mampu menegakkan hukum dan tatanan Negara<sup>69</sup>.

Terorisme telah menjadi agenda internasional sejak tahun 1934, ketika Liga Bangsa – Bangsa mulai mencanangkan perlawanan terhadap terorisme dengan membahas sebuah draf konvensi serta hukuman terhadap tindak kejahatan terorise. Meskipun akhirnya konvensi tersebut mulai diadopsi pada tahun 1937, konvensi ini tidak terwujud dalam tindakan<sup>70</sup>.

Paling tidak sudah ada 14 instrumen hukum universal yang dikembangkan oleh masyarakat internasional sejak tahun 1963 serta empat amandemen untuk mencegah tindakan terorisme. Instrumen tersebut dikembangkan dibawah bantuan PBB dan agen khususnya serta Agensi energi atom internasional (International Atomic Energy Agency (IAEA)). Para anggota PBB terbuka untuk berpartisipasi dalam instrument ini. Pada tahun 2005, masyarakat internasional juga melakukan perubahan substantif terhadap tiga dari instrument universal tersebut, untuk secara khusus memperhitungkan ancaman tindakan terorisme. Pada tanggal 8 July di tahun yang sama, beberapa Negara mengadopsi amandemen konvensi perlindungan fisik bahan

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> United Nations, "A more secure world: Our Shared Responsibility", *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, United Nations Department of Public Information, 2004, hal. 47.

<sup>70</sup> Tercantum di <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>, di akses 19 – 04 – 2012: 21:00 WIB.

bahan nuklir, dan pada tanggal 14 oktober, mereka setuju terhadap protocol tahun 2005 mengenai konvensi pemberantasan tindakan pelanggaran hukum melawan keamanan navigasi militer, serta kepada protokol 2005 mengenai pemberantasan tindakan melawan hukum terhadap keamanan platform tetap yang terpasang di landas kontinen.

Berikutnya ditambahkan lagi instrumen pada tahun 2010, yaitu instrumen untuk tindakan melanggar hukum, yang dilakukan terhadap penerbangan sipil internasional serta protocol tambahan untuk tindakan melawan hukum di dalam pesawat terbang. Pakta ini kemudian mengkriminalkan tindakan penggunaan pesawat terbang sebagai senjata, dan penggunaan bahan berbahaya untuk menyerang pesawat terbang atau target lain di darat. Transportasi tidak sah atau penyelundupan bahan biologis, kimia, dan senjata nuklir serta bahan-bahan yang terkait bisa dihukum dalam pakta ini. Kedepannya, pengatur dan perencana serangan terhadap pesawat terbang dan bandara tidak akan memiliki tempat berlindung. Tindakan terhadap maskapai penerbangan juga bisa memicu tanggung jawab pidana.

Sekarang ini, para Negara anggota sedang bernegosiasi untuk menambahkan pakta internasional, yaitu sebuah draf konvensi terorisme internasional yang lebih komprehensif. Konvensi ini akan menggunakan kerangka anti terorisme yang ada sekarang dan membangun prinsip – prinsip kunci yang sudah ada dalam konvensi anti terorisme : pentingnya kriminalisasi tindakan teroris, memmbuatnya bisa diproses secara hukum agar para pelaku bisa di tuntutan dan di ekstradisi; pentingnya menghapus peraturan yang memberi pengecualian terhadap kriminalisasi tersebut, baik secara politik filosofis, ideologi, ras, etnis, agama atau dasar lainnya yang serupa; Seruan untuk Negara anggota untuk mengambil tindakan melawan tindakan terorisme; menekankan pentingnya kerjasama dari para Negara anggota, serta berbagi informasi dan saling menyediakan bantuan sebisa mungkin terkait dengan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan pelaku tindakan terorisme<sup>71</sup>.

Dalam strategi kontra terorisme global PBB, yang diadopsi oleh majelis umum pbb pada bulan September 2006. Negara anggota menggaris bawahi

---

<sup>71</sup> *Ibid.*



pentingnya instrument kontra terorisme yang ada sekarang dengan mempertimbangkan menjadi bagian dari instrument tersebut serta menerapkan ketentuan yang ada sesegera mungkin.

Berikut ini merupakan rangkuman dari 14 instrumen hukum dan amandemen tambahan terkait dengan terorisme:

- a. Konvensi tahun 1963 Convention mengenai tindakan – tindakan lain di pesawat terbang (konvensi maskapai penerbangan)
  - Berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi keselamatan penerbangan
  - Memberikan wewenang kepada kepala penerbangan untuk menerapkan tindakan yang dianggap sesuai, kepada siapapun yang dianggap telah melakukan atau akan melakukan tindakan pelanggaran terkait, dan hal ini dilakukan karena dibutuhkan untuk melindungi keamanan pesawat.
  - Negara anggota harus memproses pelaku dan mengambil kembali dari pemimpin penerbangan, kemudian diberikan kepada pihak yang berwenang memproses secara hukum.
- b. Konvensi tahun 1970 mengenai penyitaan pesawat (konvensi penyitaan pesawat secara tidak sah)
  - Hal ini berlaku bagi siapapun yang berada di pesawat, dan melakukan tindakan melawan hukum berupa pemaksaan, atau penggunaan ancaman, atau segala macam bentuk intimidasi, untuk mengendalikan pesawat, atau berusaha mengendalikan pesawat.
  - Mengharuskan semua pihak yang terikat konvensi ini, untuk membuat pembajakan pesawat bisa dihukum dengan hukuman yang paling berat.
  - Mengharuskan semua pihak yang menahan pelaku untuk mengekstradisi atau menyerahkan kasusnya untuk diadili.
  - Mengharuskan semua pihak untuk saling membantu terkait dengan pemrosesan hukum terhadap tindakan yang dilakukan, sesuai dengan konvensi yang ada.

Protokol tahun 2010, yang merupakan tambahan untuk konvensi mengenai penyitaan atau pembajakan pesawat.

- Memberikan tambahan kepada penyitaan paksa pesawat atau pembajakan dengan memperluas cakupannya kepada berbagai bentuk pembajakan pesawat, termasuk penggunaan teknologi modern
  - Menggabungkan konvensi Beijing terkait dengan ancaman atau konspirasi untuk melakukan tindakan kriminal
- c. Konvensi pemberantasan tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan maskapai penerbangan sipil.
- Pelanggaran ini berlaku bagi siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum, dan secara sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang dalam penerbangan yang sedang berlangsung, jika tindakan tersebut membahayakan keselamatan pesawat; membawa alat peledak dalam pesawat, atau berusaha melakukan tindakan tersebut; atau menjadi kaki tangan dari seseorang yang melakukan atau berusaha melakukan tindakan tersebut.
  - Konvensi ini mengharuskan pihak yang terikat dengan tindakan ini, untuk membuat tuntutan untuk pelaku dengan hukuman yang berat.
  - Mengharuskan pihak yang terikat dalam konvensi ini, dan memiliki tahanan untuk mengekstradisi atau menyerahkan kasus pelaku untuk di tuntut di pengadilan.
- d. Konvensi tahun mengenai pencegahan dan penghukuman tindak kriminal melawan orang-orang yang dilindungi secara internasional (konvensi agen diplomatik)
- Yang di definisikan sebagai ‘orang yang dilindungi secara internasional’ adalah presiden, menteri luar negeri, perwakilan atau staf dari Negara atau organisasi internasional yang terdaftar dalam perlindungan khusus di berbagai Negara serta keluarganya.
  - Mengharuskan pihak yang terikat dalam konvensi ini untuk mengkriminalkan dan menghukum dengan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan” atas pembunuhan internasional, penculikan atau serangan terhadap seseorang atau kebebasan dari orang yang dilindungi

secara internasional, serangan kekerasan terhadap tempat resmi, akomodasi pribadi, atau alat transportasi dari orang tersebut, ancaman untuk melakukan tindakan seperti yang disebutkan diatas, dan tindakan berpartisipasi atau menjadi kaki tangan dari pelaku.

e. Konvensi internasional tahun 1979, mengenai pemberantasan penggunaan sandera (Konvensi sandera)

- Berbunyi “siapa saja yang menangkap atau menahan dan mengancam akan membunuh, melukai, atau akan menahan yang lain untuk memaksa pihak ketiga, seperti sebuah Negara, organisasi internasional, seorang biasa atau seseorang dengan kekuatan hukum, sekelompok orang, untuk melakukan atau tidak melakukan segala tindakan dalam keadaan eksplisit atau implisit agar sandernya dilepaskan, maka pelaku melakukan tindakan penggunaan sandera yang tertera dalam konvensi ini”.

f. Konvensi tahun 1980 mengenai perlindungan fisik bahan nuklir (konvensi bahan nuklir)

- Mengkriminalkan kepemilikan, penggunaan, transfer atau pencurian tidak sah dari bahan – bahan nuklir, dan mengancam menggunakannya untuk menyebabkan kematian, luka parah atau kerusakan property sustansial.

**Amandemen konvensi perlindungan fisik bahan nuklir<sup>72</sup>:**

- Mengikat secara hukum terhadap Negara Negara terkait untuk melindungi fasilitas dan bahan bahan nuklir sebatas penggunaan, penyimpanan dan transportasi domestic, untuk tujuan kedamaian.
- Memberikan kerjasama luas antara dan diantawa Negara Negara terkait mengenai tindakan dalam mencari dan mengembalikan bahan nuklir yang dicuri atau diselundupkan, mengurangi segala macam konsekuensi radiologis atau sabotase, dna mencegah terjadinya pertempuran

g. Protokol tahun 1988 untuk pemberantasan tindakan kekerasan terhadap bandara yang melayani maskapai penerbangan sipil, mendukung konvensi

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

keamanan dan keselamatan maskapai penerbangan sipil (memperluas dan mendukung konvensi montreal mengenai keamanan layanan udara (protocol Bandar udara)

- Mempeluas provisi konvensi montreal (lihat poin 3) untuk mencakup tindakan terorisme terhadap bandara yang melayani penerbangan sipil.

h. Konvensi tahun 1988 mengenai pemberantasan tindakan melawan navigasi maritime (konvensi maritime)

- Membentuk rezim hukum yang bisa diterapkan terhadap tindakan melawan navigasi maritime internasional yang sama dengan rezim yang dibentuk untuk maskapai penerbangan internasional.
- Berlaku kepada perorangan yang melakukan tindakan melanggar hukum dan sengaja menangkap atau mengambil alih sebuah kapal dengan paksaan, ancaman, terhadap awak yang bertugas, dan tindakan tersebut bisa membahayakan navigasi kapal, menempatkan perangkat destruktif atau substansi yang ada di kapal, serta tindakan lain yang mengganggu keamanan kapal.

Protokol tahun 2005, mengenai pemberantasan tindakan membahayakan navigasi maritime.

- Mengkriminalkan penggunaan sebuah kapal untuk melancarkan tindakan terorisme.
- Mengkriminalkan transportasi menggunakan kapal bahan bahan yang diketahui akan digunakan untuk menyebabkan atau ancaman akan menyebabkan, kematian atau luka serius, atau kerusakan yang digunakan untuk melancarkan tindakan terorisme.
- Mengkriminalkan transportasi orang yang telah melakukan tindakan terorisme.
- Mengenalkan prosedur pengaturan pelayaran kapal yang dipercayai telah melakukan tindakan yang melanggar aturan konvensi ini.

i. Protocol tahun 1998, mengenai pemberantasan tindakan yang membahayakan platform tetap yang terletak di landas kontinen (protocol platform tetap)

- Membangun rezim hukum yang bisa diterapkan pada tindakan yang membahayakan platform tetap di landas kontinen, yang sama dengan rezim hukum yang ditetapkan dalam penerbangan internasional.
  - Protocol tahun 2005 merupakan protocol pemberantasan tindakan melawan hukum melawan keselamatan platform tetap yang terletak di landas kontinen
  - Mengadopsi perubahan dari konvensi mengenai tindakan yang membahayakan navigasi maritime dalam konteks platform tetap di landas kontinen
- j. Konvensi tahun 1991, mengenai penandaan peledak/bom plastik untuk mendeteksi (konvensi peledak plastic)
- Dirancang untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan bahan peledak plastic yang tidak bisa ditandai dan tidak bisa di deteksi (di negosiasikan setelah pemboman Pan Am nomor 103 pada tahun 1988)
  - Pihak pihak yang terkait di dalamnya diwajibkan dalam teritori cakupannya untuk memastikan kendali yang efektif terhadap bahan peledak plastic yang ‘tidak ditandai’, seperti bahan yang tidak mengandung unsur yang bisa di deteksi yang tercantum dalam lampiran pakta terkait.
  - Secara umum, setiap pihak harus; mengambil tindakan yang dibutuhkan secara efektif untuk melarang dan mencegah produksi bahan peledak yang tidak ditandai, mencegah pergerakan bahan tersebut keluar dari teritori, menjalankan kendali yang ketat dan efektif terhadap kepemilikan dan perpindahan bahan peledak yang tidak ditandai, yang diproduksi atau di impor sebelum konvensi ini diberlakukan; memastikan bahwa semua stok bahan peledak yang tidak ditandai yang tidak berada di tangan militer atau polisi dihancurkan, dipakai, ditandai, atau di serahkan secara permanen agar tidak efektif selama tiga tahun; dan memastikan penghancuran bahan bahan peledak yang tidak ditandai yang diproduksi

sesegera mungkin setelah tanggal konvensi ini berlaku bagi Negara tersebut.

- k. Konvensi internasional tahun 1997 untuk pemboman teroris (konvensi pemboman teroris)
  - Membentuk resim yurisdiksi universal terhadap penggunaan bahan peledak atau perangkat mematikan lainnya yang melanggar hukum di, kepada, atau melawan berbagai tempat umum yang ditentukan, dengan maksud untuk membunuh atau menyebabkan luka fisik serius, atau untuk menghancurkan tempat – tempat umum tersebut.
- l. Konvensi internasional tahun 1999 untuk pemberantasan pendanaan terorisme (konvensi pendanaan terorisme)
  - Mengharuskan pihak terkait untuk mencegah dan melawan pendanaan terorisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kelompok – kelompok yang mengaku meminta bantuan sumbangan, baik untuk tujuan sosial atau budaya, atau dengan terlibat dalam aktifitas seperti penyelundupan narkoba dan persenjataan.
  - Mengikat Negara – Negara anggota untuk menahan pelaku pendanaan terorisme sesuai dengan hukum kriminal yang berlaku, dan bertanggung jawab baik secara perdata maupun administrative.
  - Menyediakan identifikasi, pembekuan dan penangkapan dana yang dialokasikan untuk aktifitas terorisme, serta memberikan informasi mengenai dana yang hilang kepada Negara lain untuk setiap kasusnya. Kerahasiaan bank tidak lagi cukup untuk membenarkan keengganan bekerjasama.
- m. Konvensi internasional tahun 2005 mengenai pemberantasan tindakan terorisme nuklir (konvensi terorisme nuklir)
  - Mencakup berbagai rangkaian tindakan dan target yang memungkinkan, termasuk sumber tenaga dan reactor nuklir
  - Mencakup ancaman dan usaha ancaman untuk melakukan tindakan kriminal yang disebutkan diatas, atau berpartisipasi sebagai kaki tangan.

- Menetapkan bahwa pelanggar akan di ekstradisi atau dituntut
  - Mendorong Negara Negara terkait untuk bekerjasama mencegah serangan teroris dengan berbagi informasi dan saling membantu terkait penyelidikan dan proses ekstradisi.
  - Menangani keadaan krisis (membantu Negara Negara yang sedang dalam keadaan krisis untuk memecahkan masalahnya) dan menangani situasi paska krisis (menyerahkan bahan bahan nuklir yang sudah diamankan melalui agensi energi atom internasional (IAEA)).
- n. Konvensi tahun 2010 mengenai pemberantasan tindakan melawan hukum yang membahayakan penerbangan sipil internasional (konvensi penerbangan sipil baru)
- Mengkriminalkan tindakan penggunaan pesawat terbang sipil sebagai senjata untuk menyebabkan kematian, luka atau kerusakan
  - Mengkriminalkan tindakan menggunakan pesawat terbang sipil untuk melepaskan senjata biologis, kimia dan nuklir (BCN) atau bahan bahan serupa untuk menyebabkan kematian, luka atau kerusakan, atau tindakan menggunakan bahan bahan tersebut untuk menyerang pesawat terbang sipil.
  - Mengkriminalkan tindakan melawan hukum berupa pemindahan senjata BCN atau bahan bahan terkait lainnya
  - Serangan melalui dunia maya terhadap fasilitas navigasi juga termasuk pelanggaran
  - Ancaman untuk melakukan pelanggaran juga bisa termasuk sebagai pelanggaran, jika ancaman tersebut kredibel
  - Konspirasi untuk melakukan pelanggaran atau yang setara dengan pelanggaran juga bisa dihukum.

### 3.2 Kejahatan terorganisir

Istilah ‘kejahatan terorganisir’ mulai muncul di Chicago pada tahun 1919<sup>73</sup>, dan istilah ini berada dibawah baying baying gang para penjual minuman keras pada waktu itu. Akan tetapi fenomena aktifitas kejahatan terorganisir sudah termanifestasi sebelumnya dan pembentukan istilah ini sudah berkembang pada waktu itu. Tergantung kepada definisi yang digunakan, pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terencana juga selalu ada, namun hanya akhir – akhri ini, Negara – Negara di dunia mulai membandingkan literature yang ada dan berkolaborasi untuk tindakan kolektif. Meskipun perkembangan persetujuan multilateral untuk mengendalikan perdagangan narkoba dimulai seabad yang lalu, dan berbagai instrument internasional untuk menangani pelanggaran – pelanggaran terkait sudah ada selama beberapa waktu, namun baru akhir – akhir ini ada persetujuan mengenai bagaimana kejahatan terorganisir transnasional harus ditangani<sup>74</sup>. Perkembangan skala dan cakupan permasalahan paska berakhirnya perang dingin menyebabkan dibentuknya konvensi PBB melawan kejahatan kriminal teroganisir transnasional. Namun, konvensi tersebut tidak mengandung definisi pasti dari ‘kejahatan kriminal terorganisir transnasional’ atau daftar jenis jenis tindakan kriminal yang bisa termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini bukan masalah besar bagi konvensi tersebut, mengingat tidak ada definisi bersama mengenai kejahatan terorganisir transnasional baik diantara praktisi atau ahli teori. Berbagai jenis tindakan transnasional bisa dilaksanakan secara transnasional dan terorganisir, dan berbagai bentuk baru dari kriminal secara terus menerus muncul seiring perubahan kondisi global dan lokal. Untuk mengaokomodir kerumitan ini, definisi yang pasti tidak ditetapkan. Namun, konvensi mendefinisikan ‘kelompok kejahatan kriminal terorganisir’. Hal ini diperlukan karena konvensi tersebut membutuhkan pihak yang melakukan tindakan serta berpartisipasi dalam kelompok tersebut untuk di

---

<sup>73</sup> K. Von Lampe, “Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the United States of America”, *Forum on Crime and Society*, Vol. 1 No. 2, December 2001, hal. 99-116.

<sup>74</sup> UNODC, di akses dari <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf>, di akses 19 – 04 – 2012: 19:00 WIB.



kriminalkan. Dan tujuan dari konvensi ini adalah untuk ‘mencegah dan melawan kejahatan kriminal terorganisir transnasional, bukan kelompok kriminal terorganisir. Menyerang kelompok pelaku merupakan salah satu dari tujuan akhirnya. Di dalam konvensi tersebut, sebuah kelompok kriminal transnasional adalah:

- Sekelompok orang, terdiri dari tiga atau lebih anggota yang tidak dibentuk secara acak.
- Sudah ada selama kurun waktu tertentu
- Bertindak dengan tujuan melaksanakan paling tidak satu tindakan kriminal dan bisa dituntut hukuman penjara paling tidak empat tahun.
- Untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material.

Kejahatan terorganisir transnasional memfasilitasi sebagian besar ancaman serius terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Korupsi, perdagangan obat – obatan terlarang dan pencucian uang memperparah kelemahan Negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperlemah demokrasi. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang longgar bagi konflik sipil. Kedepannya, kelompok kelompok kriminal internasional dengan kemampuan menyediakan senjata nuklir, radiologi, kimia serta biologis bagi terorisme, dianggap sangat mengkhawatirkan. Semakin meningkatnya perdagangan obat – obatan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya tingkat infeksi HIV/AIDS terutama di Eropa timur dan sebagian Asia. Aktifitas aktifitas kejahatan terorganisir ini sangat mengganggu usaha – usaha membangun perdamaian dan membantu perangkonflik melalui perdagangan komoditas dan senjata yang diperlukan dalam konflik tersebut<sup>75</sup>. Tindakan kejahatan transnasional terorganisir merendahkan pemerintahan yang ada dengan memberdayakan mereka yang beroperasi diluar hukum. Diantara kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam kejahatan kriminal terorganisir adalah <sup>76</sup>:

- Kelompok pengedar narkoba yang menyebarkan kekerasan di amerika tengah, kepulauan Karibia dan Afrika barat.

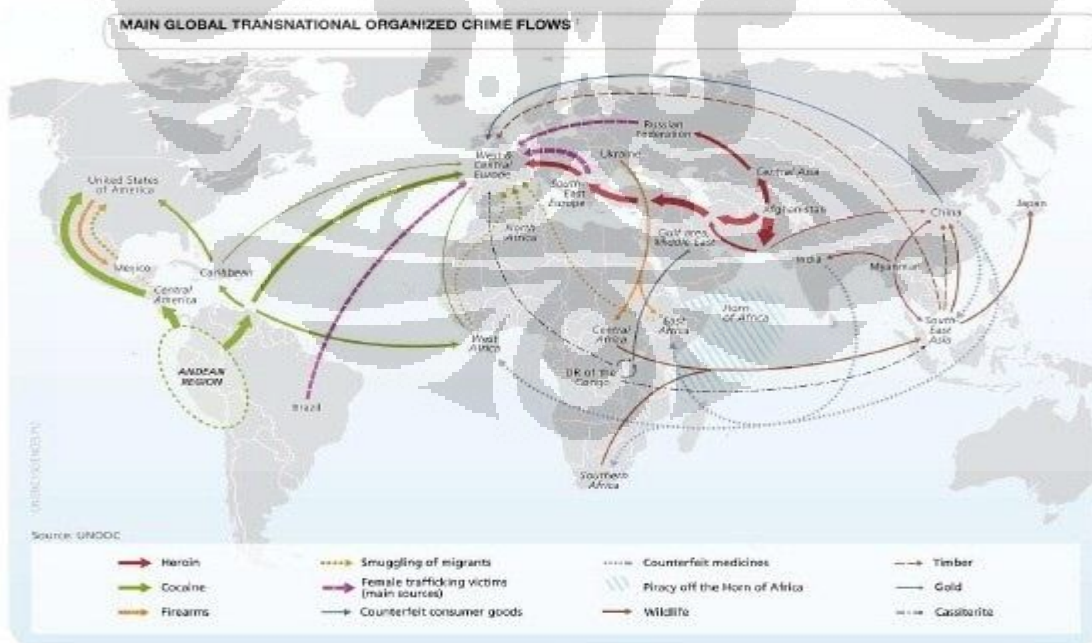
---

<sup>75</sup> United Nations, *Op. Cit.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

- Kolusi antara pelaku insurgensi dan kelompok kriminal (di Africa tengah, sahel dan Asia tenggara) yang mendukung terorisme dan merampas kekayaan alam.
- Penyelundupan warga Negara gelap dan perbudakan modern kini telah menyebar di Eropa, begitu juga Asia Tenggara dan Amerika Latin.
- Di berbagai pusat daerah urban, pihak berwenang sudah kehilangan kendali terhadap Kelompok kejahatan terorganisir
- Tindak kriminal dunia maya mengancam infrastruktur vital dan keamanan Negara, mencuri identitas dan melakukan penipuan; pembajak dari bagian dunia yang paling miskin (ujung tanduk afrika) menahan kapal dan meminta tebusan dari bagian dunia terkaya.
- Barang barang tiruan mempersulit perdagangan yang sah dan membahayakan kehidupan, pencucian uang di dalam yurisdiksi yang tidak bisa dipercaya dan sektor ekonomi yang tidak bisa dikendalikan membuat sektor perbankan lemah diseluruh dunia.

Berikut dibawah ini merupakan alur utama kejahatan terorganisir di seluruh dunia<sup>77</sup>;



<sup>77</sup> *Ibid.*

*Gambar 3.1. Alur utama kejahatan terorganisir di seluruh dunia*

Di Eropa terdapat lebih banyak variasi kebangsaan korban perdagangan manusia jika dibandingkan dengan daerah lain. Setelah peningkatan tajam pada akhir perang dingin perdagangan manusia ke Eropa untuk eksploitasi seksual mulai menjadi stabil, dengan para wanita dengan berbagai kebangsaan sebagai korbannya, menggantikan para wanita dari Eropa timur yang sebelumnya mendominasi pasar ini.

Sedangkan penyelundupan migran, memiliki dua alur yang paling Nampak, yaitu dari para pekerja di Amerika Latin ke Amerika utara dan dari Afrika ke Eropa. Migran yang paling tidak teratur memasuki Amerika Serikat secara terselubung melewati batas barat daya Amerika dan lebih dari 90% darinya di bantu oleh penyelundup profesional skala kecil dalam jumlah yang sangat banyak, akan tetapi hal ini mulai menurun karena krisis keuangan global<sup>78</sup>.

Rute migrasi dari Afrika sub-sahara ke Eropa telah berubah secara dramatis dikarenakan usaha penegakan hukum, jadi pada dasarnya para penyelundup tersebut merupakan pengusaha yang melihat kesempatan. Meskipun jumlah migran yang terdeksi mulai menurun secara drastis akhir – akhir ini, namun terlalu dini untuk menyimpulkan tren jangka panjang dalam migrasi dan penyelundupan manusia<sup>79</sup>.

Sedangkan dalam penyelundupan heroin, 90% dari stok heroin global dating dari opium yang dibudidayakan di Afghanistan, dan sebagian besar dari heroin tersebut dikonsumsi di Eropa, Federasi Rusia dan Negara Negara yang berada dalam jalur untuk menuju tempat tempat tersebut. Rute ke federasi Rusia memanfaatkan jalinan sosial dan etnis yang melewati batas Negara di Negara Negara baru di Asia Tengah, sebagian besar membawa heroin dalam jumlah kecil menggunakan kapal komersil atau kendaraan pribadi. Kebalikannya, alur ke Eropa terlihat lebih terorganisir,

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

dengan pengiriman yang jauh lebih besar melewati lebih banyak batas Negara dan melibatkan kapasitas larangan yang lebih tinggi<sup>80</sup>.

Penyelundupan kokain, dengan pengiriman dalam jumlah besar, terus mengalir dari wilayah Andean ke Amerika Utara (Seringkali lewat Asia tengah) dan Eropa (seringkali lewa Afrika Barat), meski bagian yang diarahkan ke Amerika selatan semakin meningkat.

Konsumsi kokain di Amerika Serikat telah menurun semenjak tahun 1980 dan anjlok sejak tahun 2006. Hal ini dimungkinkan karena usaha penegakan hukum di Amerika latin, namun usaha ini telah meningkatkan kompetisi dan kekerasan diantara para kelompok penyelundup.

Perhatian dan intervensi dunia internasional, dan perubahan politik mulai mengurangi penyelundupan secara substantif melalui Afrika Barat setelah tahun 2007. Permintaan di Eropa menjadi lebih stabil setelah satu decade terakhir.

Dalam dunia perdagangan senjata, para penjual melayani dua pasar utama dari senjata illegal, yaitu mereka yang membutuhkan senjata untuk tujuan kriminal (seperti alur dari Amerika serikat ke Meksiko), dan mereka yang membutuhkan senjata untuk tujuan politis (seperti dari eropa timur ke Afrika). Berbagai jenis senjata dan teknik terlihat dari setiap kasus. Sebagian besar senjata api yang di selundupkan dari Amerika Serikat ke Meksiko didapatkan dari penjual dengan izin sah melalui pembeli penengah dan kemudian di selundupkan melewati batas dengan kumpulan kumpulan kecil yang dibawa oleh kurir dalam jumlah banyak, mengambil manfaat dari tingginya lalu lintas lintas batas Negara. Alur ini terlihat sangat stabil.

Dengan stok persenjataan yang sangat banyak dari era Soviet, beberapa Negara di eropa barat masih rentan terhadap penyelundupan, meskipun usaha pengendalian dan penurunan global dalam konflik global telah mengurangi resiko terjadinya hal ini.

Dalam penyelundupan sumber dari lingkungan, terdapat dua alur yang paling utama yang bisa didokumentasikan, yang pertama adalah penyelundupan satwa liar

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

dari Afrika dan Asia tenggara ke bagian lain dari Asia serta penyelundupan karet ke China dan Eropa.

.Sedangkan perburuan species besar di Afrika mendapatkan perhatian palig besar dan permintaan badak meningkat secara dramatis, konsumsi berbagai macam spesies kecil yang semakin meningkat dari Asia tenggara menimbulkan konsekuensi lingkungan jangka panjang dan membawa lebih banyak uang ke dalam lingkaran kejahatan terorganisir.

Tindakan telah diambil untuk mencegah impor illegal dari kayu yang dipanen, akan tetapi korupsi dan ‘pencucian kayu’ di Negara ketiga membuat usaha – usaha ini tidak berjalan, bahkan membuat permintaan semakin tinggi.

Pemalsuan produk dan *outsourcing* produk ke Asia telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, akan tetapi juga membawa kesempatan untuk pemalsuan berbagai jenis macam produk. Hal ini bisa dilihat dari barang – barang palsu yang dikirim ke Eropa dan pemalsuan obat – obatan ke Asia tenggara dan Afrika. Alur pemalsuan barang ke Eropa, meskipun terhitung kecil jika dibandingkan dengan alur masuknya barang barang secara sah, menunjukkan peningkatan secara dramatis di beberapa tahun terakhir, dan kurangnya akuntabilitas barang barang ini menimbulkan masalah keamanan publik yang cukup serius. Penyelundupan obat – obatan medis adalah kejahatan kriminal yang cukup menjanjikan, meulai muncul ketika kapasitas peraturan terlihat lemah, bukan ketika keuntungan terlihat banyak. Karena banyak dari produk produk obat tersebut adalah versi cair dari produk asli, yang mampu menyebabkan evolusi ketegangan resistan terhadap obat dan pathogen mematikan.

Di sisi lain, pembajakan maritim, perampokan tradisional di laut tinggi telah berubah menjadi penculikan untuk tebusan, seperti para pembajak Somalia, biasanya di tujukan kepada kapal industry, dan mereka melihat target yang semakin meningkat di dalam perairan nasional mereka.

Dalam tindakan kriminal dunia maya, internet telah memberikan jalan bagi tindakan kriminal jenis ini, seperti pencurian identitas, dan penyelundupan transnasional, seperti perdagangan dalam pronografi anak, yang sudah mulai

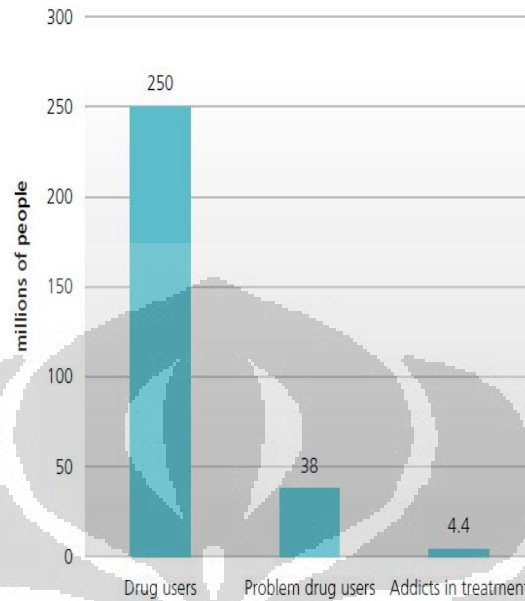
memiliki cakupan yang semakin luas. Pencurian identitas online masih tidak begitu umum dalam kejahatan kriminal dunia maya, namun potensinya sangat besar dan menjadi salah satu tindakan kriminal yang paling berkembang di Amerika Serikat, baik dalam hal korban maupun pelaku.

Produksi dan distribusi pornografi anak dulunya berbahaya dan tidak efisien, namun ada resiko bahwa internet meningkatkan permintaan sampai pada tahap kelompok dengan berbagai jenis tindakan kriminal mulai menjadikan anak-anak untuk mencari keundungan. Sampai saat ini, resiko ini belum terlihat nyata, namun distribusi, dan berbagai bahan pornografi anak diantara kalangan pertemanan mulai meningkat dalam basis non komersil.

Tindakan kejahatan terorganisir mampu memberikan dampak kepada stabilitas politik di negara-negara rentan, termasuk Negara dimana insurgensi sedang terjadi dan kelompok bersenjata ilegal didanai dari penyelundupan senjata di Wilayah Asia Tengah dan Selatan, serta Afrika Tengah), dan di Negara-Negara dimana kekerasan dan korupsi menimbulkan masalah serius bagi proses penegakan hukum (Afrika Barat dan Mesoamerika).

Kelompok pelaku tindak kejahatan kriminal terorganisir memang bisa menjadi masalah sendiri, namun memberantas kelompok-kelompok ini sepertinya tidak menghentikan arus tindak kriminal. Usaha-usaha di tingkat nasional; telah berhasil mengalihkan produksi atau penyelundupan ke Negara lain, akan tetapi selama masih ada permintaan, maka penegakan hukum nasional saja tidaklah cukup. Namun, strategi global yang melibatkan berbagai aktor publik maupun swasta, dibutuhkan untuk menangani penyelundupan global. Dalam berbagai kasus, hal ini bisa berarti menjalankan pengatur alur komersil internasional yang telah bertumbuh lebih cepat daripada kemampuan kolektif kita untuk mengaturnya.

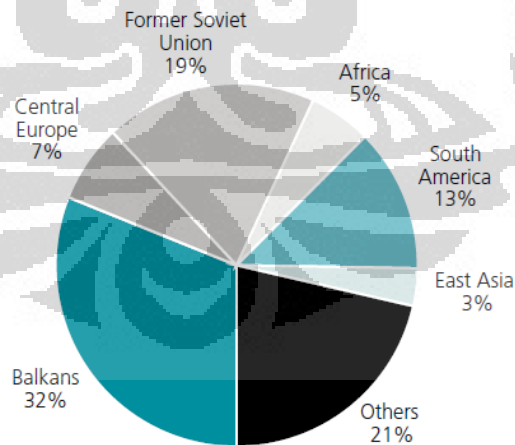
**FIG. 25:** SIZE OF GLOBAL DRUG-USING POPULATIONS, 2007



Source: *World Drug Report*

*Gambar 3.2. Populasi pengguna narkoba.*<sup>81</sup>

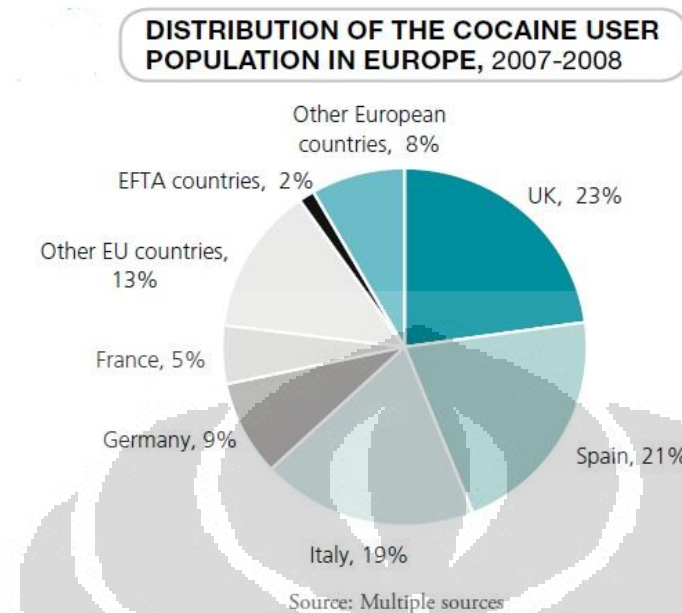
**ORIGINS OF TRAFFICKING VICTIMS DETECTED IN WEST AND CENTRAL EUROPE, 2005-2006**



Source: Elaboration of UNODC-UN.GIFT data

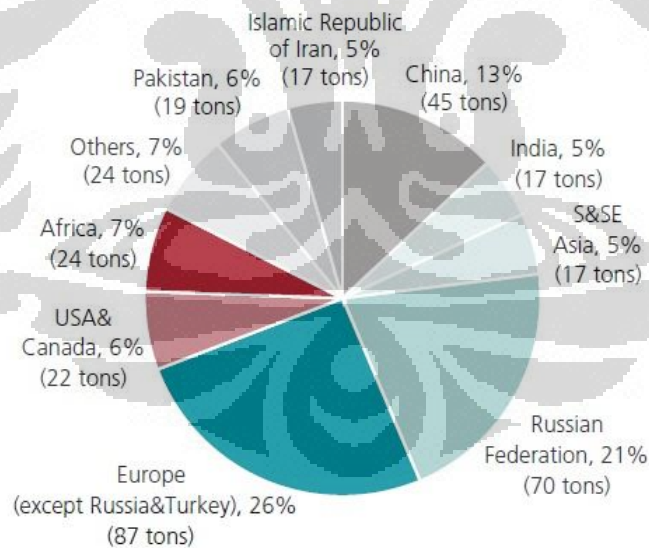
*Gambar 3.3. Asal korban perdagangan manusia di Eropa barat dan timur.*<sup>82</sup>

<sup>81</sup> UNODC, *Op. Cit.*



Gambar 3.4. Distribusi pengguna kokain di Eropa 2007 – 2008.<sup>83</sup>

**GLOBAL HEROIN CONSUMPTION (340 TONS), 2008  
(SHARE OF COUNTRIES/REGIONS)**

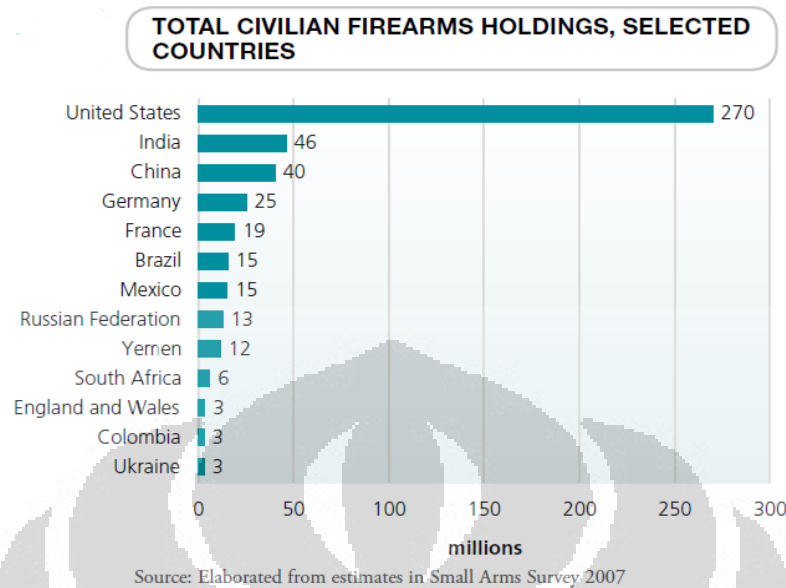


Gambar 3.5. Konsumsi heroin global 2008.<sup>84</sup>

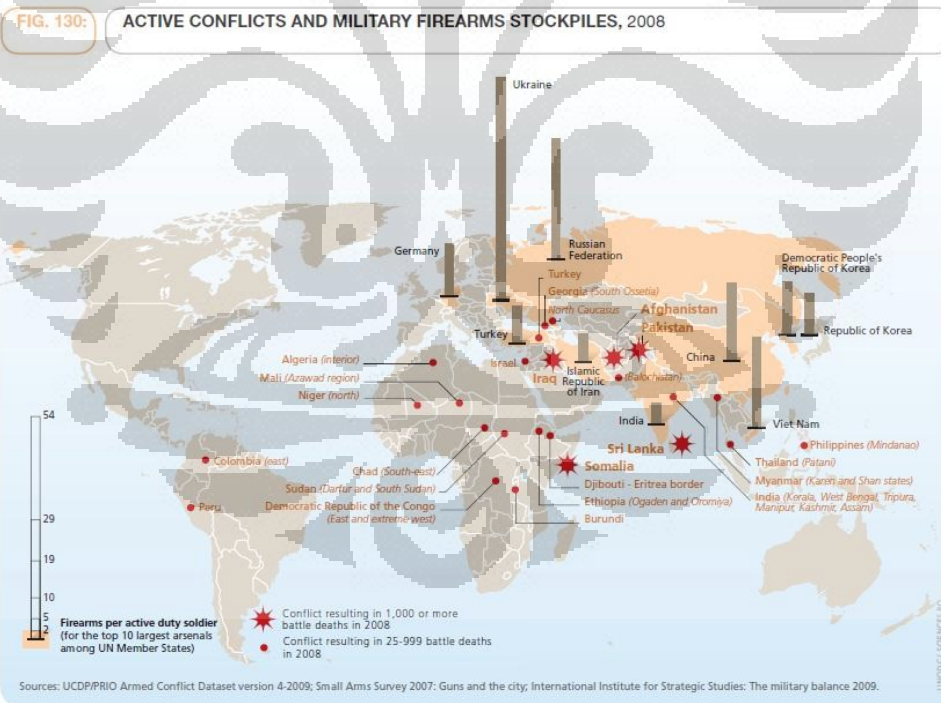
<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*





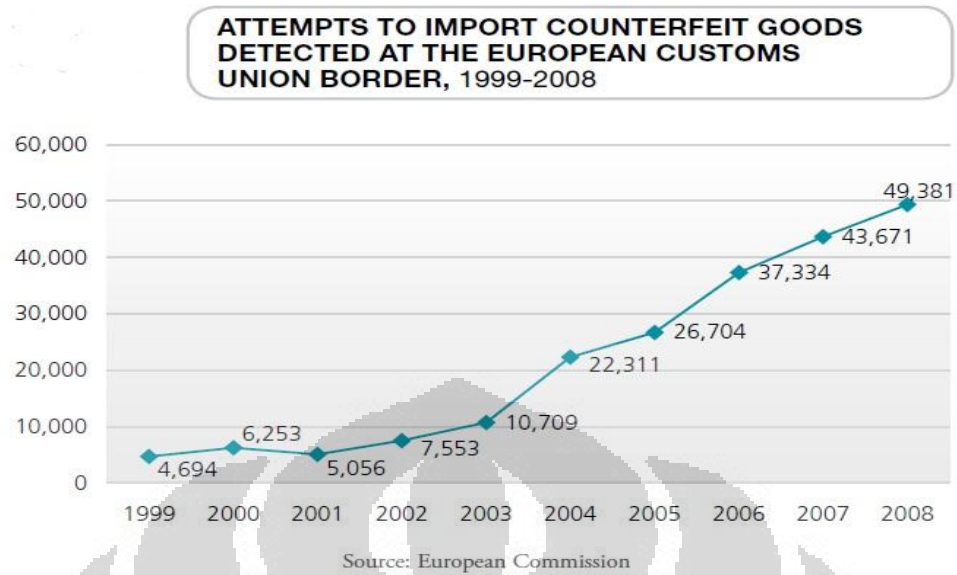
Gambar 3.6. Total rakyat sipil yang membawa senjata<sup>85</sup>



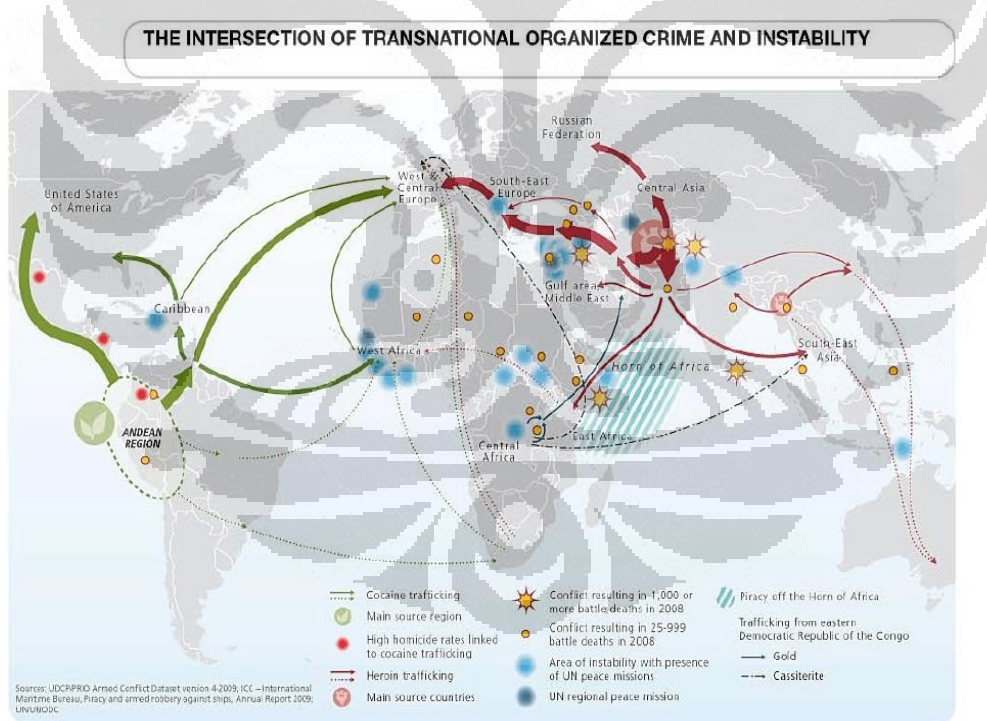
Gambar 3.7. Persediaan persenjataan di daerah konflik 2008<sup>86</sup>

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*



Gambar 3.8. Usaha penyelundupan barang di batas Eropa 1999 – 2008<sup>87</sup>



Gambar 3.9. Titik temu kejahatannegeran terorganisir dan ketidak stabilan.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid.

Dari data yang diuraikan diatas, seharusnya bisa memberikan pemikiran pemikiran baru dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional, diantaranya<sup>89</sup>;

- a. Pertama, karena tindak kriminal telah menjadi global, maka tanggapan yang semata mata bersifat nasional tidaklah cukup, hal ini hanya akan memindahkan sebuah masalah ke masalah lainnya. Tanggapan regional dan internasional yang dibelakukan oleh konvensi PBB untuk melawan tindak kriminal terorganisir transnasional (UNTOC), konvensi ini diadopsi pada tahun 2000. Perayaan ke sepuluh dari konvensi ini merupakan saat yang tepat untuk menyetujui mekanisme yang digunakan dalam penerapannya, tidak terbatas pada pembagian informasi yang akan memudahkan UNODC untuk memberikan konteks kriminal global yang lebih baik.
- b. Yang kedua, Negara Negara harus melihat diluar batas negaranya untuk melindungi kedaulatan. Di msala lalu, Negara Negara melindungi teritorinya dengan sangat kuat. Dan dalam dunia global kontemporer, pendekatan ini bukannya menyebabkan Negara semakin kuat akan tetapi malah membuatnya semakin rentan. Jika para penegak hukum berhenti di perbatasan ketika pelaku tindak kriminal melepaskan diri secara bebas, sebenarnya kedaulatan sebuah Negara sudah dilanggar, dan sudah membiarkan para pelanggar hukum berjalan dengan bebas. Oleh karenanya, berbagi data intelijen lintas batas dan kerjasama penegakan hukum sangat penting.
- c. Yang ketiga, tindak kriminal kejahatan terencana transnasional di dorong oleh pasar, sehingga tindakan yang digunakan untuk melawannya harus mengatasi pasar tersebut, bukan hanya kelompok yang mengeksploitasi pasar tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka para pelaku tindak

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

kriminal akan dengan leluasa mengisi kekosongan dan menemukan rute baru.

- d. Yang keempat, meskipun para penyelundup mengikuti jalur dimana Negara Negara tertentu tidak begitu berdaya, seperti korupsi, ketidak stabilan dan dibawah garis pembangunan, sangat penting untuk memperkuat keamanan dan peraturan hukum. Tujuan pembangunan millennium (MDG) adalah alat untuk melawan tindak kriminal yang paling efektif, disamping karena pencegahan tindak kriminal membantu meraih MDG. Pembangunan dan penjagaan perdamaian membuat wilayah wilayah rentan menjadi lebih kuat terhadap konflik yang mempengaruhi tindak kriminal, sedangkan melawan kriminal akan menetralkan para pengacau yang mengambil keuntungan dari ketidak stabilan.
- e. Yang kelima, karena kriminal dimotivasi oleh keuntungan, maka yang harus dilakukan dalah memburu uang mereka. Ini berarti memperkuat integritas dengan menerapkan konvensi PBB melawan korupsi. Dan menghentikan transfer uang informal (hawala), transaksi perbankan luar negeri dan daur ulang uang melalui bisnis property yang memungkinkan kelompok kelompok tersebut mencuci uangnya. Secara khusus, pemerintah dan institusi keuangan harus menerapkan pasal 53 mengenai anti korupsi yang mengharuskan para pihak yang terikat untuk mengetahui siapa pelanggan mereka dan menentukan penerima dana serta mencegah agar kerahasiaan perbankan tidak membatasi proses penyelidikan tindak kriminal.
- f. Yang keenam, kesempatan yang terbuka lebar dalam perdagangan membiarkan para pelaku masuk, disini penyaringan perlu dibangun. Dalam dua decade terakhir, peraturan yang tidak mencukupi dan pertumbuhan yang tidak diperhatikan, bersama dengan internet dan zona perdagangan bebas, telah membiarkan dilanggarnya sistem ekonomi dan

finansial. Sekarang, diperlukan kewaspadaan yang lebih untuk menjaga barang barang illegal keluar dari rantai persediaan, menjaga peralihan produk illegal ke pasar gelap, memperkuat tindakan anti korupsi, dan mengenali container dan penerbangan yang mencurigakan, menghancurkan kriminal dunia maya, dan melaksanakan pemeriksaan menyeluruh (sebagai contoh, sampai menyentuh perbankan dan penjualan properti)

Dalam cakupan, penetrasi, dan dampak global, tindakan kriminal terorganisir telah menjadi ancaman yang mempengaruhi semua Negara anggota, oleh karenanya Negara Negara ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan tanggapan terhadap tindakan kriminal ini.

### **3.3 Kerangka hukum internasional**

Sebelum membahas mengapa jaringan global LTTE bisa menjadi ancaman terhadap keamanan internasional, penulis mencoba menjabarkan bagaimana LTTE bisa masuk dibawah kategori ancaman terhadap keamanan dan kedamaian internasional. Seperti yang di jelaskan di bab sebelumnya, bahwa segala bentuk kejadian atau proses yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah besar, atau berkurangnya kesempatan hidup dan merusak atau mengacaukan Negara - Negara sebagai unit dasar dari sistem internasional dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional oleh PBB.

Daniel Pickard berpendapat bahwa mengkategorikan sebuah tindakan kedalam ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional dapat mendatangkan berbagai konsekuensi<sup>90</sup>. Karena apabila tindakan seorang individu atau sebuah kelompok tertentu dianggap atau masuk ke dalam definisi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional, maka dewan keamanan PBB dapat menggunakan wewenangnya, termasuk penggunaan kekuatan militer dari Negara Negara anggota. Namun, karena dewan keamanan PBB telah memperluas definisi

<sup>90</sup> Daniel Pickard, "When Does Crime Become A Threat to International Peace and Security?", *Florida Journal of International Law*, 1998, hal. 5.

ancaman tersebut, maka tindakan dari aktor – aktor non Negara bisa berada dalam ambang definisi tersebut.

Berikutnya Pickard berpendapat bahwa ‘tindakan kriminal, yang dilakukan oleh aktor non-negara, yang memiliki karakter transnasional dan secara inheren melibatkan ancaman kekerasan yang mengerikan terhadap manusia dan berada di luar jangkauan kemampuan, kehendak, atau kendali domestik Negara tertentu, maka penggunaan kekuatan dewan keamanan yang tercakup di dalam bab VII piagam PBB bisa dianggap sah’<sup>91</sup>.

Pertanyaan berikutnya adalah, konsekuensi apa yang muncul setelah sebuah tindakan ditentukan sebagai ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional? Pickard menjelaskan bahwa setelah PBB mengidentifikasi sebuah ancaman, maka kerangka penggunaan kekuatan yang tertera dalam piagam PBB akan digunakan. Pada pasal 41 piagam PBB dijelaskan bahwa, dewan keamanan dapat memutuskan tindakan seperti apakah yang akan diambil, selain kekuatan militer, untuk digunakan dalam melaksanakan keputusan yang diambil. Tindakan - tindakan ini bisa ‘termasuk interupsi hubungan ekonomi sebagian atau keseluruhan, interupsi jalur kereta api, jalur udara, layanan pos, telegraf, dan alat komunikasi lainnya serta pemutusan hubungan diplomatis’<sup>92</sup>. Pada pasal 41 ini juga diterangkan bahwa dewan keamanan PBB diizinkan untuk menjatuhkan sanksi non militer tersebut, akan tetapi dewan keamanan PBB juga tidak terbatas pada tindakan yang tersebut diatas saja.

Terdapat berbagai faktor yang dalam menentukan sebuah tindakan masuk ke dalam ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Diantaranya seperti yang tertera dibawah ini :

### ***3.3.1 Konsekuensi transnasional***

Sebuah tindakan kriminal bisa dimasukkan dalam kategori ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional apabila konsekuensi atau akibat yang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Lampe, *Op. Cit.*

ditimbulkannya bersifat transnasional<sup>93</sup>. Hal ini sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh PBB di masa lalu serta prinsip-prinsip yang tertanam dalam Piagam PBB. Pasal 2 Piagam PBB mencakup larangan penggunaan kekuatan wilayah sah sebuah Negara, serta ikut campur dalam masalah yang berada dalam yurisdiksi domestik Negara terkait. Pasal tersebut berbunyi:

*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*

Semua anggota Negara harus menjaga hubungan internasionalnya dari ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas wilayah atau kemerdekaan politik dari Negara manapun, atau tidak konsisten dengan tujuan dari PBB dengan cara lain<sup>94</sup>.

Oleh karenanya, persyaratan dasar untuk membentuk ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional adalah menyebabkan konsekuensi transnasional. Sebagai contoh dari karakter transnasional yang dimiliki oleh sebuah tindakan kriminal adalah proliferasi senjata pemusnah massal yang mempengaruhi kestabilan regional, dan merusak lingkungan yang mungkin bersifat internasional. Selain itu, kejahatan terencana transnasional dan perdagangan narkoba juga termasuk dalam kategori ini karena keduanya bisa beroperasi di satu Negara atau lebih dalam penjualan dan pembeliannya.

### **3.3.2 Tindakan yang dikriminalkan**

Yang dimaksud perilaku yang dikriminalkan disini adalah, tindakan yang dimaksud harus termasuk tindakan kriminal di bawah hukum, dan di deskripsikan dengan jelas. Tindakan ini harus dilarang oleh hukum internasional, atau kode kriminal dari sebagian besar Negara anggota PBB. Meskipun saat ini belum ada kode kriminal internasional, namun terlihat perkembangan konsensus yang menentukan bahwa

<sup>93</sup> Pickard, *Op. Cit.*

<sup>94</sup> Pasal 2, butir ke - 4 piagam PBB.

tindakan tertentu melanggar hukum internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan, dan genosida atau pembunuhan massal<sup>95</sup>.

Faktor kesamaan prinsip hukum pidana dari sebagian besar Negara anggota mengenai sebuah tindakan kriminal bisa menjadi sangat penting dalam pembuatan keputusan dewan keamanan PBB. Piagam PBB memang menyebutkan bahwa apabila sebuah tindakan di kriminalkan oleh sebagian besar hukum domestik Negara anggota PBB, maka *de facto* larangan internasional bisa dilaksanakan. Namun, yang harus diperhatikan disini adalah pemberitahuan kepada individu – individu yang menjadi target dari resolusi dewan keamanan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya mandat yang menyatakan bahwa individu – individu tersebut tidak boleh dihukum apabila mereka tidak mengetahui tindakannya melanggar hukum ketika melaksanakannya<sup>96</sup>. Dan tindakan yang dianggap kriminal ini juga harus dikenal secara luas, untuk menghindari pertanyaan mengenai hakikat dari Dewan Keamanan PBB. Sebagai contoh, jika sebagian besar Negara anggota mengenali tindakan tertentu sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana, maka akan semakin sulit untuk mengenali larangan dari Dewan Keamanan, yang melarang pelanggaran wewenang. Seperti yang tercantum di pasal 39 Resolusi PBB;

*The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security*<sup>97</sup>.

Dewan Keamanan akan menentukan adanya segala macam ancaman terhadap kedamaian, pelanggaran kedamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi atau menentukan tindakan apa yang akan di ambil berdasarkan pasal 41 dan 42, untuk mempertahankan atau memulihkan kedamaian dan keamanan internasional.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Lampe, *Op. Cit.* Untuk melihat penjelasan lebih lanjut, lihat Pickard, *Supra* note 441 – 54, yang mengulas argumen mengenai kurangnya hukum dan konsep kriminal internasional dari *nullem lege* dan prosekusi *ex post facto*.

<sup>97</sup> Piagam PBB, pasal 39.



### 3.3.3 *Penolakan atau ketidakmampuan Negara asal untuk menangani pelanggaran kriminal*

Hal ini terkait dengan poin pertama, yaitu bahwa sebuah tindakan kriminal harus memiliki konsekuensi internasional agar bisa dimasukkan ke dalam ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional<sup>98</sup>. Seperti yang tertera pada pasal 2, ayat 7 piagam PBB;

*Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.*

Tidak ada satupun yang tercakup dalam piagam ini yang akan memberikan kewenangan kepada PBB untuk ikut intervensi dalam hal hal yang pada dasarnya termasuk dalam yurisdiksi domestik dari sebuah Negara atau mengharuskan Negara anggota untuk menyerahkan masalah terkait untuk di selesaikan dibawah piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak akan mempertanyakan penerapan tindakan penegakan hukum yang tercantum dalam Bab VII.

Ayat ini membatasi yurisdiksi domestik, oleh karenanya, menurut Pickard, agar tidak melanggar gagasan tradisional yang ada, Negara asal dari tindakan tersebut harus menolak atau tidak mampu menangani pelanggaran kriminal yang dipertanyakan. Pickard mengambil dua contoh yaitu Columbia dan masalah kokainnya, dimana Columbia dianggap “menyerah” terhadap perdagangan narkoba karena tidak berdaya dalam menghentikan produksi dan ekspor obat – obatan terlarang. Begitu pula Rusia dengan permasalahan kejahatan terorganisirnya, yang dianggap telah membuat Negara ini bangkrut dan semakin dekat dengan anarkisme.

Dalam nilai – nilai tradisional kedaulatan, masyarakat internasional hanya bisa bertindak jika Negara asal tindakan kriminal menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengatasi pelanggaran yang ada. Beberapa ahli hukum internasional berpendapat bahwa dewan keamanan dapat mempengaruhi masalah apa saja yang

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

termasuk dalam yurisdiksi domestik. Namun disisi lain, masalah ini juga merupakan sesuatu yang relatif, dan tergantung pada perkembangan hubungan internasional<sup>99</sup>. Oleh karenanya, Pickard berpendapat bahwa Dewan keamanan harus benar – benar memperhatikan area ini untuk melindungi integritas dan keabsahan prosesnya<sup>100</sup>.

### **3.3.4 Penggunaan kekuatan atau ancaman untuk melakukan kekerasan**

Penggunaan kekuatan atau ancaman untuk melakukan kekerasan adalah salah satu syarat mutlak dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pickard berpendapat bahwa, tindakan kriminal dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional apabila mengganggu kedaulatan, kesatuan wilayah, atau kemerdekaan politik dari Negara lain<sup>101</sup>. Dalam konteks ini, penyelundupan senjata pemusnah masal sudah jelas merupakan ancaman penggunaan kekerasan yang mengganggu kedaulatan dan kesatuan wilayah sebuah Negara. Begitu pula para pelaku kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba yang acap kali menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Hal ini dikarenakan bisnis yang mereka jalani melanggar dan menembus batas nasional dari Negara pengimpor. Dan terkait dengan hal ini, menurut Pickard, maka pengiriman pasukan kemanusiaan bisa dibenarkan<sup>102</sup>.

### **3.3.5 Tingkat pelanggaran kriminal parah**

Selain harus menggunakan kekuatan atau ancaman untuk melakukan kekerasan, sebuah tindakan kriminal harus mencapai tingkat dimana pelanggaran yang dilakukan sangat parah. Berdasarkan fakta yang ada, penggunaan kewenangan pada bab VII piagam PBB mengenai kewenangan melakukan agresi terhadap ancaman perdamaian dan keamanan internasional, tindakan yang diambil adalah untuk peristiwa pelanggaran kemanusiaan parah seperti di Rwanda, Yugoslavia, dan

<sup>99</sup> Seperti yang dikutip Pickard (hal 17) dari Fielding, *Supra* note 10, hal. 559 (mengutip Leland M, Goodrich et al., Charter of the United Nations 61 (3d ed. 1969) (mengutip P.C.I.J (serB) No. 4, hal. 24 (1922)))

<sup>100</sup> Lampe, *Op. Cit.*, hal. 99-116.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Somalia. Hal ini bisa saja diperdebatkan jika dibawa ke ranah pembahasan perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, namun Pickard berpendapat bahwa tindakan pelanggaran kriminal parah bisa berupa tindakan yang dilaksanakan sekali seperti peledakan senjata pemusnah masal, atau tindakan yang *sistematis dan berkelanjutan* seperti pengiriman heroin secara terus menerus ke dalam Negara berdaulat.

### **3.4 Reaksi masyarakat internasional terhadap LTTE**

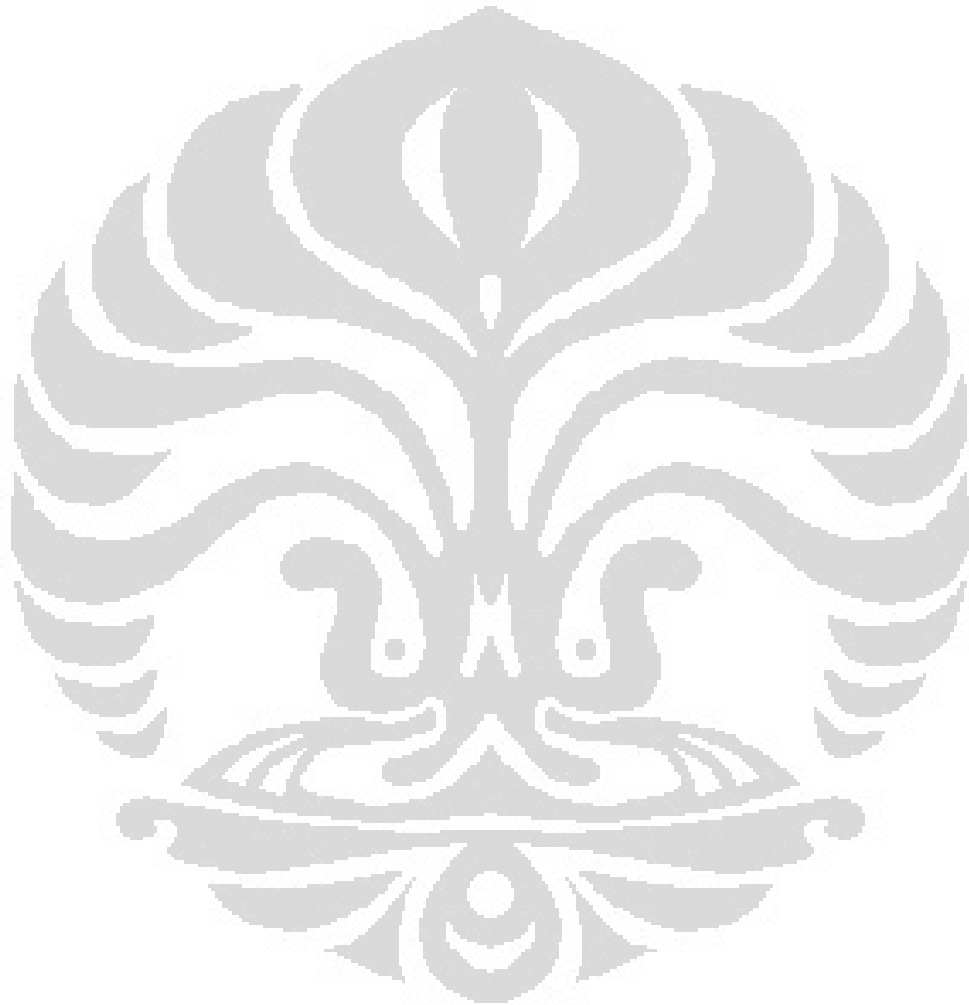
Dikarenakan cakupan dan ancaman LTTE terhadap masyarakat Internasional, berbagai Negara memasukkan LTTE dalam daftar organisasi teroris internasional.

#### **2.1.1 Pernyataan Negara – Negara terkait dengan LTTE**

Setidaknya ada 32 negara yang memasukkan LTTE dalam daftar organisasi teroris sampai pada tahun 2007, yang termasuk India (sejak tahun 1992), Amerika (sejak tahun 1997) Malaysia, Inggris (sejak tahun 2000), Uni Eropa (sejak tahun 2006; mewakili 27 negara), Kanada (sejak tahun 2006).

#### **2.1.2 Pernyataan Lembaga Internasional terkait LTTE**

PBB juga meloloskan resolusi 1373, yang meminta Negara – Negara anggota untuk mengidentifikasi dan membatasi aktifitas organisasi atau kelompok teroris. PBB memang belum mengeluarkan daftar organisasi teroris tersendiri akan tetapi menyerahkan kepada Negara anggota dalam mengidentifikasi organisasi teroris. Mantan Sekjen PBB Kofi Annan juga menyarankan agar LTTE mendapatkan hukuman yang setimpal jika mereka tetap menggunakan pasukan anak – anak. Dalam sebuah laporan tahun 2006, Kofi Annan juga merekomendasikan sanksi yang lain seperti embargo senjata dan pembatasan aktifitas finansial bagi LTTE. Sejalan dengan resolusi 1373 dari PBB, Australia dan berbagai Negara lain kemudian memasukkan LTTE dalam daftar organisasi teroris, begitu pula Kanada yang mengambil tindakan dengan tidak memberikan ijin tinggal bagi anggota LTTE yang telah berpartisipasi dalam kejahatan kemanusiaan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Ancaman LTTE terhadap keamanan internasional dan bagaimana gerakan mereka menyebar dan menjadi global dijelaskan oleh penulis pada bab II, sedangkan kerangka konsep yang lebih rinci dan peraturan dan hukum yang berlaku untuk terorisme, kejahatan terorganisir, dan bagaimana menentukan sebuah tindakan sebagai ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional atau tidak, terdapat di bab II. Setelah semua dijelaskan dan dijabarkan di bab – bab tersebut, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisa faktor faktor pendorong transnasionalisasi gerakan LTTE dan jaringannya, serta keseimbangan antara aktor – aktor yang terlibat di dalamnya berdasarkan kerangka teori yang digunakan di bab 1.

#### **4.1 Faktor pendorong transnasionalisasi**

Berawal mula dari gerakan insurgensi, LTTE ternyata berkembang menjadi ancaman serius terhadap kedamaian dan keamanan masyarakat internasional. Baik melalui gerakan terorismenya yang bervariasi, maupun melalui gerakan kejahatan terorganisir transnasional. Dibutuhkan sebuah penjelasan disini, karena untuk menjadi jaringan transnasional, jaringan LTTE harus memiliki pendorong yang memungkinkan mereka untuk memiliki dasar yang cukup kuat di Negara lain, baik untuk alasan politis, maupun alasan ekonomi dengan mengumpulkan pendanaan melalui sumbangan – sumbangan, atau kegiatan kejahatan kriminal terorganisir.

Di awal pembahasan, penulis menggunakan kerangka teori yang diungkapkan oleh Thomas L Friedman, yaitu dalam globalisasi terdapat tiga faktor utama; teknologi dan informasi, ideologi yang berupa kapitalisme global, dan faktor ekonomi dalam bentuk pasar bebas. Dari masing masing faktor tersebut, penulis menguraikan elemen elemennya, dan menganalisa bagaimana faktor tersebut bisa mempengaruhi, mendorong, atau memfasilitasi pergerakan LTTE diluar Sri Lanka, dan membangun jaringan yang kuat di Negara Negara dimana persebaran imigran etnis Tamil Sri

Lanka berada, atau Negara Negara lemah yang bisa mereka gunakan untuk berlindung dan atau melaksanakan kejahatan terorganisir untuk mendanai gerakan mereka.

#### 4.1.1 Perkembangan Teknologi dan informasi

Teknologi telah menimbulkan perubahan dalam masyarakat, keamanan, dan ekonomi. Hal ini membuat semua pihak harus waspada bukan hanya terhadap teknologi, namun juga terhadap kemampuan untuk bertahan dan bertindak dalam dunia yang berkembang dengan sangat cepat. Dan perkembangan teknologi, mempengaruhi hampir semua aspek hubungan sebuah Negara, mulai dari negosiasi perdagangan sampai keamanan militer. Teknologi mengubah cakupan sebuah Negara dan mendefinisikan ulang tujuan dari kebijakan luar negeri mereka.

Dalam perlawanannya, LTTE menggunakan teknologi untuk meningkatkan kapasitas, sebagai pihak dengan kekuatan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan Sri Lanka. Dengan menggunakan teknologi, LTTE mampu membangun pengaruh yang kuat kepada etnis Tamil yang tersebar di seluruh dunia. Dengan teknologi juga, LTTE mampu melakukan propaganda, melalui internet, dan berkomunikasi dengan organisasi organisasi yang dibentuk di Negara Negara tempat mereka mencari perlindungan. Melalui teknologi, LTTE mampu melakukan koordinasi yang matang, untuk mengumpulkan pendanaan, melakukan operasi, dan memenuhi stok logistik dan persenjataan mereka. Teknologi mendefinisikan kembali peran aktor non Negara dalam hubungan dunia internasional, dan disinilah LTTE mampu mendefinisikan dirinya sebagai aktor yang memiliki akses dan kekuatan yang ditingkatkan oleh teknologi yang berkembang semakin cepat.

##### 4.1.1.1 Transportasi

Dalam semua operasinya, LTTE ditunjang oleh berbagai macam teknologi, dan salah satu yang paling penting adalah kemajuan di bidang transportasi. Persebaran LTTE diseluruh dunia tidak lepas dari canggihnya alat transportasi yang

digunakan oleh para imigran Tamil Sri Lanka untuk menuju ke Negara atau benua tujuan mereka. Di sisi lain, percepatan transportasi juga mempermudah perpindahan barang dan atau manusia yang mereka selundupkan. Katakanlah, sebagai contoh utama adalah perpindahan narkoba, dan persenjataan yang menjadi faktor utama pergerakan mereka, baik dalam segi ekonomi atau dalam segi logistik.

Dikarenakan tekanan yang mereka dapatkan di Sri Lanka, etnis Tamil terpaksa meninggalkan tanah air mereka, dan mencari tempat perlindungan baru, untuk kesempatan dan kehidupan yang lebih baik. Dan hal ini sangat bertumpu pada semua proses imigrasi, baik secara sah atau tidak. Untuk meninggalkan Sri Lanka saja, etnis Tamil membutuhkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemalsuan dokumen dan pengurusan transportasi. Kemudahan transportasi mempercepat perpindahan mereka ke berbagai penjuru dunia. Meskipun hal ini akhirnya di manfaatkan oleh LTTE untuk membangun kekuatan menggunakan jaringan imigran Tamil yang sudah terbangun.

Dalam mempertimbangkan tipe operasi teror, empat klasifikasi<sup>92</sup>:

- Pembajakan dan penyanderaan
- Penyerangan kapal
- Penggunaan kapal sebagai ‘penunjuk’, yang digunakan untuk membawa anggota teroris dan/atau bahan untuk digunakan di tempat lain
- Penggunaan kapal sebagai senjata
- Menenggelamkan kapal untuk memblokir titik utama transportasi atau pelabuhan.

Operasi dan bagaimana LTTE bertumpu pada kemajuan transportasi baik itu darat, udara, dan yang paling utama adalah transportasi laut, tercermin pada uraian di

---

<sup>92</sup> Clifford Bragdon, *Transportation Security*, Butterworth Heinemann, Maryland, 2008, hal. 155.

bab 2, mengenai strategi dan gerakan LTTE yaitu dalam terorisme maritim, serta penyelundupan manusia keluar Sri Lanka untuk mencari perlindungan.

#### 4.1.1.2 Komunikasi

Di dalam salah satu artikelnya, Castells berargumen bahwa tatanan dunia baru, perubahan sosial saat ini dapat ditentukan oleh peranan masyarakat jaringan (*network society*) di era internet atau teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital saat ini<sup>93</sup>.

Seluruh proses perubahan sosial, baik dalam nilai-nilai maupun politik, memperoleh tuas signifikan seperti yang ditawarkan oleh jejaring (*networks*) dari *mass-self communication*. Castells menyebutnya sebagai suatu bentuk komunikasi di era kini yang horizontal, interaktif, berbasis pada jaringan, membawa pesan dari banyak sumber kepada audience luas, dari lokal ke global ke lokal, secara *real time* maupun waktu yang terpilih. Dalam *network society*, semua orang (yang memiliki perangkat akses informasi teknologi) dapat diraih. Dan, media konvensional sulit untuk mengabaikan “*buzzing world*” semacam itu dan terdorong untuk ikut menebarkan informasi.

Perubahan sosial merupakan produk dari interaksi antara perubahan kultural dan perubahan politik. Perubahan kultural sendiri merupakan perubahan nilai-nilai dan keyakinan di alam pikir manusia dalam skala yang cukup luas untuk mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Sementara, perubahan politik merupakan pengapdosian secara institusional akan nilai-nilai baru yang menyebar dalam kultur suatu masyarakat.

Castells menyebut, aktor sosial yang bertujuan pada perubahan kultural sebagai pergerakan sosial. Sementara, proses yang bertujuan pada perubahan politik (perubahan institusional) sebagai insurgen politik. Castells menempatkan insurgen politik pada proses transisi antara perubahan kultural dan perubahan politik.

---

<sup>93</sup> Manuel Castells, *Communication Power*, Oxford: 2009.



Pergerakan sosial itu sendiri terbentuk melalui proses mengkomunikasikan pesan mengenai kemarahan dan harapan. Oleh karena itu, sepanjang sejarah menunjukkan, control atas komunikasi sosial oleh otoritas politik maupun ideologi, juga oleh kalangan elit, merupakan sumber kunci kekuatan sosial.

Di era kini, dalam masyarakat jaringan pertarungan mengenai mengambil tempat di jaringan komunikasi multimedia. Oleh karena itu, Castells meyakini, proses perubahan sosial membutuhkan pemrograman ulang jaringan komunikasi (*communication network*) dalam nilai-nilai sosial, kultural, dan politik.

Castells meyakini, dengan memanfaatkan baik media konvensional (mainstream) dan jaringan komunikasi horizontal dapat memperbesar potensi perubahan sosial dan politik.

Castells menyontohkan peristiwa cukup dramatis proses Barack Obama menjadi presiden keturunan kulit hitam pertama di Amerika Serikat tahun 2008 lalu. Kampanye oleh tim Obama menuju kursi presiden merupakan contoh nyata kampanye berbasis jaringan pertama yang sukses. Kampanye Obama merupakan contoh kasus paradigmatik dari insurgent politics di era internet.

Kekuatan internet tersebut, seperti yang dikatakan oleh David Bollier, pakar atau peneliti dampak teknologi digital

*“The internet has been a godsend to such population because it enables large numbers of geographically isolated people with a shared history to organize into large virtual communities”.*

“Internet telah menjadi sesuatu yang dikirimkan tuhan ke populasi kita, karena telah membantu orang – orang dari daerah yang terisolir dengan sejarah yang sama untuk bisa mengatur masyarakat virtual yang sangat besar.

*Era self mass-communication* di tengah network society seperti yang diulas oleh Castells tersebut kian menjadi semakin nyata ketika peran media massa konvensional yang diharapkan membawa perubahan global kerap kali tidak seperti yang diharapkan di masa lalu.

Sementara itu, Melalui dua artikel: “*Rewriting the Script: Iraq*” (Lawrence Pintak), dan “*Media at War*” (Howard Tumber dan Jerry Palmer), penulis merumuskan beberapa poin penting yang terkait dengan relasi media massa, pemerintah dan kekuatan militer dalam konteks perang<sup>94</sup>.

Sebagai pembahasan awal, penulis menguraikan perkembangan konsep Perang. Perang dapat dimaknai sebagai perpanjangan politik luar negeri sebuah Negara, yang dikonstruksikan sebagai sebuah pilihan terakhir Negara dalam melaksanakan kebijakan luar negeri di sebuah sistem politik internasional. Sehingga, Perang juga dapat diposisikan sebagai pilihan bagi sebuah Negara untuk memenuhi kepentingan nasional yang ingin dicapai. Pemerintah dan kekuatan militer adalah dua aktor utama yang berkepentingan untuk mengatur bagaimana sebuah perang itu dilaksanakan, dan kemudian dimenangkan demi pencapaian kepentingan nasional yang sudah ditetapkan di awal. Pemerintah dan kekuatan militer, dalam prakteknya, akan memobilisasi segala sumber daya yang ada, untuk memenangkan Perang.

Media massa di satu sisi, adalah aktor yang melakukan fungsi pencarian, pengumpulan, dan penyampaian berita informasi kepada masyarakat luas maupun Negara itu sendiri. Dalam konteks perang, maka media massa mempunyai dua pilihan posisi yang bisa dipilih. Yaitu, sebagai pendukung pemerintah dan kekuatan militer, atau posisi lain yaitu sebagai oposisi Pemerintah dan Kekuatan Militer.

Tumber dan Palmer menguraikan bahwa media massa Amerika Serikat menggunakan label yang cenderung homogen dalam menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi di tahun 2003 di Iraq. BBC menyebutnya sebagai ‘Iraq War’, CNN menyebutnya ‘War In Iraq’, ITN ‘War on Saddam’, Sky ‘War on Iraq’, sedangkan Fox News menyebutnya sebagai ‘Operation Iraqi Freedom’<sup>95</sup>. Melalui paparan ini, maka dapat ditarik sebuah asumsi bahwa posisi media massa Amerika Serikat

---

<sup>94</sup> Pintak, Lawrence, *Rewriting the Script dalam Refelctions in A Bloodshot Lens*, London: Pluto Press, 2006, hal. 20 – 50.

<sup>95</sup> Tumber, Howard dan Palmer, Jerry, *Media at War: The Iraq Crisis*, London, SAGE, 2004, hal, 60.

terhadap kasus Iraq 2003, memiliki nuansa yang cenderung sama. Melalui labelisasi yang disebutkan di atas, maka media Amerika Serikat cenderung untuk menempatkan peristiwa tersebut sebagai sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang benar secara normatif. Yaitu untuk membebaskan rakyat Iraq dari kontrol pemerintahan Saddam yang otoriter, yang tidak memenuhi kaidah demokratis. Pintak menguatkan argumen ini dengan menjelaskan mengenai adanya laporan dari media massa Amerika Serikat mengenai informasi kepemilikan senjata pemusnah massal oleh pemerintahan Saddam. Pintak juga berargumen bahwa Pemerintah, dan para aktor kunci di Militer, melakukan persekutuan untuk mengarahkan media massa Amerika Serikat untuk mendukung terjadinya serangan militer ke Iraq.

Pintak mengatakan bahwa telah terjadi sebuah relasi yang bersifat simbiosis mutualisme dalam konteks pemberitaan kasus Iraq 2003 oleh media massa Amerika Serikat dengan Pemerintah dan aktor militer. Penjelasan yang diberikan oleh Tumber dan Palmer memberikan argument yang lebih detail mengenai hubungan simbiosis mutualisme ini<sup>96</sup>. Dalam artikelnya, Tumber dan Palmer menguraikan bahwa hubungan ini sudah dimulai semenjak perang Viet Nam, yang kemudian berlanjut sampai ke perang Teluk I, perang Somalia, dan kemudian peristiwa Irak di tahun 2003<sup>97</sup>. Pintak menjelaskan lebih lanjut, bahwa situasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari rasa nasionalisme dari para tokoh kunci media massa Amerika Serikat, yang kemudian mempengaruhi posisi media massa tersebut dalam memberitakan peristiwa di Iraq di tahun 2003<sup>98</sup>.

Fenomena ini merupakan wujud dari pertarungan informasi dari dua media massa yang berbeda haluan. Dengan adanya dua tampilan berita yang berbeda, maka para penonton global mendapatkan sajian informasi yang lebih komprehensif. Perkembangan situasi ini, kemudian berakibat gagalnya pemerintah Amerika Serikat,

---

<sup>96</sup> Pintak, *Op. Cit.*

<sup>97</sup> Tumber dan Palmer, *Op. Cit.*

<sup>98</sup> Pintak, *Op. Cit.*

dan kekuatan militer, untuk memenangi elemen paling penting dalam kemenangan sebuah perang, yaitu simpati dari masyarakatnya Amerika Serikat. Lambat laun, rakyat Amerika Serikat mulai ragu, dan menarik dukungan terhadap kebijakan Pemerintahan Bush Jr. dalam melancarkan serangan militer ke Iraq. Banyaknya tampilan korban sipil yang berjatuh, dikombinasikan dengan penderitaan tentara Amerika Serikat, juga menjadikan opini publik AS semakin terbelah dan menarik dukungannya<sup>99</sup>.

Di era internet saat ini yang ditopang oleh perkembangan informasi teknologi, bentuk komunikasi massa tidak lagi melulu didominasi oleh peran media konvensional (mainstream). Era dimana media massa konvensional berperan besar membentuk opini publik, membingkai isu, memungut fakta, kini harus dihadapkan pada era network society dimana siapapun berpotensi menjadi jurnalis (citizen journalism) yang mampu melaporkan segala hal dan berbagi kepada audience luas di internet secara serentak melalui perangkat teknologi.

Media massa konvensional yang cenderung dapat menjadi alat kekuasaan atau alat Negara kini juga harus menyikapi era citizen journalism di mana para aktornya bisa siapa saja baik yang memiliki kepentingan atas suatu kelompok atau golongan, ataupun bebas kepentingan. Dunia kian menjadi seperti akuarium yang dapat dilihat dari berbagai sudut oleh siapapun. Siapapun kini memiliki pilihan untuk memungut informasi atau fakta yang tersaji dalam berbagai versinya. Era informasi yang berbasis pada jaringan masyarakat tersebut berpotensi untuk menggulirkan terbentuknya tata dunia baru, yang tak lagi didominasi oleh aktor-aktor elit saja, namun bisa melibatkan aktor individu siapapun<sup>100</sup>.

Pada tahun 2009, pasukan Pemerintah Sri Lanka menemukan perlengkapan elektronik yang dipercayai digunakan oleh para pemimpin Tamil nadu, dan televise

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

yang dijalankan oleh satellite untuk menghubungkan Tamil di Sri Lanka dengan para Elit Tamil nadu di India <sup>101</sup>. Perlengkapan komunikasi ini disumbangkan oleh INGO yang beroperasi di Sri Lanka, seperti "Save the Children," "Oxfam", hal ini diketahui dari tanda yang terdapat di perlengkapan satelit tersebut. Salah satu intelijen di Sri Lanka memberitahukan bahwa ada kemungkinan besar LTTE memiliki perlengkapan satelit di tempat lain yang disembunyikan dengan baik.

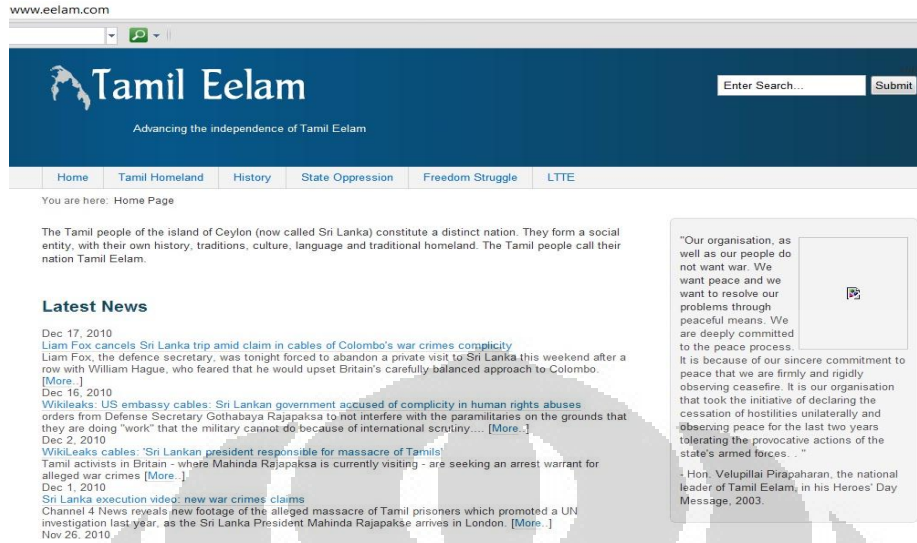
Perlengkapan komunikasi ini belum termasuk situs situs yang digunakan oleh LTTE untuk menyebarkan propagandanya. Melalui situs ini, LTTE mengunggah berbagai macam materi propaganda, seperti pidato, dan berita terkini dari perjuangan mereka. Dibawah ini merupakan tampilan layar dari situs situs tersebut;



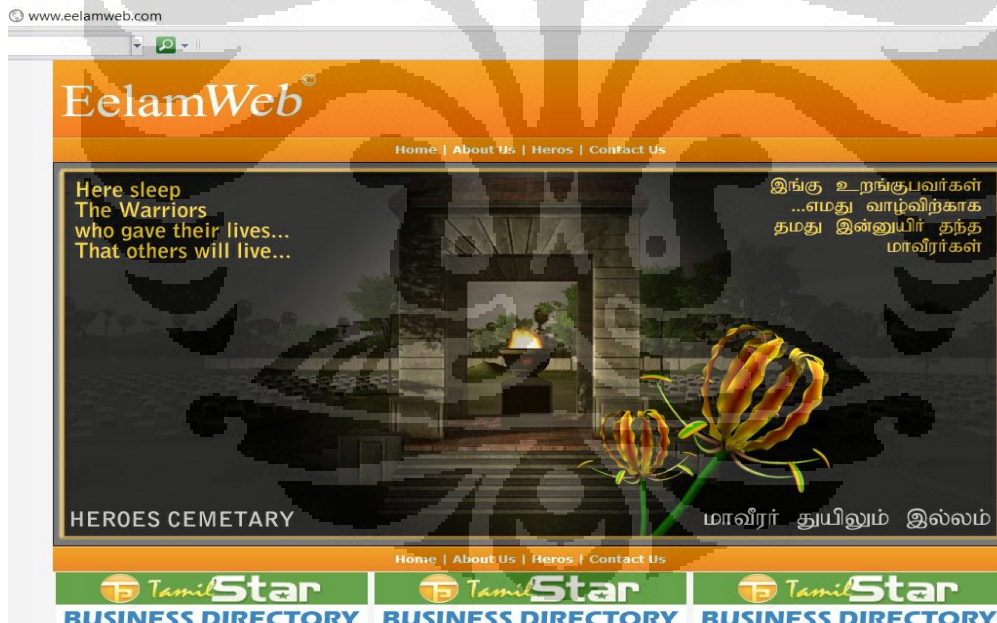
Gambar 4.1. www.tamileelamnews.com<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Seperti yang tercantum di <http://www.asiantribune.com/?q=node/15818>. Di akses pada January 01 – 05 – 2012: 19:00.

<sup>102</sup> Tampilan situs di ambil pada 10 – 05 – 2012, pukul 21:00.



Gambar 4.2. [www.eelamnews.com](http://www.eelamnews.com).<sup>103</sup>



Gambar 4.3. [www.eelamweb.com](http://www.eelamweb.com).<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Tampilan situs di ambil pada 10 – 05 – 2012, pukul 21:00

<sup>104</sup> Tampilan situs di ambil pada 10 – 05 – 2012, pukul 21:30

The screenshot shows the TamilNet website interface. At the top, there is a navigation menu with options like News, Features, Photo Features, Opinion, Development, TN Transcription, Web feeds, Feedback, and About us. The main headline is "Gotabhaya plans psy-ops newspaper in Jaffna". Below the headline, there is a sub-headline: "Occupying Colombo's defence establishment led-by SL presidential sibling Gotabhaya Rajapaksa plans to start a daily newspaper with the name 'Thamizh Naatham' in Jaffna by appropriating the building and assets of the former daily Namathu Eezhanaadu." The article text continues: "The move for the psy-ops war through a new newspaper directly run by the SL military establishment comes in, because of the failure of the EPDP's Thinaururu and the Jaffna edition of Thinaururu, run by SL government-controlled Lake House of Colombo in winning the hearts of the masses in the country of Eezham Tamils to the satisfaction of the occupiers, informed sources in Jaffna said. In the late 1980s, the occupying IPKF tried a similar move by running a newspaper 'Viduthalai' with the backing of the EPRLF. Full story >>".

Other visible elements include a "Syndicate TamilNet" banner, a search bar, and a sidebar with a map of Myanmar and a section titled "Para-gala, Para-goda, Kat-paa'rai".

Gambar 4.4. *www.tamilnet.com*.<sup>105</sup>

#### 4.1.2 Ideologi

Penulis berpendapat bahwa, meskipun teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam transnasionalisasi LTTE, namun tetap dibutuhkan sebuah faktor pendorong lain, yang bersifat 'lunak' yang mampu menggerakkan individu individu yang menjadi pendorong utama pergerakannya. Kapitalisme Global, dan nasionalisme atau sentiment etnis Tamil yang begitu kuat, merupakan dua faktor yang penulis anggap sebagai ideologi yang paling dominan, yang mampu membuat etnis Tamil bersedia menyumbangkan dana dan melakukan tindakan terorisme, dan memaksa etnis Tamil lainnya untuk memberikan sumbangan demi berdirinya Tamil Eelam. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari faktor lain yang saling mendukung.

<sup>105</sup> Tampilan situs di ambil pada 10 – 05 – 2012, pukul 21:40

#### 4.1.2.1 Kapitalisme global

Belum ada tolok ukur yang pasti untuk pengaruh Kapitalisme Global terhadap motivasi individu dalam melakukan sebuah tindakan. Namun, sudah jelas bahwa dengan kesempatan yang sama, semua orang mampu melakukan apa yang di inginkan tanpa harus melalui Negara dan institusi tradisional lainnya.

Dalam semua operasinya, Negara tidak termasuk dalam perhitungan semua kegiatan LTTE, karena LTTE sudah melewati batas Negara dan melakukan operasinya tanpa terpengaruh oleh batas tradisional sebuah Negara. LTTE bertindak selayaknya sebuah perusahaan multinasional, dengan cabang di berbagai Negara, dan cabang itu terdapat dalam bentuk jaringan imigran, jaringan kejahatan terorganisir dan organisasi organisasi yang mereka bentuk untuk membantu proses diplomasi dan mencari dukungan dari dunia internasional. Dengan semangat kapitalisme global, LTTE mampu menjadi aktor mandiri, dengan akses bebas, dan mampu bertindak selayaknya sebuah institusi lainnya.

#### 4.1.2.2 Nasionalisme Tamil

Kultur etnis Tamil, sebagai minoritas di Sri Lanka, dibentuk oleh sejarah yang panjang atas penindasan dan diskriminasi oleh etnis Sinhala. Individu maupun kelompok sosial yang hidup dalam kultur Tamil berbagi ide, yaitu untuk memisahkan diri dari Sri Lanka, dan memiliki pemerintahan independen. Sebagai etnis minoritas, dan memiliki kekuatan yang tidak seimbang (asimetrik) membuat kelompok militan Tamil memilih taktik kekerasan teror sebagai metode perlawanan. Kekerasan teror inheren dengan etnis Tamil dikarenakan pengaruh identitas dan kemauan untuk berkorban yang kuat dan mengakar di kultur Tamil sebagai etnis yang minoritas dan tertindas.

Pengaruh kultur terhadap persepsi ancaman dalam etnis Tamil Ancaman kekerasan teror yang dilakukan kelompok militan Tamil selain LTTE, masih kemungkinan besar dapat terjadi. Kematian Velupillai Prabhakaran dan kekalahan



LTTE yang diumumkan oleh pemerintah Sri Lanka pada 19 Mei 2009, tidak menjadi halangan kelompok militan Tamil lain untuk muncul dan menjadi garda terdepan perlawanan etnis Tamil terhadap pemerintah Sri Lanka yang didominasi etnis Sinhala. Pembentukan People's Liberation Army - PLA (Makkal Viduthalai Ranuvam) oleh Komandan Kones, dua bulan setelah kekalahan LTTE, merupakan salah satu bukti masih adanya ancaman dari kelompok militan Tamil lainnya<sup>106</sup>. Saat dibentuk pada bulan Juli 2009, PLA memiliki 300 anggota aktif, dan diproyeksikan untuk memiliki 5000 anggota aktif dalam tahun kedepan, melalui penduduk sipil Tamil yang dibebaskan dari kamp penampungan. Kepada majalah Times, Komandan Kones mengatakan<sup>107</sup>:

“This war isn't over yet”. “There has been no solution for Tamils since the destruction of the LTTE in May. So we have built and organized the PLA and are ready to act soon. Our aim is a democratic socialist liberation of the northeast for a Tamil Eelam”....

Pernyataan ini menyiratkan bahwa kekerasan teror sebenarnya bukanlah mutlak akibat kemunculan LTTE semata. Namun kekerasan teror berakar dari kultural masyarakat Tamil, dan kultur masyarakat Tamil menjadi faktor penting terhadap lahir dan tumbuh kembangnya ide perlawanan terhadap pemerintah Sri Lanka untuk mendapatkan kemerdekaan penuh bagi etnis Tamil dalam hal pemerintahan.

Ide dan semangat pembebasan diri etnis Tamil dari pemerintahan Sri Lanka yang didominasi etnis Sinhala kemudian diartikulasikan dalam sebuah gerakan kekerasan insurgensi yang dilakukan oleh beragam kelompok militan Tamil (utamanya oleh LTTE). Dalam perkembangannya kelompok insurgensi seperti LTTE menjadikan metode kekerasan teror menjadi suplemen bagi taktik peperangan gerilya yang dilakukan.

<sup>106</sup> Caroline Ziemke-Dickens dan Julian Droogan, *Asian Transnational Security Challenges: Emerging Trends, Regional Visions*, Sidney, Macquire University, 2010, hal. 30.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Adopsi taktik kekerasan teror dalam gerakan insurgensi, yang dilakukan oleh LTTE, dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor motivasi kultural dalam aksi kekerasan teror. David J. Whittaker dalam “The Terrorism Reader”, menjelaskan bahwa ada tiga hal yang memotivasi seseorang/ kelompok sosial untuk melakukan aksi kekerasan teror. Pertama, motivasi rasional. Kedua, motivasi psikologis. Ketiga, motivasi kultural. Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa faktor motivasi kultural sebagai elemen signifikan dalam menjelaskan ide kekerasan teror sebagai respon atas persepsi ancaman yang tumbuh di dalam kultur etnis Tamil.

Menurut Whittaker, kultur berperan dalam membentuk nilai yang diyakini seseorang, maupun kelompok sosialnya. Nilai ini mampu memotivasi seseorang dan kelompoknya untuk melakukan aksi, yang terkadang menurut orang asing di luar kelompok sosialnya, merupakan tindakan yang tidak logis. Lebih lanjut, Whittaker menguraikan bahwa dalam masyarakat yang telah mampu membentuk identitas kelompok sosial yang satu, maka akan kesediaan untuk mengorbankan diri sendiri bagi kepentingan kelompok sosial merupakan hal yang akan muncul secara alamiah.

Dalam hal kekerasan teror oleh etnis Tamil, terkait tiga hal yaitu; persepsi “outsider”, antisipasi dan respon terhadap ancaman yang mengancam keberlangsungan etnis Tamil, taktik perlawanan si lemah dalam perang asimetris. Ancaman terhadap keberadaan dan keberlangsungan etnis Tamil berakar dari sejarah penguasaan wilayah Sri Lanka, dan komposisi demografi etnisitas di di Sri Lanka. Penduduk Sri Lanka kini berjumlah sekitar 21.3 juta orang. Etnis Sinhala merupakan komposisi terbesar dengan 74 %, dan Tamil kedua sekitar 18 %<sup>108</sup>. Etnis Sinhala umumnya berdiam di bagian selatan, barat dan juga di bagian tengah wilayah Sri Lanka. Sedangkan etnis Tamil di bagian utara dan timur Sri Lanka.

Dahulu pada saat wilayah Sri Lanka (periode kepemimpinan Inggris disebut Ceylon, oleh etnis Tamil disebut Eelam) dikuasai oleh Portugis, lalu Belanda, maka wilayah yang dominan berkomposisi etnis Tamil, di bagian utara dan timur Sri

---

<sup>108</sup> <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5249.htm>, di akses 22 – 04 -2012, 19:00 WIB.

Lanka, diberikan administrasi pemerintahan yang terpisah dari keseluruhan Sri Lanka. Tetapi pada tahun 1883 ketika pemerintahan Sri Lanka dipegang oleh Inggris, demi alasan efisiensi administrasi, semua wilayah Sri Lanka disatukan di bawah satu administrasi pemerintahan. Pada saat itu, penggabungan ini telah memunculkan friksi-friksi penolakan oleh etnis Tamil. Hal ini semakin bertambah buruk dengan perginya Inggris dari Sri Lanka di tahun 1959. Setelah kepergian pihak penjajah, maka wilayah Sri Lanka yang telah menjadi satu administrasi pemerintahan harus mampu mengelola dan membentuk pemerintahan sendiri yang independen. Etnis Sinhala sebagai komposisi terbesar rakyat Sri Lanka kemudian menjalankan sistem pemerintahan dan sosial yang cenderung diskriminatif terhadap etnis Tamil.

Publikasi oleh “*The Society for Threatened Peoples*” dalam *56th Session of the UN Commission on Human Rights* mengenai “*Discrimination of Tamils in Sri Lanka*” pada 1 Januari 2000 mengungkapkan sejumlah diskriminasi yang terjadi. Publikasi menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak sosial, ekonomi dan kebudayaan terhadap etnis Tamil, yang diakibatkan melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah Sri Lanka yang didominasi oleh etnis Sinhala<sup>109</sup>. Publikasi tersebut juga menyatakan semenjak kemerdekaan Sri Lanka di tahun 1948, pemerintah Sri Lanka secara sistematis telah melanggar hak sosial, ekonomi dan kebudayaan etnis Tamil. Diskriminasi ini tampak melalui kebijakan pencabutan hak pilih Indian Tamil, kolonisasi wilayah etnis Tamil oleh etnis Sinhala melalui kebijakan pemerintah, diskriminasi bahasa, pendidikan, dan juga kebijakan perekrutan. Alienasi etnis Tamil juga tampak dalam komposisi pemerintahan, terlihat dari prosentasi pegawai sipil, yaitu sebanyak 90% dari pegawai sipil, dan 99% dari aparat keamanan adalah etnis Sinhala<sup>110</sup>. Diskriminasi politik, sosial dan kebudayaan yang terjadi kemudian memicu persepsi ancaman etnis Tamil sebagai minoritas atas dominasi dan diskriminasi oleh etnis Sinhala yang mayoritas<sup>111</sup>. Persepsi ancaman kelompok etnis

<sup>109</sup> “*Discrimination of Tamils in Sri Lanka*”, 01 January 2000, 56<sup>th</sup> session of the UN Commission on Human Rights, Item 10. hal. 1.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Whittaker, *Op. Cit.*

Tamil menganggap etnis Sinhala sebagai pihak “outsider” yang mengancam keberadaan dan keberlangsungan etnisnya.

Persepsi ancaman ini kemudian diartikulasikan dalam bentuk perlawanan fisik, dengan tujuan pemisahan diri wilayah etnis Tamil dari pemerintah Sri Lanka yang didominasi etnis Sinhala. Sebagai pihak yang lebih lemah dan kekuatan yang lebih rendah dalam hal persenjataan, kemampuan, dana, kemampuan tempur dan penguasaan teknologi, maka pilihan taktik perang gerilya pada awalnya dipilih oleh kelompok militan Tamil, seperti LTTE, pada awal pergerakan. Lambat laun, taktik kekerasan teror menjadi suplemen taktik bagi taktik gerilya. Penerapan taktik teror dalam perlawanan insurgensi LTTE terhadap pemerintah Sri Lanka merupakan adaptasi pihak yang lemah terhadap pihak yang lebih kuat, yaitu dengan mengincar titik lemah pihak yang lebih kuat dengan cara-cara yang non-militer, terorisme misalnya<sup>112</sup>.

#### 4.1.3 Ekonomi

Pendanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pergerakan kelompok teroris. Jika beberapa kelompok teroris menggunakan ‘hawala’ untuk pendanaan gerakan mereka, LTTE memiliki cara yang lebih kompleks dalam pencucian uang dan mengumpulkan dana untuk pergerakan mereka. Saat ini jenis - jenis kejahatan terencana sangat bervariasi dan bersifat sangat global, sehingga mencapai proporsi makro ekonomi: barang barang yang di bawa dari satu benua, kemudian dikirim ke benua lain, dan di pasarkan di benua berikutnya. Mafia, atau pelaku kejahatan transnasional merupakan masalah transnasional yang nyata, dan merupakan ancaman terhadap keamaan, terutama di Negara Negara miskin dan memiliki konflik. Tindakan kriminal membantu terlaksananya korupsi, memperlemah bisnis dan politik, dan menjauhkan pembangunan.

---

<sup>112</sup> Ekarina Stepanova, *Terrorism in Asymmetrical Conflict; Ideological and Structural Aspects*. 2008, hal. 23.

#### 4.1.3.1 Kejahatan transnasional global dan penggalangan dana

Dalam sebuah tulisannya, Jamieson, mengungkapkan bahwa terorisme muncul sebagai sebuah cara yang digunakan oleh kelompok kriminal terorganisir. Perbedaan terorisme dan kelompok kejahatan terorganisir terletak pada motivasinya, yaitu motivasi Ekonomi, dengan menjaga keseimbangan Negara yang mereka diami untuk tetap mengambil keuntungan dari sistem yang ada. Namun, dalam kasus LTTE, yang terjadi justru sebaliknya kelompok insurgen dan teroris menggunakan kejahatan kriminal internasional untuk menggalang dana bagi pergerakannya. Terdapat motivasi ekonomi yang jelas sekarang ini, yaitu ketika LTTE melancarkan aksi kejahatan kriminal terorganisirnya, LTTE memiliki motivasi ekonomi, baik untuk keuntungan berbagai pihak yang berada di dalamnya, atau untuk mendukung pergerakan domestik mereka. Dari dokumentasi berbagai publikasi, LTTE menunjukkan kemampuan untuk mengorganisir dan menggabungkan segala instrumen yang dimiliki untuk menjalankan gerakannya. Dan salah satu faktor paling penting adalah penggalangan dana dari para imigran yang tersebar di seluruh dunia, dan perdagangan obat – obatan terlarang dan senjata. Masih belum jelas apakah kegiatan ini semata – mata untuk perjuangan kemerdekaan etnis Tamil, namun terlihat bahwa LTTE bersinggungan dengan tindakan kriminal, untuk meraih keuntungan ekonomi dan bekerja sama dengan kelompok teror lainnya.

#### 4.2 Keseimbangan aktor - aktor dalam transnasionalisasi jejaring LTTE

Untuk melihat kondisi pergerakan LTTE dengan lebih baik, penulis memberikan analisa keseimbangan antar aktor yang terlibat di dalam pergerakan LTTE. Penulis menggunakan kerangka pemikiran yang digunakan oleh Friedman, untuk menjelaskan keseimbangan aktor dalam era globalisasi.

##### 4.2.1 Keseimbangan Negara dan Negara

Untuk membahas hubungan antara Negara dan Negara, penulis memilih India. Disamping karena sejarah panjang keterlibatannya dan letak geografis yang saling

bersinggungan, juga karena hubungan etnis antara Tamil nadu dan Tamil di Sri Lanka. Penulis berkonsentrasi dengan hubungan antara Sri Lanka dan India agar mampu melihat berbagai macam aspek dalam keseimbangan antara sebuah Negara dengan Negara lain.

India menjadi terlibat dalam konflik di Sri Lanka pada tahun 1980, karena beberapa alasan, termasuk keinginan pemimpinnya untuk menunjukkan kekuatan regional di area tersebut, dan kekawatiran warga Tamil India yang kemungkinan akan bergerak melakukan gerakan separatis yang sama dengan Tamil Sri Lanka. Gerakan ini sangat mungkin terjadi di India, dan terlihat kekuatan dari etnis Tamil nadu, yang memiliki kekeluargaan yang kuat dan dukungan terhadap pergerakan perjuangan kemerdekaan etnis Tamil Sri Lanka<sup>113</sup>.

Selama konflik berlangsung, pemerintahan pusat India mendukung kedua sisi dengan cara yang berbeda. Di awal tahun 1980, India melalui agen intelijennya, RAW, memnyediakan senjata, pelatihan, dan dukungan uang kepada beberapa kelompok militan etnis Tamil di Sri Lanka, termasuk LTTE dan saingannya Tamil Eelam Liberation Organization, atau TELO. Kebangkitan LTTE sangat terkait dengan dukungan awal yang diterima dari RAW. Dan dipercayai bahwa pemerintah Sri Lanka mendukung berbagai kelompok pergerakan separatis agar pergerakan tersebut terpisah sehingga pemerintah India bisa memiliki kendali terhadap kelompok – kelompok tersebut.

India menjadi lebih aktif di akhir tahun 1980, dan pada tanggal 5 Juni tahun 1987, angkatan udara india memberikan parsel makanan ke daerah Jaffna yang pada waktu itu di kepung oleh tentara Si Lanka. Pada waktu itu, waktu pemerintah Sri Lanka menyatakan bahwa mereka hampir mengalahkan LTTE, India menjatuhkan 25 ton makanan dan obat obatan menggunakan parasut ke daerah daerah yang diduduki

---

<sup>113</sup> Seperti tertera di [http://everything.explained.at/Sri\\_Lankan\\_Civil\\_War/](http://everything.explained.at/Sri_Lankan_Civil_War/), di akses pada 02 – 03 – 2012: 19:00 WIB.

oleh LTTE, dan jelas terlihat bahwa hal ini merupakan dukungan langsung dari pemerintah India untuk pergerakan LTTE.

Kemudian diadakan negosiasi, dan Indo-Sri Lanka Peace Accord di tanda tangani pada tanggal 29 bulan Juli, tahun 1987, oleh Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dan presiden Sri Lanka, Jayewardene. Dalam perjanjian ini, pemerintah Sri Lanka membuat beberapa Konsesi untuk tuntutan etnis Tamil, termasuk pelimpahan kekuasaan untuk provinsi tersebut, penggabungan provinsi utara dan timur menjadi satu provinsi, dan status resmi bagi bahasa Tamil (hal ini tercantum pada amandemen ke 13. India setuju untuk membangun kembali daerah utara dan timur melalui pasukan perdamaian dan menangkan insurgen Tamil yang masih ada disitu. Kelompok militant Sri Lanka termasuk LTTE, meskipun pada awalnya menolak, akhirnya setuju untuk menyerah kepada IPKF.

Pada waktu itu pemerintah Sri Lanka, yang sedang menghadapi pergerakan lain yang tidak terkait dengan LTTE yang di usung oleh Janatha Vimukthi Peramuna di selatan, memanggil militer india segera setelah persetujuan di tanda tangani. Dan dibentuk pasukan Indian Peace Keeping Force (IPKF), dan pada awalnya pasukan ini bertugas mengawasi gencatan senjata dan pelucutan senjata dari kelompok kelompok militant. Pemerintah Sri Lanka menarik pasukannya ke selatan dan mengalahkan pemberontakan JVP, karena IPKF sudah mengambil alih sebagian besar bagian utara dari Sri Lanka.

Ketika sebagian besar kelompok militan Tamil di Sri Lanka menyerah dan setuju untuk solusi damai bagi konflik yang terjadi, LTTE menolak untuk melucuti senjata para pejuangnya. Karena IPKF ingin menjalankan apa yang ada dalam perjanjian, akhirnya LTTE berusaha untuk di lumpuhkan dengan paksa, dan hal ini berakhir dengan pertempuran skala besar dengan mereka. Konflik selama tiga tahun, juga ditandai oleh IPKF yang di curigai oleh berbagai kelompok Pejuang HAM dan media di India, bahwa mereka telah melakukan berbagai pelanggaran HAM.

IPKF juga kemudian mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari etnis Tamil. Disaat yang bersamaan, sentiment nasionalis membuat banyak etnis Sinhala melawan keberadaan India di Sri Lanka. Hal ini menyebabkan pemerintah Sri Lanka meminta pasukan India untuk tidak lagi menduduki daerah tersebut, dan diduga melakukan transaksi rahasia dengan LTTE yang menyebabkan memuncaknya gencatan senjata. LTTE dan IPKF melanjutkan permusuhan dan berdasarkan beberapa laporan, Pemerintah Sri Lanka bahkan memberikan senjata agar pasukan India ditarik kembali. Meskipun korban diantara IPKF sendiri semakin banyak, namun konflik penarikan IPKF masih terus terjadi, dan Gandhi menolak untuk menarik IPKF dari Sri Lanka. Hal ini kemudian di ikuti oleh kekalahannya dalam pemilihan parlemen India berikutnya, dimana Perdana Menteri yang baru, V. P. Singh meminta IPKF di tarik, dan kapal mereka yang terakhir akhirnya meninggalkan Sri Lanka pada tahun 1990. Keberadaan mereka selama 32 bulan di Sri Lanka menyebabkan setidaknya 1100 warga India dan lebih dari 5000 warga Sri Lanka meninggal dunia. Kerugian dari pemerintah India diperkirakan sekitar 20 juta rupee.

### ***Pembunuhan Rajiv Gandhi***

Dukungan bagi LTTE dari India menurun drastis pada tahun 1991, setelah mantan perdana menteri Rajiv Gandhi dibunuh oleh seorang pegebom bunuh diri dari LTTE, bernama Thenmuli Rajaratnam. Media India sebelumnya telah melaporkan bahwa Prabhakaran memutuskan untuk memusnahkan Gandhi karena dianggap melawan perjuangan kemerdekaan Tamil, dan takut nanti Gandhi akan melantik kembali pasukan IPKF, yang dianggap Prabhakaran sebagai pasukan ‘setan’ jika Gandhi terpilih kembali sebagai perdana menteri pada tahun 1991. Pada tahun 1998, di sebuah persidangan di India menemukan bahwa LTTE dan pemimpinnya bertanggung jawab atas sebuah pembunuhan, dan dalam sebuah wawancara tahun 2006, ahli ideologi LTTE Anton Balasingham menyatakan penyesalannya atas pembunuhan yang terjadi, meskipun dia tidak menerima tanggungjawab atas pembunuhan tersebut.

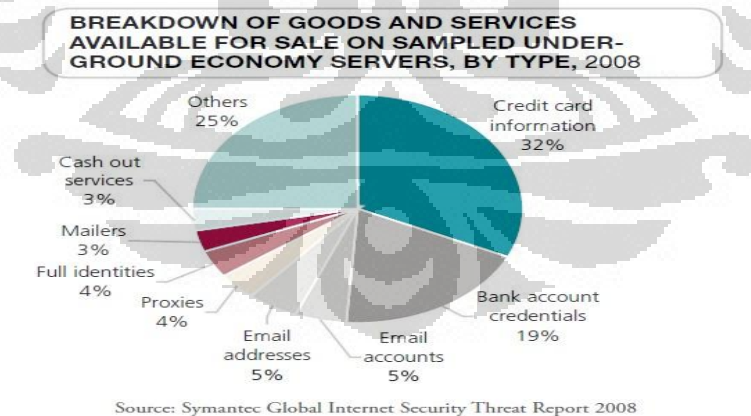


India kemudian menjadi pemerhati dari luar terhadap proses perdamaian yang berlangsung, dan beberapa kali meminta ekstradisi Vellupillai Prbhakaran. Pemerintah pusat India secara kuat menentang LTTE, meskipun disaat yang bersamaan menyuarakan hak etnis Tamil. Dan secara rahasia, partai regional Dravidian di Tamil Nadu masih sering berbicara untuk LTTE.

#### 4.2.2 Keseimbangan Negara dan pasar global

Pasar global telah mengalami perkembangan yang luar biasa pada akhir abad ke 20 bersamaan dengan pertumbuhan telekomunikasi dan mikroelektronik. Meskipun globalisasi dalam konteks pasar global dimulai dengan kedatangan Vasco da Gama di Cochin pada tahun 1498, namun yang membedakan dengan saat ini adalah perkembangan pesat dari teknologi, dan terutama dalam teknologi keamanan. Dalam dunia nyata Negara dan batas batas politik mengalami transisi dari satu inovasi dan perkembangan yang lancar.

Dengan dimampukannya setiap individu untuk melakukan transaksi dimanapun dan dari manapun, membuat Negara semakin sulit untuk mengendalikan apa yang terjadi di pasar global.



Gambar 4.5. Persebaran barang yang di jual melalui situs illegal<sup>114</sup>

<sup>114</sup> UNODC, *Op. Cit.*

Salah satu contoh yang paling nyata adalah bagaimana Sri Lanka tidak mampu melumpuhkan jaringan kejahatan kriminal terorganisir LTTE di berbagai belahan dunia. Permintaan yang tinggi akan layanan dan barang yang mereka sediakan, berupa obat-obatan terlarang, persenjataan, ataupun pelatihan bagi kelompok teroris lain, membuat LTTE memiliki posisi yang cukup diperhitungkan dalam pasar dengan jaringan global. LTTE dengan koneksi dan jaringan yang sudah terbangun mantab, yaitu dengan persebaran diasporanya, mampu menjadi ancaman bukan hanya bagi Sri Lanka, namun juga bagi Negara-Negara yang terkena imbas dari tindak kriminal yang mereka lakukan. Apabila Sri Lanka tidak bekerja sama dengan Negara atau institusi dalam masyarakat internasional, maka melumpuhkan jaringan kriminal terorganisir LTTE terlihat semakin sulit untuk dilakukan.

#### 4.2.3 Keseimbangan Negara dan individu (*“Nation-state” dan “the People”*)

Penulis berpendapat bahwa pertarungan kepentingan antara Pemerintah, beserta atributnya, dengan media massa merupakan representasi pertarungan kepentingan antara Negara dan Masyarakat. Negara (Pemerintah dan militer) akan mengupayakan segala cara dan sumber daya untuk memenangkan Perang. Hal ini termasuk di dalamnya mempengaruhi dan mengontrol pemberitaan oleh media massa. Sehingga dapat dipahami bahwa media massa adalah sebuah alat, yang dapat dipergunakan oleh Negara untuk mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Tetapi, di lain sisi media massa juga dapat berperan sebagai alat penyaji informasi yang berimbang untuk melayani kepentingan masyarakat luas.

Friedman menyebut individu-individu yang memiliki kekuatan besar sebagai ‘super empowered individuals’. Individu-individu inilah yang mampu mempengaruhi agenda sebuah Negara, transaksi dan negosiasi perusahaan, dan bahkan keamanan nasional dan internasional. Dari individu-individu ini dibentuk strategi keamanan nasional yang baru, yang lebih efektif untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya antara Negara, akan tetapi juga dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional lainnya.

Dalam kasus LTTE, individu – individu ini terletak di berbagai penjuru dunia, dengan berbagai macam profesi dan tingkat pengaruh dalam dunia internasional. Namun mereka semua memiliki kesamaan, yaitu kemampuan untuk mendapatkan akses, sampai pada tahap mereka bis menjalankan oeprasi yang mendukung pergarakan LTTE, maupun menjadi perpanjangan negosiasi LTTE di dunia internasional.

Pengaruh “Tamil Diaspora” dalam perkembangan perlawanan insurgensi etnis Tamil terhadap pemerintah Sri Lanka dapat ditelusuri melalui dua bantuan yang diberikan. Pertama, dukungan materiil dan imateriil. Dukungan materiil yang diberikan oleh “Tamil Diaspora” berupa sumbangan dana, persenjataan, maupun perlengkapan logistik lainnya bagi kelompok perlawanan etnis Tamil. Dukungan imateriil yang diberikan oleh “Tamil Diaspora” adalah penggalangan dukungan publik internasional dan pemerintah Negara lain melalui beragam kampanye yang dilakukan di berbagai dunia.

Kedua, dukungan sebagai wadah perkembangan embrio untuk regenerasi pemimpin perlawanan etnis Tamil. Aktifitas para pemuda-pemudi Tamil di luar Sri Lanka merupakan aset perjuangan etnis Tamil yang berharga. Generasi muda Tamil di luar Sri Lanka dipandang dapat memainkan peran dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan generasi muda Tamil banyak yang menjalani pendidikan di negara-negara Barat, yang menjadikan mereka memiliki pemahaman dunia internasional dan kemampuan berdiplomasi yang bertaraf internasional.

#### 4.2.3.1 Dukungan Material dan Imaterial

LTTE telah membangun jaringan global bahkan sejak masa N.S.Krishnan yang merupakan bentuk jaringan internasional pertama mereka. Pada akhir tahun 1970an, anggota parleman TULF dan pemimpin oposisi A. Amirthaligam dan V.N. Navaratnam yang merupakan anggota komite eksekutif IPU (Inter-Parliamentary Union) dengan pengaruh yang dimilikinya, mengenalkan orang-orang Tamil yang

berpengaruh dan kaya pada para pemimpin LTTE<sup>115</sup>. Bahkan Navaratnam juga mengenalkan para anggota LTTE pada anggota Polisario Front yang merupakan sebuah gerakan pembebasan di Maroko dalam sebuah pertemuan yang dilakukan di Oslo, Norwegia. Pada tahun 1978, Amirthaligam dan seorang aktivis Eelam di London, S.K. Vaikundavasan membentuk WTCC (World Tamil Coordinating Committee). WTCC ini kemudian menjadi front organisasi LTTE. Kontak global LTTE berkembang setelah itu hingga LTTE memiliki 42 jaringan di seluruh dunia. Jaringan global LTTE ini memiliki fungsi di empat area, yaitu<sup>116</sup>:

- Propaganda
- Pendanaan
- Pasokan senjata
- Shipping

Dalam area propaganda, hal yang diutamakan adalah menarik simpati publik, baik dari pihak orang-orang Tamil maupun internasional. Tujuannya selain untuk mendapat dukungan. Bentuk dukungan yang disasar antara lain berupa dukungan publik internasional agar kemerdekaan mereka atas Sri Lanka dapat terwujud. Selain itu juga dukungan berupa tenaga yaitu sebagai pejuang LTTE dan dukungan dana. Hal ini penting karena dalam perjuangannya, aktivitas LTTE memerlukan dana yang tidak sedikit. Anggota jaringan global LTTE di luar negeri banyak yang memiliki bisnis di berbagai negara. Bisnis mereka meliputi real estate, perkapalan, toko grosir, toko emas dan perhiasan, pom bensin, restaurant, rumah produksi film dan media massa seperti radio dan televisi. Terdapat juga beberapa organisasi amal, salah satunya Tamil Rehabilitation Organisation yang kemudian dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2007 karena dianggap telah mendanai gerakan terorisme.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Meskipun tahun 2009 pemerintah Sri Lanka mengalahkan LTTE, sebagian besar dari orang Tamil di luar negeri terus berlanjut untuk mendukung sebuah negara terpisah, dan uang mereka bisa memastikan hal ini. Kekalahan LTTE dan jumlah korban tewas yang sangat besar telah meninggalkan perasaan tak berdaya, menuntut keadilan dan ingin balas dendam dari para orang Tamil yang tinggal di luar negeri. Pendanaan jaringan yang didirikan oleh LTTE selama beberapa dekade melemah. Meskipun demikian, kebanyakan orang Tamil di luar negeri tetap sangat berkomitmen untuk LTTE dan keberadaan sebuah negara terpisah di Sri Lanka.

Organisasi baru yang terbentuk beroperasi dengan cara yang lebih transparan dan demokratis daripada LTTE dan yang bertujuan untuk menekan pemerintah Barat untuk menerima sebuah negara independen untuk Tamil. Ini termasuk rencana untuk "pemerintah transnasional Tamil Eelam", berbagai kalangan orang Tamil di berbagai negara mendukung adanya negara terpisah, boikot terhadap produk yang dibuat di Sri Lanka dan advokasi dalam mendukung penyelidikan internasional ke tuduhan kejahatan perang oleh Sri Lanka. Pada puncak dari konflik, lebih dari 100.000 orang Tamil di luar negeri menyumbang sekitar \$ 200 juta setahun untuk LTTE.

Uang akan terus menjadi salah satu aspek yang paling penting dari hubungan antara orang Tamil di luar negeri dan di Sri Lanka. Orang Tamil di luar negeri memainkan peran penting dalam mempertahankan perekonomian negara. Pengiriman uang dari luar negeri mencapai sekitar \$ 2,8 miliar pada 2009, merupakan salah satu sumber devisa terbesar<sup>117</sup>. Uang dibesarkan yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa sering dikirim untuk mendapatkan senjata dan bahan untuk keperluan perang. Senjata-senjata itu dikirim melalui Malaysia, Thailand, Singapura dan India dimana anggota LTTE dapat berbaur ke dalam masyarakat Tamil biasa. Untuk keperluan senjata, bahkan pejabat Departemen Keuangan AS memperkirakan bahwa selama perang LTTE memperoleh antara \$ 100 - \$ 200 juta per tahun dari seluruh dunia<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> Dokumen, "Crisis Group interview," New York, September 2009, *Op.Cit.*

<sup>118</sup> "Crisis Group interviews", U.S. State Department and Treasury officials, Washington DC, Juli 2008.

Perjuangan LTTE sangat bergantung pada jaringan global yang merupakan sumber dana mereka<sup>119</sup>. Dana lain dihasilkan melalui kegiatan , seperti pemalsuan paspor, narkoba dan perdagangan manusia. Dana lain yang signifikan juga datang dari kontribusi individu melalui kuil , acara budaya dan politik seperti Thaipongal atau Pongu Thamil, dan kegiatan lain yang diadakan untuk mendukung Tamil di Sri Lanka. Bahkan jaringan Tamil Swiss mengatakan, LTTE memiliki bantuan dana yang termasuk terbaik dari Gereja Katolik di Swiss<sup>120</sup>. Di AS, diperkirakan kontribusi mereka di sekitar \$ 10 - \$ 20 juta setahun. LTTE juga mendapat bantuan dari LSM bantuan dan organisasi amal. Penangkapan pada bulan Agustus 2009 atas Selverasa Pathmanathan atau yang dikenal sebagai KP, mengungkapkan keberadaan lebih dari 600 rekening bank LTTE di luar negeri<sup>121</sup>.

Setelah kekalahan LTTE, beberapa silang pendapat terjadi diantara jaringan global LTTE. Terdapat dua jaringan global LTTE yang terbesar, yaitu:

a. Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE)

Walaupun masih dalam tahap perencanaan, TGTE merupakan berambisi untuk mengubah citra LTTE sebagai badan non-kekerasan politik yang demokratis. Pengagasnya berharap bahwa pemilihan umum diadakan di seluruh wilayah diaspora etnis Tamil di dunia. Tujuannya untuk memaksa masyarakat internasional untuk mendukung sebuah negara merdeka untuk orang Tamil di Sri Lanka.

b. Global Tamil Forum (GTF)

GTF ini bertujuan untuk menjadi sebuah organisasi kuasi-advokasi dan kemanusiaan yang berbasis di London. Dibandingkan TGTE, GTF dinilai

<sup>119</sup> *The LTTE's fundraising strategies di Tamil Diaspora*, dapat dilihat di "Funding the 'Final War'", Human Rights Watch, 14 March 2006; Daniel Byman et al., "Trends in Outside Support for Insurgent Movements", RAND, 2001; dan Shanaka Jayasekara, "LTTE Fundraising and Money Transfer Operations", 24 October 2007 tersedia di [www.apgml.org](http://www.apgml.org).

<sup>120</sup> *Crisis Group interview*, Swiss Tamil, Zurich, July 2008.

<sup>121</sup> Tuduhan kekerasan lainnya dapat dilihat di "KP tortured", *Sri Lanka Guardian*, 3 November 2009.

kurang ambisius. GTF mengatakan organisasi hanya akan memfokuskan perhatian pada pemerintah Barat pada masalah kemanusiaan langsung dari Tamil di Sri Lanka. Tujuan mereka hanya ingin menjamin bahwa orang-orang Tamil yang hidup di Sri Lanka dapat hidup dengan baik dan terjamin. Pandangan ini berbeda dengan beberapa jaringan global lainnya dan orang-orang Tamil di Sri Lanka yang masih menginginkan kemerdekaan.

Dalam perjuangannya ini, Tamil diaspora meminta banyak dukungan dari pihak asing, mereka antara lain:

a. Danny Davis (The United States Congressman)<sup>122</sup>:

Sejak perjalannya ke Sri Lanka tahun 2006 yang didanai oleh Vinayagamoorthy anggota Tamil yang disebut terlibat pencucian uang LTTE melalui rekening bank Swiss. Davis mulai membuat pernyataan mendukung LTTE.



Gambar 4.6. Danny Davis.<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Organisasi teroris Tamil Tigers/LTTE menggalang dana.

<sup>123</sup> Tampilan situs di ambil pada 21 – 04 – 2012, pukul 07:00 WIB.

- b. Bruce Fein (Pengacara dan Mantan Deputy Jaksa Agung AS)<sup>124</sup>:

Pada Februari 2004, Fein dalam artikel di The Washington Post menyatakan pemerintah Sri Lanka telah melakukan pelanggaran HAM atas etnis Tamil. Ia dituduh telah menerima bayaran untuk dukungannya ini.



Gambar 4.7. Bruce Fein.<sup>125</sup>

- c. Members of Parliament of the United Kingdom:

Pada Februari 2010, David Miliband dan Gordon Brown bertemu delegasi pada konferensi London Global Tamil Forum. Pemerintah Sri Lanka mengecam kejadian tersebut. Keretakan diplomatik antara London dan Kolombo telah melebar setelah Gordon Brown dan David Miliband bertemu delegasi dari Tamil.

<sup>124</sup> <http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/25/sri-lanka-global-tamil-forum>. Di akses pada 21 – 02 2012, 19:00 WIB.

<sup>125</sup> Tampilan video di ambil pada 21 – 04 – 2012, pukul 07:00 WIB.





David Miliband addressed the inaugural conference of the Global Tamil Forum. Photograph: Dave Gadd/Allstar

*Gambar 4.8. Members of Parliament of the United Kingdom.* <sup>126</sup>

#### 4.2.3.2 Wadah perkembangan embrio untuk regenerasi pemimpin perlawanan etnis Tamil.

Kalangan generasi muda Tamil baik di luar maupun dalam negeri, tergerak oleh kematian ribuan warga sipil Tamil di bulan-bulan terakhir perang untuk melanjutkan perjuangan LTTE seperti masa Velupillai Prabhakaran. Selama bertahun-tahun, pemuda Tamil diaspora telah melancarkan protes meminta campur tangan internasional dalam perang saudara di Sri Lanka untuk membantu membangun gencatan senjata permanen. Banyak pemuda Tamil mengkritik keras kebijakan Rajapakse, yang menurut mereka tidak menghormati hak-hak kelompok minoritas di negara ini. Pada tanggal 17 Juni 2009 di London, kelompok pemuda Tamil menggelar sebuah protes 73 hari menyerukan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap orang Tamil oleh pemerintah Sri Lanka. Protes ini kemudian berakhir dengan serangkaian bentrokan dengan polisi di Parliament Square.

<sup>126</sup> Tampilan video di ambil pada 21 – 04 – 2012, pukul 07:00 WIB.

Banyak generasi muda Tamil hidup di seluruh dunia berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan etnis Tamil di Sri Lanka pada dunia Barat. Kesadaran ini tumbuh, setelah mereka menyaksikan bagaimana etnis Tamil tinggal di Sri Lanka pada periode gencatan senjata antara LTTE dengan militer Sri Lanka tahun 2002-2006. Pemuda-pemuda Tamil diaspora ini dalam perjuangannya, membantuk berbagai macam organisasi internasional seperti Tamil Youth Center<sup>64</sup>, Tamil Youth Organisation (TYO)<sup>65</sup>, Canadian Tamil Youth Development (CanTYD) dan beberapa lainnya. Tujuan dari organisasi-organisasi ini adalah untuk mengkampanyekan perdamaian dan kehidupan yang layak bagi etnis Tamil di Sri Lanka.

Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan pemuda Tamil akan perjuangan LTTE. Pemuda Tamil yang moderat menolak taktik menggunakan kekerasan yang selama ini dijalankan LTTE dalam perjuangannya. Sedangkan kalangan pemuda Tamil yang radikal berpendapat "Unsur-unsur radikal ekstrim pemuda Tamil diaspora akan terus hidup dalam kemuliaan masa lalu LTTE".<sup>67</sup> Para pemuda-pemuda Tamil diaspora radikal ini berusaha untuk membangkitkan kembali LTTE seperti masa kepemimpinan Veluppilai Prabhakaran.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penulis berpendapat bahwa meskipun jaringan teroris memiliki karakter yang berbeda-beda, terdapat persamaan yang bisa ditarik dari beberapa jaringan teroris global. Kesamaan yang dimaksud disini adalah, penggunaan teknologi untuk memperluas cakupan mereka, dan mempermudah operasi serta persebaran. Baik LTTE maupun al-Qaeda mengambil keuntungan yang signifikan dari perkembangan teknologi yang ada, sehingga mereka memiliki dasar yang kuat di berbagai belahan dunia. Jika al-Qaeda menjadikan ideologi jihad sebagai motor dari persebaran gerakan terorismenya, LTTE memanfaatkan komunitas migran global yang mulai meninggalkan Sri Lanka pada saat konflik berlangsung. Selain itu, LTTE juga memiliki motif ekonomi yang lebih nyata dibandingkan dengan organisasi teroris lain. Pergerakan kejahatan terorganisirnya yang mencakup pencucian uang, penjualan narkoba, penipuan kartu kredit dan, akun bank, serta pemerasan para imigran etnis Tamil Sri Lanka, merupakan sumber yang sangat besar untuk pergerakan mereka.

LTTE merupakan paduan yang unik antara kelompok insurgen, teroris, dan pelaku kriminal terorganisir. Mereka menggunakan gerakan insurgen demi kemerdekaan etnis Tamil, untuk memeras para migran yang berhasil di Negara Negara lain, dan dengan begitu LTTE memiliki jaringan dan bangunan yang kuat di Negara Negara tersebut. Dalam hal Taktik, LTTE memiliki berbagai macam teknik, dan taktik penyerangan yang bahkan diadopsi oleh kelompok kelompok teroris tingkat tinggi lain seperti Al-Qaeda dan Abu sayyaf group, sehingga hal ini bukanlah hal baru bagi LTTE. Dan yang lebih perlu diperhatikan adalah koordinasi dan kesatuan operasi LTTE, baik dari pembelian senjata, taktik perang, maupun pendanaan yang tertata dengan rapi. Dari sinilah LTTE mengambil jalan ke dunia dan pasar kejahatan terorganisir global, untuk mendapatkan sumber yang mereka butuhkan yaitu pendanaan, persenjataan dan logistik untuk mendukung gerakan

insurgent mereka di dalam negeri. Kesenambungan dan integasi dari ketiga hal ini membuat LTTE bertahan cukup lama sebagai jaringan teroris internasional. Meski terdapat batas yang kabur antara motif ekonomi yang melandasi tindakan kejahatan kriminal terorganisir mereka, namun kedua sisi ini dapat berjalan dengan baik selama kurun waktu yang cukup lama.

LTTE menanggapi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, untuk memperluas jaringannya dan menyuarakan tujuan tujuan dibentuknya Tamil Eelam. Hal ini didukung oleh pasar global yang semakin bebas yang memberikan mereka ruang untuk melancarkan aksi tindak kejahatan kriminal terorganisir. Nasionalisme dan kekuatan ikatan etnis Tamil juga menjadi salah satu faktor penting disini. Begitu pula keseimbangan aktor aktor didalamnya, yang mencakup hubungan Sri Lanka dengan etnis Tamil dan persebarannya, serta hubungan antara Sri Lanka dengan india yang memiliki sejarah cukup panjang. Dalam dunia yang serba cepat dan canggih, batas semakin kabur, dan semua saling terkait satu sama lain.

## **5.2 Saran**

Dalam era globalisasi yang serba tidak terbatas, diperlukan kerjasama yang kuat antara berbagai Negara dan institusi masyarakat internasional. Apabila ancaman yang sebelumnya bersifat domestik, dengan meluasnya cakupan komunikasi dan cepatnya perkembangan teknologi, bukan tidak mungkin ancaman tersebut menjadi ancaman bagi kedamaian dan keamanan masyarakat internasional. LTTE merupakan satu contoh yang paling nyata dari fenomena ini. Masyarakat internasional harus tetap membangun kerangka hukum yang lebih baik, untuk mempersempit ruang pergerakan organisasi dan kelompok teror dan kriminal terorganisir, serta saling berbagi informasi dan saling mendukung dalam bentuk kerjasama jangka panjang untuk kepentingan keamanan kolektif, bagi dunia internasional yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Citizen-Soldier; Buck Sargent's Warrior Politics,  
[www.bucksargent.net/2006/05/csi-iraq.html](http://www.bucksargent.net/2006/05/csi-iraq.html).
- Berman, Paul Schiff. "The Globalization of Jurisdiction", University of Pennsylvania Law Review, Vol. 151, No. 2 pp. 311-545. University of Pennsylvania: Pennsylvania, 2002.
- Bragdon, Clifford. *Transportation Security*. Butterworth Heinemann, Maryland: 2008.
- Crenshaw, M., "Democracy, Commitment Problems and Managing Ethnic Violence: The Case of India and Sri Lanka," *Terrorism and Political Violence*, 12, ¾: 135—59, (2009)
- Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford: New York; Oxford University Press, 2009.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc, 1994.
- Friedman, Thomas L, *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*, terj., Bandung: ITB, 2000.
- Fuglerud, Oivind. *Life on the Outside. The Tamil Diaspora and Long Distance Nationalism*. London: 1991
- Interreg North Sea Region, *I project Development; Transnationality*  
[http://www.northsearegion.eu/UserFiles/File/Key%20Documents/Factsheets/No01\\_Transnationality.pdf](http://www.northsearegion.eu/UserFiles/File/Key%20Documents/Factsheets/No01_Transnationality.pdf)
- Haberkern, John L. *The Global War on Terrorism: Ideology as Its Strategy Center of Gravity, Strategy Research Project*. Pennsylvania : US Army War College, 2004.
- Hamid, Tawfik. 'The Development of a Jihadist's Mind'. Current Trends of Islamist Ideology. vol 5. 06 April, 2007.  
 <[http://www.currenttrends.org/research/pubID.63/pub\\_detail.asp](http://www.currenttrends.org/research/pubID.63/pub_detail.asp)>.
- Johnson, Thomas A. *The war on Terrorism, A Collision of Values and Strategies*. New York: CRC Press, 2009.

- Joshi, M. (1996) "On the Razor's Edge: The Liberation Tigers of Tamil Eelam," *Studies in Conflict and Terrorism*, 19, 1:19-42
- Merriam Webster, 'Diaspora' <http://www.merriam-webster.com/dictionary/diaspora>
- Ministry of Foreign affairs. *LTTE, The international Dimension of Terrorism*, Sri Lanka: Ministry of Foreign affairs, 2007.
- Mullins, Sam. 'Parallels Between Crime and Terrorism: A Social Psychological Perspective', *Studies in Conflict & Terrorism*, 32: 9, 811 — 830.
- Pickard, Daniel. *When does crime become a threat to International peace and security?*. Florida Journal of International Law, 1998.
- Pintak, Lawrence, *Rewriting the Script dalam Refelctions in A Bloodshot Lens*, London: Pluto Press, 2006.
- Rosenau, James N., *The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalization of World Affairs*, London: Frances Pinter, 1980.
- Seib, Philip, dan Janbek, Dana M. *Global Terrorism and New Media, The Post-Al Qaeda Generation*. New York: Routledge, 2011.
- Shelley, Louise. *The Globalization of Crime and Terrorism*. *E-Journal USA*. 01 February 2006 edition.
- Shelley, Louise I, dan Picarelli John T. *Methods not motives: implications of the convergence of international organized crime and terrorism*. Washington: Transnational Crime and Corruption Center, American University, 2002.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami metode kualitatif". *Makara, Sosial Humaniora*, vol. 9, no. 2, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2005.
- Tamara Makarenko, "Terrorism and Transnational Organized Crime: Tracing the Crime-Terror Nexus in South East Asia" in Paul Smith. ed., *Terrorism and Violence in South East Asia: Transnational Challenges to States and Regional Stability* (New York: M. E. Sharpe, 2005), pp. 169–187.
- Tumber, Howard dan Palmer, Jerry. *Media at War: The Iraq Crisis*, London: SAGE, 2004.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *A transnational Organized Crime threat assessment*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010. <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf>

- United Nations Security Council. *As Nature of New Threats Evolves, Security Council, Central To Keeping Peace, Must Also Keep Pace, Secretary-General Says During Council Debate on New Challenges*, Department of Public Information, News and Media Division: New York, 2011. <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10457.doc.htm>
- United Nations. *A more secure world: Our shared responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*. United Nations Department of Public Information; 2004.
- Von Lampe, K., 'Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the United States of America'. *Forum on Crime and Society* Vol. 1 No. 2, December 2001, hal. 99-116.
- Whittaker, David J. *The Terrorism Reader*. London: Routledge, 2001.
- William, Phils. *Criminals, Militias, And Insurgents : Organized Crime In Iraq*. Philadelphia: Strategic Studies Institute Publication, 2009.
- Rabasa, Angela. *Beyond al-Qaeda, Part 2: The Outer Rings of the Terrorist Universe*, Arlington : RAND Corporation, 2006)
- Stepanova, Ekarina, *Terrorism in Asymmetrical Conflict; Ideological and Structural Aspects*; 2008
- Manoharan, N. *Counterterrorism Legislation in Sri Lanka: Evaluating Efficacy*. Washington : East-West Center, 2006.
- Ziemke-Dickens, Caroline dan Droogan, Julian. *Asian Transnational Security Challenges: Emerging Trends, Regional Visions*. Sidney: Macquire University, 2010.
- *War, Peace and Governance in Sri Lanka*. Centre for Policy Alternatives. Desember 2006.
- *Srilanka: Briefing Paper Emergency Laws and International Standards*. Maret 2009. *International Commission of Jurists*.
- *Equipe de recherché sur le Terrorisme et l'antiterorisme, Définitions du terrorisme*, ERTA: 2006.
- <http://www.erta-tcrg.org/analyses/definitions.htm>.